



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

DIINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024



Website : arpusda.jatengprov.go.id

Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

Instagram : @dinas_arpus_jateng

Telepon : (024) 7473746, 7474170 Fax : 7473800

JL. SETIABUDI NO. 201C SRONDOL, BANYUMANIK, SEMARANG



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Setiabudi No. 201C Srandol, Banyumanik SEMARANG**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2024



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19720502 199903 1 008

DAFTAR ISI		Halaman
I	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	i
II	Daftar Isi	ii
III	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	iii
IV	Neraca Komparatif SKPD	vii
V	Laporan Operasional SKPD	xi
VI	Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	xiii
VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 1	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
Bab 2	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	6
	2.1. Ekonomi Makro	6
	2.2. Kebijakan Keuangan	10
Bab 3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	12
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	12
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	18
Bab 4	Kebijakan Akuntansi	22
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	22
	4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	23
	4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	41
Bab 5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	42
	5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	42
	5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	52
	5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	57
	5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	65
Bab 6	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	67
	6.1. Gambaran Umum	67
	6.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	67
	6.3. Visi Dan Misi	68
	6.4. Struktur Organisasi	69
Bab 7	Penutup	70
	Lampiran Tambahan	



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	-	-
8	Pajak Rokok		-	-	-	-
9	Pajak Alat Berat		-	-	-	-
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
12	Retribusi Daerah		90.000.000,00	38.738.500,00	43,04	70.773.500,00
13	Retribusi Jasa Umum		-	-	-	-
14	Retribusi Jasa Usaha		90.000.000,00	38.738.500,00	43,04	70.773.500,00
15	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	-	-
16	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-	-	-
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-	-	-
19	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-	-	-
20	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-	23.650.000,00	-	2.750.000,00
21	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
22	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
23	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	21.000.000,00	-	-
24	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	-	-
25	Jasa Giro		-	-	-	-
26	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
27	Pendapatan Bunga		-	-	-	-
28	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	-	-
29	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	2.650.000,00	-	2.750.000,00
30	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	-	-
31	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-
32	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	-	-
33	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	-	-
34	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	-	-
35	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-	-
36	Pendapatan BLUD		-	-	-	-
37	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	-	-
38	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	-	-
39	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
40	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	-	-
41	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	-	-
42	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-	-	-
43	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-	-	-
44	Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-	-	-
45	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
46	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		90.000.000,00	62.388.500,00	69,32	73.523.500,00
47						
48	PENDAPATAN TRANSFER					
49	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
50	Dana Perimbangan		-	-	-	-
51	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-
52	Insentif Fiskal		-	-	-	-
53	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-	-	-
54	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-	-	-
55	Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-	-	-
56	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
57	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
58	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
59	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
60						
61	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
62	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
63	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
64	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
65	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	-	-
66	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	-	-
67	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	-	-
68	Dana Darurat		-	-	-	-
69	Dana Darurat		-	-	-	-
70	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
71	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
72	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-	-	-
73	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara		-	-	-	-
74	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat		-	-	-	-
75	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
76						
77	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		90.000.000,00	62.388.500,00	69,32	73.523.500,00

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
78					-	
79	BELANJA DAERAH				-	
80	BELANJA OPERASI				-	
81	Belanja Pegawai		27.403.581.000,00	26.474.456.108,00	96,61	26.314.408.703,00
82	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		12.927.078.000,00	12.260.435.558,00	94,84	12.289.742.954,00
83	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		14.250.073.000,00	13.991.340.550,00	98,18	13.818.115.749,00
84	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		226.430.000,00	222.680.000,00	98,34	206.550.000,00
85	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
86	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	-
87	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	-
88	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP		-	-	-	-
89	Belanja Pegawai BOS		-	-	-	-
90	Belanja Pegawai BOSP		-	-	-	-
91	Belanja Pegawai BLUD		-	-	-	-
92	Belanja Barang dan Jasa		15.902.323.000,00	15.806.209.270,00	99,40	6.652.779.094,00
93	Belanja Barang		9.854.329.000,00	9.828.914.829,00	99,74	1.203.514.909,00
94	Belanja Jasa		3.650.303.000,00	3.619.541.120,00	99,16	3.626.534.265,00
95	Belanja Pemeliharaan		709.825.000,00	692.599.339,00	97,57	607.710.150,00
96	Belanja Perjalanan Dinas		1.628.016.000,00	1.605.303.982,00	98,60	1.155.019.770,00
97	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		59.850.000,00	59.850.000,00	100,00	60.000.000,00
98	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
99	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
100	Belanja Barang dan Jasa BOSP		-	-	-	-
101	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	-
102	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
103	Belanja Bunga		-	-	-	-
104	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
105	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
106	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
107	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
108	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
109	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
110	Belanja Subsidi		-	-	-	-
111	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
112	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
113	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
114	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
115	Belanja Hibah		-	-	-	-
116	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
117	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
118	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
119	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
120	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	-	-
121	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	-	-
122	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-
123	Belanja Hibah Dana BOSP		-	-	-	-
124	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
125	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
126	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
127	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
128	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-
129	Jumlah Belanja Operasi		43.305.904.000,00	42.280.665.378,00	97,63	32.967.187.797,00
130					-	
131	BELANJA MODAL				-	
132	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
133	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
134	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-	-	-
135	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		722.175.000,00	713.258.000,00	98,77	335.123.000,00
136	Belanja Modal Alat Besar		-	-	-	-
137	Belanja Modal Alat Angkutan		-	-	-	-
138	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	-	-
139	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	-	-
140	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		424.100.000,00	420.820.000,00	99,23	179.562.000,00
141	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		35.000.000,00	34.398.000,00	98,28	4.660.000,00
142	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	-	-
143	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	-	-
144	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-	-	-
145	Belanja Modal Komputer		263.075.000,00	258.040.000,00	98,09	150.411.000,00
146	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	-	-
147	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	-	490.000,00
148	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	-	-
149	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
150	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	-
151	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	-	-
152	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	-
153	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	-	-
154	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	-	-
155	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	-
156	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		-	-	-	-
157	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-	-	-
158	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		5.668.971.000,00	5.667.437.999,00	99,97	-
159	Belanja Modal Bangunan Gedung		5.668.971.000,00	5.667.437.999,00	99,97	-
160	Belanja Modal Monumen		-	-	-	-
161	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	-	-
162	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	-	-
163	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		-	-	-	-
164	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
165	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	-	-
166	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	-	-
167	Belanja Modal Instalasi		-	-	-	-
168	Belanja Modal Jaringan		-	-	-	-
169	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-	-	-
170	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		935.953.000,00	919.336.945,00	98,22	426.593.173,00
171	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		935.953.000,00	919.336.945,00	98,22	426.593.173,00

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
172	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	-	-
173	Belanja Modal Hewan		-	-	-	-
174	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	-	-
175	Belanja Modal Tanaman		-	-	-	-
176	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	-	-
177	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	-
178	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
179	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	-	-
180	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		-	-	-	-
181	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-	-	-
182	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
183	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
184	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-	-	-
185	Jumlah Belanja Modal		7.327.099.000,00	7.300.032.944,00	99,63	761.716.173,00
186					-	
187	BELANJA TIDAK TERDUGA				-	
188	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
189	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
190	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
191					-	
192	BELANJA TRANSFER				-	
193	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
194	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	-	-
195	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
196	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	-	-
197	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
198	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	-	-
199	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-
200	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	-	-
201	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota		-	-	-	-
202	Jumlah Belanja Transfer		-	-	-	-
203					-	
204	JUMLAH BELANJA DAERAH		50.633.003.000,00	49.580.698.322,00	97,92	33.728.903.970,00
205						
206	SURPLUS/DEFISIT		(50.543.003.000,00)	(49.518.309.822,00)	97,97	(33.655.380.470,00)
207					-	
208	PEMBIAYAAN DAERAH				-	
209	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				-	
210	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
211	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	-	-
212	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	-	-
213	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	-	-
214	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
215	Penghematan Belanja		-	-	-	-
216	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan		-	-	-	-
217	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
218	Sisa Belanja Lainnya		-	-	-	-
219	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		-	-	-	-
220	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
221	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
222	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
223	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
224	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
225	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
226	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
227	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
228	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
229	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
230	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
231	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
232	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
233	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
234	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	-	-
235	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	-	-
236	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	-	-
237	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	-	-
238	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
239	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		-	-	-	-
240	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	-	-
241	Divestasi BLUD		-	-	-	-
242	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
243	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat		-	-	-	-
244	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
245					-	
246	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				-	
247	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
248	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
249	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
250	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
251	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
252	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-
253	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
254	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
255	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
256	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
257	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
258	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
259	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
260	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
261	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	-	-
262	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	-	-
263	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	-	-
264	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	-	-
265	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
266	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
267	Pinjaman BLUD		-	-	-	-
268	Investasi BLUD		-	-	-	-
269	Pembentukan Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
270	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
271	Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
272	Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat		-	-	-	-
273	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
274						
275	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
276						
277	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(50.543.003.000,00)	(49.848.809.622,00)	97,97	(33.655.380.470,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PEMERINTAH PROVINSI
DINAS ARPUS
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. M.Si
NIP. 19720502 199903 1 008
JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2024	2023
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		-	-
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		-	-
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Kas Dana Desa		-	-
13	Kas Dana BOSP		-	-
14	Kas Dana BOK Puskesmas		-	-
15	Investasi Jangka Pendek		-	-
16	Investasi dalam Saham		-	-
17	Investasi dalam Deposito		-	-
18	Investasi dalam SUN		-	-
19	Investasi dalam SBI		-	-
20	Investasi dalam SPN		-	-
21	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
22	Piutang Pajak Daerah		-	-
23	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
24	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
25	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
26	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
27	Piutang Pajak Rokok		-	-
28	Piutang Pajak Alat Berat		-	-
29	Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
30	Piutang Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-
31	Piutang Retribusi Daerah		-	-
32	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
33	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
34	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
35	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
36	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-
37	Piutang Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-
38	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-
39	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
40	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
41	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
42	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
43	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
44	Piutang Jasa Giro		-	-
45	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
46	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
47	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-
48	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-
49	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		-	-
50	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-
51	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
52	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
53	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
54	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
55	Piutang Pendapatan BLUD		-	-
56	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
57	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
58	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
59	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
60	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
61	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
62	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-
63	Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-
64	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-
65	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
66	Piutang Dana Perimbangan		-	-
67	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
68	Piutang Insentif Fiskal		-	-
69	Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
70	Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
71	Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-
72	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
73	Piutang Bagi Hasil		-	-
74	Piutang Bantuan Keuangan		-	-

NO	URAIAN	REFF	2024	2023
75	Piutang Lainnya		-	-
76	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
77	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
78	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
79	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
80	Uang Muka		-	-
81	Penyisihan Piutang		-	-
82	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
83	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
84	Beban Dibayar Dimuka		15.326.924,03	10.693.501,62
85	Beban Dibayar Dimuka		-	10.693.501,62
86	Beban Dibayar Dimuka-Sewa		-	-
87	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah		15.326.924,03	-
88	Persediaan		8.459.375,00	45.919.500,00
89	Barang Pakai Habis		8.459.375,00	45.919.500,00
90	Barang Tak Habis Pakai		-	-
91	Barang Bekas Dipakai		-	-
92				
93	JUMLAH ASET LANCAR		23.786.299,03	56.613.001,62
94				
95	INVESTASI JANGKA PANJANG			
96	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
97	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
98	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
99	Investasi dalam Obligasi		-	-
100	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
101	Dana Bergulir		-	-
102	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
103	Penyertaan Modal		-	-
104	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
105	Investasi Dana Abadi Daerah		-	-
106				
107	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
108				
109	ASET TETAP			
110	Tanah		4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
111	Tanah		4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
112	Peralatan dan Mesin		36.674.712.578,00	36.307.825.761,00
113	Alat Besar		4.793.220.260,00	4.065.823.260,00
114	Alat Angkutan		5.723.636.345,00	5.890.636.345,00
115	Alat Bengkel dan Alat Ukur		2.053.754.956,00	2.056.129.956,00
116	Alat Pertanian		-	-
117	Alat Kantor dan Rumah Tangga		13.836.690.408,00	13.734.463.498,00
118	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		4.524.881.090,00	4.691.826.256,00
119	Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-
120	Alat Laboratorium		78.430.000,00	90.230.000,00
121	Alat Persenjataan		-	-
122	Komputer		5.664.099.519,00	5.778.716.446,00
123	Alat Eksplorasi		-	-
124	Alat Pengeboran		-	-
125	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
126	Alat Bantu Eksplorasi		-	-
127	Alat Keselamatan Kerja		-	-
128	Alat Peraga		-	-
129	Peralatan Proses/Produksi		-	-
130	Rambu-rambu		-	-
131	Peralatan Olahraga		-	-
132	Gedung dan Bangunan		28.683.561.668,00	23.062.733.817,00
133	Bangunan Gedung		28.340.680.998,00	22.719.853.147,00
134	Monumen		-	-
135	Bangunan Menara		-	-
136	Tugu Titik Kontrol/Pasti		342.880.670,00	342.880.670,00
137	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		206.975.000,00	206.975.000,00
138	Jalan dan Jembatan		-	-
139	Bangunan Air		190.275.000,00	190.275.000,00
140	Instalasi		-	-
141	Jaringan		16.700.000,00	16.700.000,00
142	Aset Tetap Lainnya		14.994.727.353,00	14.075.390.408,00
143	Bahan Perpustakaan		14.984.688.782,00	14.065.351.837,00
144	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		10.038.571,00	10.038.571,00
145	Hewan		-	-
146	Biota Perairan		-	-
147	Tanaman		-	-
148	Barang Koleksi Non Budaya		-	-
149	Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-
150	Konstruksi dalam Pengerjaan		133.276.000,00	133.276.000,00
151	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
152	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah		-	-
153	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin		-	-
154	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan		133.276.000,00	133.276.000,00
155	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
156	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya		-	-
157	Akumulasi Penyusutan		(47.667.784.436,73)	(46.923.772.311,51)
158	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(34.806.950.326,91)	(34.596.464.416,63)
159	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(12.746.326.045,30)	(12.219.048.781,98)
160	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(114.508.064,52)	(108.259.112,90)
161	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
162	Aset Konsesi Jasa		-	-
163	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi		-	-
164	Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
165	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
166	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		-	-
167	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi		-	-
168	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
169				
170	JUMLAH ASET TETAP		37.571.968.162,27	31.408.928.674,49
171				
172	DANA CADANGAN			

NO	URAIAN	REF	2024	2023
173	Dana Cadangan		-	-
174	Dana Cadangan		-	-
175				
176	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
177				
178	ASET LAINNYA			
179	Tagihan Jangka Panjang		-	-
180	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
181	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
182	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
183	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
184	Aset Tak Berwujud		193.550.000,00	193.550.000,00
185	Aset Tak Berwujud		193.550.000,00	193.550.000,00
186	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud			
187	Aset Lain-lain		2.867.757.155,00	1.498.028.824,00
188	Aset Lain-Lain		2.867.757.155,00	1.498.028.824,00
189	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(193.550.000,00)	(193.550.000,00)
190	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(193.550.000,00)	(193.550.000,00)
191	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(2.867.757.155,00)	(1.498.028.824,00)
192	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(2.867.757.155,00)	(1.498.028.824,00)
193	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
194	Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka		-	-
195	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
196	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
197				
198	JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
199				
200	PROPERTI INVESTASI			
201	Properti Investasi Tanah		-	-
202	Properti Investasi Tanah			
203	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
204	Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
205	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		-	-
206	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
207	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		-	-
208	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
209				
210	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		-	-
211				
212	JUMLAH ASET		37.595.754.461,30	31.465.541.676,11
213				
214	KEWAJIBAN			
215	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
216	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
217	Utang Taspen		-	-
218	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
219	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		-	-
220	Utang Iuran Jaminan Kematian		-	-
221	Utang PPh Pusat		-	-
222	Utang PPN Pusat		-	-
223	Utang Taperum		-	-
224	Utang Iuran Wajib Pegawai		-	-
225	Utang Pihak Ketiga Lainnya		-	-
226	Utang Bunga		-	-
227	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		-	-
228	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
229	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
230	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
231	Utang Bunga kepada Masyarakat		-	-
232	Utang Bunga melalui BLUD		-	-
233	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
234	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		-	-
235	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
236	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
237	Utang Pinjaman BLUD		-	-
238	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
239	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		-	-
240	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
241	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
242	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		-	-
243	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek melalui BLUD		-	-
244	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
245	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		-	-
246	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		-	-
247	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-
248	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa		-	-
249	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah		-	-
250	Utang Belanja		-	-
251	Utang Belanja Pegawai		-	-
252	Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
253	Utang Belanja Bunga		-	-
254	Utang Belanja Subsidi		-	-
255	Utang Belanja Hibah		-	-
256	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
257	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
258	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
259	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
260	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
261	Utang Belanja Tidak Terduga		-	-
262	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
263	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
264	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-	-
265	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-
266	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
267	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
268	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-
269	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
270	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-

NO	URAIAN	REFF	2024	2023
271				
272	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
273				
274	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
275	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
276	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
277	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
278	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
279	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
280	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN		-	-
281	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD		-	-
282	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta		-	-
283	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
284	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN		-	-
285	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD		-	-
286	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta		-	-
287	Utang kepada Masyarakat		-	-
288	Obligasi		-	-
289	Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
290	Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
291				
292	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
293				
294	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
295				
296	EKUITAS			
297	EKUITAS		(11.922.555.360,70)	(2.189.838.793,89)
298	Ekuitas		31.465.541.676,11	31.227.826.485,87
299	Surplus/Defisit-LO		(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)
300	Ekuitas SAL		-	-
301	Estimasi Pendapatan		-	-
302	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
303	Apropriasi Belanja		-	-
304	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		-	-
305	Estimasi Perubahan SAL		-	-
306	Surplus/Defisit-LRA		-	-
307	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		49.518.309.822,00	33.655.380.470,00
308	RK PPKD		49.518.309.822,00	33.655.380.470,00
309				
310	JUMLAH EKUITAS		37.595.754.461,30	31.465.541.676,11
311				
312	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		37.595.754.461,30	31.465.541.676,11

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ARPUS
DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, M.Si
NIP. 19720502 199903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)					
NO	URAIAN	REF	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan) %
1	PENDAPATAN - LO				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-
7	Pajak Air Permukaan - LO		-	-	-
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-
9	Retribusi Daerah - LO		38.738.500,00	70.773.500,00	(32.035.000,00) (45,26)
10	Retribusi Jasa Umum - LO		-	-	-
11	Retribusi Jasa Usaha - LO		38.738.500,00	70.773.500,00	(32.035.000,00) (45,26)
12	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-
13	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		-	-	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		-	-	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO		-	-	-
17	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		23.650.000,00	2.750.000,00	20.900.000,00 760,00
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		21.000.000,00	-	21.000.000,00
21	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-
22	Jasa Giro - LO		-	-	-
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-
24	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO		2.650.000,00	2.750.000,00	(100.000,00) (3,64)
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		-	-	-
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-
32	Pendapatan dari Pengembalian - LO		-	-	-
33	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-
39	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-
40	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO		-	-	-
41	Pendapatan Konsepsi Jasa		-	-	-
42	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		62.388.500,00	73.523.500,00	(11.135.000,00) (15,14)
43					
44	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
45	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-
46	Dana Perimbangan- LO		-	-	-
47	Dana Insentif Daerah (DID)- LO		-	-	-
48	Insentif Fiskal-LO		-	-	-
49	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO		-	-	-
50	Pendapatan Bagi Hasil- LO		-	-	-
51	Bantuan Keuangan- LO		-	-	-
52	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-
53					
54	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO				
55	Pendapatan Hibah- LO		-	540.210.700,00	(540.210.700,00) (100,00)
56	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		-	540.210.700,00	(540.210.700,00) (100,00)
57	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO		-	-	-
58	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO		-	-	-
59	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO		-	-	-
60	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO		-	-	-
61	Dana Darurat- LO		-	-	-
62	Dana Darurat- LO		-	-	-
63	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-
64	Lain-lain Pendapatan- LO		-	-	-
65	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO		-	-	-
66	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		-	540.210.700,00	(540.210.700,00) (100,00)
67					
68	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH -LO		62.388.500,00	613.734.200,00	(551.345.700,00) (89,83)
69					
70	BEBAN				
71	BEBAN OPERASIONAL				
72	Beban Pegawai		26.474.456.108,00	26.314.408.703,00	160.047.405,00 0,61
73	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		12.260.435.558,00	12.289.742.954,00	(29.307.396,00) (0,24)
74	Beban Tambahan Penghasilan ASN		13.991.340.550,00	13.818.115.749,00	173.224.801,00 1,25
75	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		222.680.000,00	206.550.000,00	16.130.000,00 7,81
76	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-
77	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-
78	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-
79	Beban Gaji dan Tunjangan MRP		-	-	-
80	Beban Pegawai BOS		-	-	-
81	Beban Pegawai BOSP		-	-	-
82	Beban Pegawai BLUD		-	-	-
83	Beban Barang dan Jasa		15.839.035.972,59	6.597.603.842,38	9.241.432.130,21 140,07
84	Beban Barang		9.866.374.954,00	1.159.033.159,00	8.707.341.795,00 751,26
85	Beban Jasa		3.614.907.697,59	3.615.840.763,38	(933.065,79) (0,03)
86	Beban Pemeliharaan		692.599.339,00	607.710.150,00	84.889.189,00 13,97
87	Beban Perjalanan Dinas		1.605.303.982,00	1.155.019.770,00	450.284.212,00 38,98
88	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		59.850.000,00	60.000.000,00	(150.000,00) (0,25)
89	Beban Penunjang Otonomi Khusus		-	-	-
90	Beban Barang dan Jasa BOSP		-	-	-
91	Beban Barang dan Jasa BOSP		-	-	-
92	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-
93	Beban Barang dan Jasa BLUD		-	-	-
94	Beban Bunga		-	-	-
95	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-
96	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-
97	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-
98	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-
99	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-
100	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-
101	Beban Subsidi		-	-	-
102	Beban Subsidi kepada BUMN		-	-	-
103	Beban Subsidi kepada BUMD		-	-	-
104	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-
105	Beban Subsidi kepada Koperasi		-	-	-
106	Beban Hibah		8.511.000.000,00	-	8.511.000.000,00
107	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-
108	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-
109	Beban Hibah kepada BUMN		-	-	-
110	Beban Hibah kepada BUMD		-	-	-
111	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		8.511.000.000,00	-	8.511.000.000,00
112	Beban Hibah Dana BOS		-	-	-
113	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-
114	Beban Hibah Dana BOSP		-	-	-
115	Beban Bantuan Sosial		-	-	-
116	Beban Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-

117	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	-
118	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
119	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	-
120	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
121	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
122	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
123	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
124	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
125	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
126	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
127	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
128	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.136.993.456,22	1.119.386.934,38	17.606.521,84	1,57
129	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	603.467.241,28	632.700.951,53	(29.233.710,25)	(4,62)
130	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	527.277.263,32	480.437.031,24	46.840.232,08	9,75
131	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.248.951,62	6.248.951,61	0,01	0,00
132	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
133	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
134	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
135	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
136	Beban Penyusutan Aset Konsepsi Jasa	-	-	-	-
137	Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
138	Jumlah Beban Operasional	43.450.485.536,81	34.031.399.479,76	9.419.086.057,05	27,68
139					
140					
141	BEBAN TRANSFER				
142	Beban Bagi Hasil	-	-	-	-
143	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	-
144	Beban Bagi Hasil Retribusi DaerahKabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	-	-	-
145	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
146	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-
147	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
148	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
149	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-
150	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	-
151	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	-
152	Jumlah Beban Transfer	-	-	-	-
153					
154	JUMLAH BEBAN	43.450.485.536,81	34.031.399.479,76	9.419.086.057,05	27,68
155					
156	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)	(9.970.431.757,05)	29,84
157					
158	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
159	SURPLUS NON OPERASIONAL				
160	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
161	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
162	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
163	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	-	-	-	-
164	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
165	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	-
166	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	-	-	-	-
167	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-	-
168	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	-	-	-	-
169	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
170	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
171	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
172	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi	-	-	-	-
173	Jumlah Surplus Non Operasional	-	-	-	-
174					
175	DEFISIT NON OPERASIONAL				
176	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
177	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	-	-	-	-
178	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
179	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
180	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
181	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
182	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	-
183	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	-	-	-	-
184	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-	-
185	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
186	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
187	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
188	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	-	-	-	-
189	Jumlah Defisit Non Operasional	-	-	-	-
190					
191	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
192					
193	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)	(9.970.431.757,05)	29,84
194					
195	POS LUAR BIASA				
196	BEBAN LUAR BIASA				
197	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
198	Beban Tidak Terduga	-	-	-	-
199	Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-	-
200	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
201					
202	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	-
203					
204	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)	(9.970.431.757,05)	29,84

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024

NO	URAIAN	2024	2023
1	Ekuitas Awal	31.465.541.676,11	31.227.826.485,87
2	Surplus/Defisit-LO	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)
3	RK PPKD	49.518.309.822,00	33.655.380.470,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	-
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	976.747.000,00	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	976.747.000,00	
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(976.747.000,00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(976.747.000,00)	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Pemanfaatan		
4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi		
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Aset Lainnya		
4.13	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Pendapatan Diterima Dimuka		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Pendapatan Diterima Dimuka		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Pegawai		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Pegawai		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Barang dan Jasa		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa		
4.14	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain		
5	Ekuitas Akhir	37.595.754.461,30	31.465.541.676,11

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ARPU
DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, M.Si
NIP. 19720502 199903 1 008



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 1

PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

1.1.1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa setiap unit pemerintahan adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan atas transaksi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN.

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hal-hal yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi mengenai belanja, transfer, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan sebagai berikut :

a) Laporan Realisasi Anggaran. (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b) Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, Ekuitas dana.

c) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terserminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d) Laporan Arus Kas. (LAK)

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

f) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis, setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang – Undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtiar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan –kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Negara
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng No. 120 tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/0016722 tahun 2023 tanggal 24 November 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diterbitkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Disusul keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dilanjutkan dengan ditetapkan nya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua l pada Pemerintah Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas catatan Laporan keuangan

BAB 2.EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB 3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB 4. KEBIJAKAN AKUNTASI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD.
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi Pemerintah pada OPD.

BAB 5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

- 5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Penjelasan Pos – pos Pendapatan
 - 5.1.2. Penjelasan Pos – pos Belanja
 - 5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2. Penjelasan Pos – Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan - LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB 6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 7. PENUTUP.

Lampiran Tambahan



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Dinamika ekonomi dunia yang berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya ketegangan geopolitik memperburuk prospek ekonomi serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini ditandai dengan mengemukanya 5 (lima) tantangan yang secara umum telah menurunkan prospek perekonomian dunia, meningkatkan divergensi investasi dan perdagangan antara Negara maju dan Negara berkembang, serta mendorong makin tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Berbagai tantangan tersebut menuntut penguatan kerjasama internasional baik skala multilateral maupun regional untuk memitigasi risiko sedini mungkin dampak rambatannya pada ketahanan perekonomian dan memperkuat pemulihan ekonomi global.

Perekonomian global terus menunjukkan pemulihan dengan tetap tumbuh positif meskipun melambat. Inflasi juga sudah berada dalam level moderat. Aktivitas manufaktur dunia yang tercermin dari Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur global berada dalam level ekspansif sejak awal 2024. Namun, beragam risiko dan ketidakpastian masih perlu diwaspadai. Sepanjang awal 2024, gejala perekonomian global tampak meningkat. Eskalasi ketegangan geopolitik mengganggu rantai pasok komoditas. Fragmentasi ekonomi menyebabkan negara produsen cenderung melakukan proteksi dan membatasi ekspor sehingga arus perdagangan internasional terhambat. Pembatasan ekonomi yang terjadi berpotensi meningkatkan harga komoditas global yang memicu inflasi. Inflasi yang tinggi menyebabkan suku bunga ditahan pada level yang masih tinggi. Di samping itu, ketahanan pangan terancam seiring perubahan iklim akibat El Nino. Dengan risiko dan ketidakpastian ini, IMF memproyeksikan perekonomian global stagnan di level 3,2 persen hingga 2025 mendatang (Badan Kebijakan Fiskal 2024). Ekonomi global diproyeksikan tumbuh stagnan seiring inflasi yang semakin melandai. Inflasi melambat karena harga energi dan barang yang melandai. Ekonomi negara maju diproyeksikan menguat dengan didukung perekonomian Amerika Serikat dan Eropa yang semakin pulih dan tangguh. Sementara negara berkembang diperkirakan sedikit melambat akibat ekonomi tumbuh moderat di Tiongkok, India, dan negara-negara berkembang Eropa. Krisis properti yang terjadi di Tiongkok berimbas pada perekonomian domestik dan keuangan global. Hal ini karena sepertiga ekonomi Tiongkok diperoleh dari sektor properti. Sebagai salah satu pasar ekspor impor internasional, pembatasan ekspor yang diberlakukan Tiongkok dapat mendorong inflasi barang (IMF 2024).

Ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah dinamika perekonomian global dengan tumbuh di level lima persen. Meskipun melambat, pertumbuhan yang tercipta diiringi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran pada Agustus 2023 turun 0,54 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Pada Februari 2024, tingkat pengangguran bahkan sudah di bawah lima persen. Proporsi pekerja formal juga menunjukkan tren yang terus naik. Hal ini menunjukkan pertumbuhan mampu

menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dengan peningkatan akses ke pekerjaan formal. Pekerjaan formal umumnya memberikan pendapatan dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerjanya dibanding informal. Pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan disebutkan dalam Trickle Down Effect. Teori Trickle Down Effect menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan ketika diiringi penciptaan lapangan kerja (Arestis et al., 2007). Saat terjadi tetesan ke bawah atau aliran pendapatan dari penduduk berpendapatan tinggi ke penduduk berpendapatan rendah maka tercipta peluang kerja dan peluang ekonomi. Hal ini diharapkan mampu menciptakan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengangkat penduduk berpendapatan rendah dari jerat kemiskinan. Ekonomi nasional pada 2023 tumbuh ditopang permintaan domestik yang masih kuat dari konsumsi dan investasi. Konsumsi LNPRT tumbuh hampir sepuluh persen pada 2023 dibanding 2022 dengan adanya peningkatan aktivitas terkait pemilu. Investasi tumbuh positif didorong percepatan penyelesaian proyek infrastruktur dan konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ekspor jasa juga meningkat seiring pariwisata yang kembali bangkit (ADB 2024). Dari sisi lapangan usaha, ekonomi nasional utamanya ditopang sektor Industri, Perdagangan, dan Pertanian. Ketiga sektor ini berkontribusi sekitar 45 persen terhadap total PDB. Saat sebagian besar lapangan usaha pertumbuhannya melambat, Pertambangan dan Konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini karena pemerintah sedang gencar melakukan percepatan pembangunan IKN dan hilirisasi industri (ADB 2024). Sektor Transportasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada 2023 seiring kenaikan jumlah wisatawan. Bahkan jumlah penumpang lalu lintas penerbangan internasional naik hingga dua kali lipat dibanding tahun 2022. Dinamika perekonomian global perlu dihadapi dengan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan, serta suportif dalam mendukung program pembangunan. Pada triwulan I dan II 2024, ekonomi nasional masih mampu tumbuh solid di level lima persen. Permintaan domestik yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2024 (yoy) tumbuh hingga dua digit. Konsumsi LNPRT melonjak didorong peningkatan aktivitas terkait pemilu. Belanja pemerintah mengalami kenaikan akibat belanja pegawai dengan adanya kenaikan gaji ASN dan pemberian THR, serta belanja terkait pemilu. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan utamanya ditopang pertambangan dan akomodasi. Sektor pertambangan tumbuh seiring produksi dan ekspor bijih logam terutama tembaga yang meningkat. Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum tumbuh seiring kenaikan jumlah wisatawan. Secara regional, ekonomi nasional mampu tumbuh dengan baik berkat dorongan pertumbuhan positif dari seluruh provinsi. Sektor keuangan domestik masih dalam bayang-bayang gejolak pasar keuangan global. Pasar saham mengalami tekanan, tercermin dari IHSG yang melemah hingga triwulan II 2024. Hal ini sebagai dampak ketidakpastian ekonomi dan arah

kebijakan moneter negara maju. Pemerintah juga menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang melemah. PMI Manufaktur Indonesia berhasil mempertahankan capaiannya dengan berada di level ekspansif selama 34 bulan berturut-turut hingga Juni 2024. Ini menandakan kepercayaan investor yang masih tangguh terhadap sektor industri pengolahan di Indonesia. Industri pengolahan merupakan kontributor utama perekonomian nasional, sehingga pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor ini khususnya untuk komoditas berbasis ekspor (Badan Kebijakan Fiskal 2024). Investasi mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I dan II 2024, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini mengindikasikan kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia masih cukup tinggi. Hilirisasi yang semakin meningkat dan stabilitas yang terjaga menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal 2024). Neraca perdagangan luar negeri masih mencatatkan surplus. Tren surplus hingga Juni 2024 sudah bertahan selama 50 bulan berturut-turut. Namun menjelang akhir triwulan II 2024, trennya mulai melambat. Pariwisata tumbuh kuat seiring mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Jumlah kunjungan wisatawan naik signifikan, disertai kenaikan sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, juga transportasi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran lima persen pada 2024. Bank Indonesia dan IMF memproyeksikan ada sedikit peningkatan pertumbuhan pada 2025, sementara proyeksi ADB tetap stagnan. Konsumsi swasta, pembangunan infrastruktur, dan investasi yang tetap kuat menjadi penopang pertumbuhan tetap konsisten.

Dalam periode 2025-2027, pemerintah melalui PMK No. 31 tahun 2024 menetapkan sasaran inflasi berada dalam rentang 2,5 persen dengan deviasi 1 persen. Inflasi dijaga agar tetap stabil dan rendah dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi (Badan Kebijakan Fiskal 2024). Laju inflasi masih terkendali, namun berbagai langkah dan upaya perlu dilakukan sebagai mitigasi risiko gejolak harga ke depan seperti menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan distribusi berjalan lancar. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian dari berbagai gejolak sosial ekonomi di tingkat nasional maupun global juga perlu dioptimalkan. Indonesia bersiap menghadapi tantangan eksternal dan internal yang akan menekan perekonomian tahun ini. Beberapa diantaranya yaitu penyelenggaraan pemilu 2024 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan politik sehingga memengaruhi keputusan investasi dan konsumsi masyarakat, harga pangan dan energi global yang naik memicu inflasi meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat, defisit anggaran pemerintah, dan pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain dengan bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat miskin, menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah tetap stabil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yaitu revitalisasi mesin konvensional, pelatihan vokasi,

pembangunan infrastruktur, Proyek Strategis Nasional (PSN), Mass Rapid Transit (MRT), kereta cepat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penguatan ketahanan pangan (Kemenko Perekonomian 2024). Pasokan tenaga kerja sebagai subyek pembangunan perlu dimaksimalkan. Sayangnya, rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dari tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial ekonomi. Pertama, meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh anak, seperti melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, perlu penyesuaian keterampilan dan pendidikan mengikuti perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja agar nantinya mereka yang terjun dalam angkatan kerja mampu terserap. Kedua, meningkatkan akses kesehatan sehingga tercapai kesejahteraan fisik. Fisik yang sehat dan kuat dibutuhkan tenaga kerja untuk mencapai output yang maksimal. Keberadaan akses dan jaminan kesehatan penting sebagai upaya perlindungan pekerja selama menjalankan pekerjaannya. Ketiga, program perlindungan sosial yang tepat guna dan sasaran bagi seluruh masyarakat miskin. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan data masyarakat miskin secara berkala (ADB 2024). (*Bank Indonesia : laporan Perekonomian Indonesia 2023*)

Perekonomian Jawa Tengah berhasil tumbuh 4,95 persen sepanjang tahun 2024, Capaian itu melambat dibandingkan capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat capaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 jika dilihat secara kumulatif 4,95 persen lebih rendah dari nasional yaitu 5,03 persen. Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih menyebut bila Ekonomi Jawa Tengah memang melambat jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, tapi catatannya seluruh lapangan usaha tumbuh positif di 2024 dan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Jawa Tengah yakni industri pengolahan sebesar 33,84 persen. Lalu perdagangan 13,49 persen, pertanian 13,03 persen dan konstruksi 11,39 persen. Selain itu lapangan usaha yang mempunyai pertumbuhan tertinggi adalah akomodasi 10,03 persen. Lalu informasi dan komunikasi sebesar 9,56 persen dan jasa perusahaan sebesar 9,15 persen. Kemudian, keempat lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,52 persen. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 4,16 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 1,41 persen dan konstruksi tumbuh sebesar 7,97 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya jasa pendidikan sebesar 8,53 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,37 persen, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,28. Jika dilihat dari PDRB menurut pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,38 persen. Diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 10,74

persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,55 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,01 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 12,00 persen. Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. (*SuaraMerdeka*, 5 Feb 2025)

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yaitu : “Menuju Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera Dan Lestari”. Sedangkan misi sebagai penjabaran visi diatas adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut :

1. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil;
2. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan;
4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting;
5. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
6. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan vokasi;
7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif;
8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi;
9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendukung kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode kepemimpinan Tahun 2024 yaitu pada misi ketiga “Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh

kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring” dan program ke Sembilan dan Sepuluh “Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN)”.

Kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamisasikan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip-prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan Nasional yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan sistem kearsipan di daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan berkewajiban memberdayakan Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan antara lain meningkatkan pelayanan arsip dan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat, Untuk menunjang tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 5 Program dan 24 Kegiatan serta 59 Sub Kegiatan dengan mendapatkan dana APBD sebesar Rp 50.633.003.000,- yang terbagi menjadi Belanja Operasi Rp 43.305.904.000,- dan Belanja Modal Rp 7.327.099.000,- sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024, program kegiatan yang dilaksanakan untuk menjawab permasalahan (Isu strategis) penanganan/pelayanan kearsipan dan perpustakaan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam program-program yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program (Non Urusan)

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 8 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

2. Program (Bidang Perpustakaan)

- Program Pembinaan Perpustakaan yang terdiri dari 8 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan.

3. Program (Bidang Kearsipan)

- Program Pengelolaan Arsip yang terdiri dari 8 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan.



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

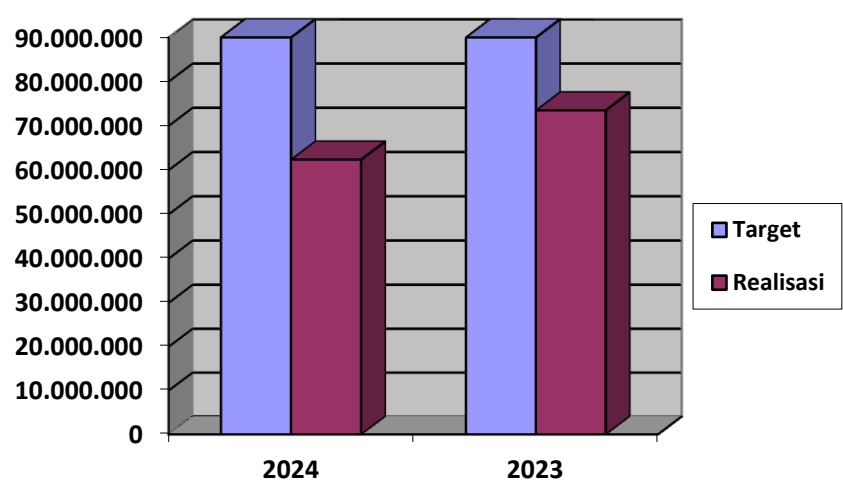
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM.

3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni (DPA) sebesar Rp 90.000.000,- dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 90.000.000,-

Capaian kinerja Penerimaan Asli Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebagai sumber PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Realisasi Penerimaan Pendapatan retribusi selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp 62.388.500,- atau 69,32 % dari target sebesar Rp 90.000.000,- sehingga ada kekurangan target sebesar Rp 27.611.500,- atau 30.68% sedangkan perbandingan Capaian Kinerja Pendapatan tahun anggaran 2024 dengan tahun anggaran 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1. sebagai berikut :

GAMBAR 1.
CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023 (RIBUAN RUPIAH)



Grafik diatas menggambarkan bahwa pendapatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut :

Target pendapatan retribusi setelah perubahan tahun 2023 sebesar Rp 90.000.000,- sedangkan tahun 2024 sebesar Rp 90.000.000,- tidak ada kenaikan target dibandingkan tahun 2023.

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi tahun 2023 sebesar Rp 73.523.500,- sedangkan tahun 2024 sebesar Rp 62.388.500,- sehingga mengalami penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 11.135.000,- atau 15.14% dibandingkan tahun 2023.

Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp 62.388.500,- atau 69.32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan rincian sebagai berikut (lihat tabel 1).

Tabel 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi TA 2024

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000	62.388.500	69,32
a	Sewa Lahan Parkir	24.000.000	17.082.000	71,17
b	Sewa Gedung Kantin	22.620.000	13.620.000	60,21
c	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	-	-	-
d	Bebas Pinjam Peprustakaan	18.000.000	3.843.000	21,35
e	Fotocopy Arsip (mahasiswa)	7.780.000	2.081.500	36,75
f	Fotocopy Arsip (umum)	10.200.000	2.112.000	20,70
g	Reproduksi Arsip Foto	-	-	-
h	Jasa Scan Arsip Pelajar/Mahasiswa	3.000.000	-	-
i	Jasa Scan Arsip Umum	4.400.000	-	-
2	Penerimaan Lain-lain OPD	-		
a	Hasil Sewa BMD		21.000.000	
b	Penerimaan Komisi, Potongan dan bentul lain		2.650.000	
	JUMLAH	90.000.000	62.388.500	69,32
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	90.000.000	62.388.500	69,32

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kurang target yaitu sebesar 69,32% atau Rp 62.388.500,- dari target sebesar Rp 90.000.000,- Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan,antara lain :

- a. Tahun 2024, ada pelaksanaan pembangunan gedung sehingga pengunjung lebih banyak meminjam secara online dan berimbas pada sewa kantin.
- b. Fotocopy arsip sudah tidak banyak pengguna arsip yang memanfaatkan dan pemustaka sudah banyak yang memanfaatkan fasilitas ebook.
- c. Tidak bisa memungut scan dikarenakan di Perda No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah tidak ada jasa scan, dan pada awal Desember di Pergub No 35 tahun 2024 Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah jasa scan sudah dimunculkan, karena di SIPENARI belum ada menu scan maka kami masukkan di pendapatan lain-lain.

3.1.2 CAPAIAN KINERJA BELANJA

Struktur Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 53.162.973.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 50.633.003.000,- berkurang sebesar Rp. 2.529.970.000,- atau 4,76 % Anggaran Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai DPA dan DPPA TA 2024 terdiri dari (Lihat tabel 2) :

Tabel 2
STRUKTUR BELANJA DAERAH
ANGGARAN MURNI DAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	MURNI	PERUBAHAN
1	BELANJA DAERAH	53.162.973.000	50.633.003.000
A	Belanja Operasi	45.462.879.000	43.305.904.000
	Belaja Pegawai (gaji dan tunjangan)	29.420.740.000	27.403.581.000
	Belanja Barang dan Jasa	16.042.139.000	15.902.323.000
B	Belanja Modal	7.700.094.000	7.327.099.000

Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar 97,92 persen yaitu Realisasi Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 49.580.698.322,- dari target yang dianggarkan sebesar Rp 50.633.003.000,- Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ditunjukan dalam tabel 3.

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024

No	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Daerah	50.633.003.000	49.580.698.322	97,92
	Belanja Operasi	43.305.904.000	42.280.665.378	97,63
	Belanja Pegawai	27.403.581.000	26.474.456.108	96,61
	Belanja Barang dan Jasa	15.902.323.000	15.806.209.270	99,40
2	Belanja Modal	7.327.099.000	7.300.032.944	99,63
	Belanja Modal	7.327.099.000	7.300.032.944	99,63
	Jumlah Belanja Daerah	50.633.003.000	49.580.698.322	97,92

Perbandingan capaian kinerja belanja daerah tahun anggaran 2024 dan 2023 sebagai mana ditunjukkan dalam tabel 4.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

NO	Uraian JenisBelanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2024	TA 2023	Rp	%
	Belanja Daerah				
	Belanja Operasi	42.280.665.378	32.967.187.797	9.313.477.581	28,25
	Belanja Pegawai	26.474.456.108	26.314.408.703	160.047.405	0,6
	Belanja Barang dan Jasa	15.806.209.270	6.652.779.094	9.153.430.176	137,59
	Belanja Modal	7.300.032.944	761.716.173	6.538.316.771	858,37
	Belanja Modal	7.300.032.944	761.716.173	6.538.316.771	858,37
	Jumlah	49.580.698.322	33.728.903.970	11.851.794.352	36,21

3.1.3 REALISASI PENCAPAIANTARGETKINERJA BELANJABERDASARKAN SAP
(Standar Akuntansi Pemerintah)

Dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka perlu dilakukan konversi semua realisasi belanja tersebut diatas, sesuai ketentuan SAP untuk itu realisasi belanja dikelompokan sesuai proporsi belanja sebagai mana ditunjukkan dalam tabel 5 dan 6.

Tabel 5
Proporsi Belanja
Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Daerah			
	Belanja Operasional	43.305.904.000	42.280.665.378	97,63
2	Belanja Modal	7.327.099.000	7.300.032.944	99,63
	Jumlah Belanja Daerah	50.633.003.000	49.580.698.322	97,92

Pada gambar tersebut diatas adalah Proporsi Belanja setelah dilakukan konversi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Realisasi Belanja Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp 49.580.698.322 ,-atau 97,92% dari anggaran sebesar Rp 50.633.003.000,- realisasi belanja terdiri dari: Belanja Operasional sebesar Rp 42.280.665.378,- atau 97,63%, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 7.300.032.944,- atau 97,92 persen.

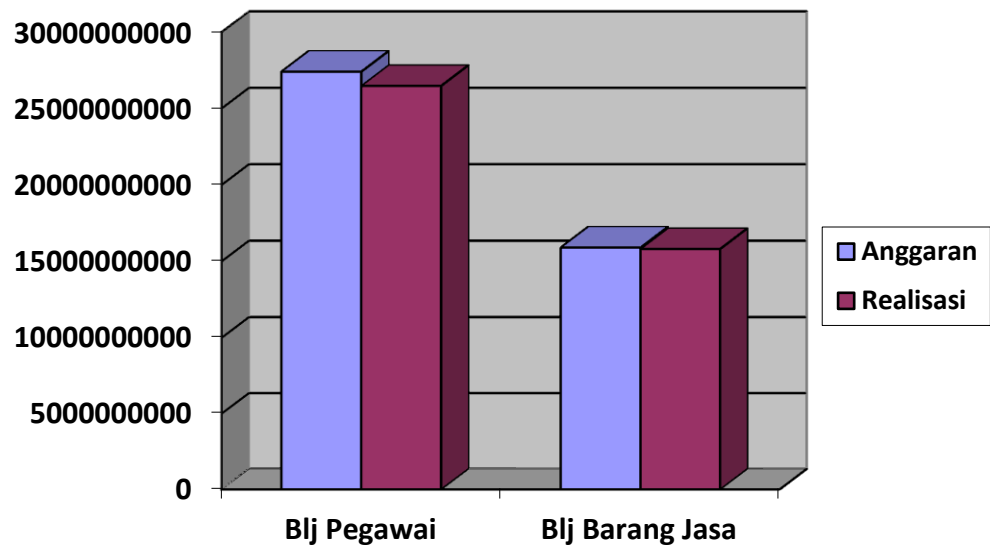
3.1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Operasional.

Tabel 6
Proporsi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Operasional			
	Belanja Pegawai	27.403.581.000	26.474.456.108	96,61
	Belanja Barang dan Jasa	15.902.323.000	15.806.209.270	99,40
	Jumlah Belanja Operasional	43.305.904.000	42.280.665.378	97,63

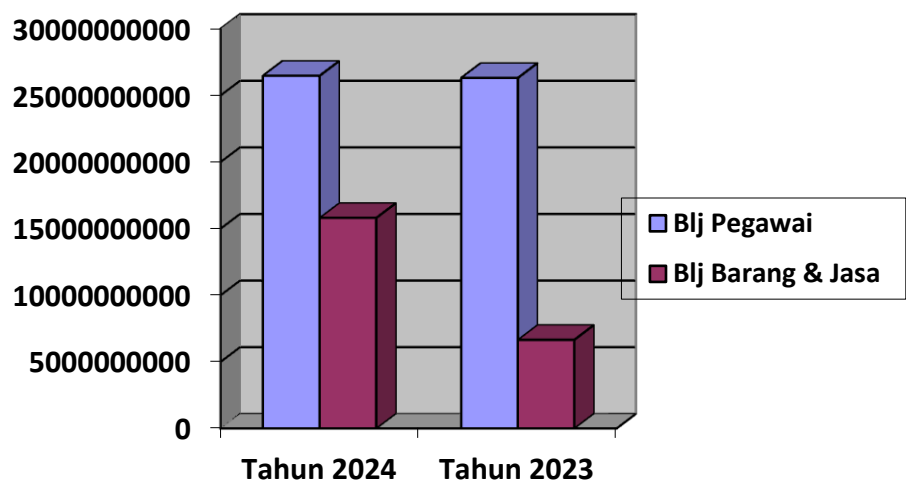
Realisasi Belanja Operasional tahun 2024 adalah sebesar Rp 42.280.665.378,- atau 97,63% dengan rincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp 26.474.456.108,- atau 96,61%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 15.806.209.270,- atau 97,63%,
Capaian Kinerja Belanja Operasional tahun anggaran 2024 dapat kami Gambarkan grafik dibawah ini (Gambar 2)

GAMBAR 2
PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
(DALAM RIBUAN RUPIAH)



Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Operasional Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Gambar Grafik dibawah ini (Gambar 3).

GAMBAR 3
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL
TA 2024 DAN TA 2023
(DALAM RIBUAN RUPIAH)



Gambar 3 Adalah Perbandingan kinerja belanja operasional Tahun Anggaran 2024 dan 2023 ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 26.314.408.703,- dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 26.474.456.108,- ada **Kenaikan** sebesar Rp 160.047.405,- atau 0,6%.

- b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.652.779.094,- dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 15.806.209.270,- ada **Kenaikan** sebesar Rp 9.153.430.176,- atau 137,59%.

3.1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Modal.

Tabel 7
Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2024

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	722.175.000	713.258.000	98,77
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.668.971.000	5.667.437.999	99,97
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	935.953.000	919.336.945	98,22
	Jumlah	7.327.099.000	7.300.032.944	99,63

Tabel diatas menggambarkan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 Realisasi sebesar Rp 7.300.032.944,- atau 99,63% dari Anggaran sebesar Rp 7.327.099.000,- sedangkan untuk masing-masing capaian kinerja belanja modal yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi sebesar Rp 713.258.000,- atau 98,77% dari Anggaran sebesar Rp 722.175.000,-
- b. Capaian Kinerja Belanja Gedung dan Bangunan Realisasi sebesar Rp 5.667.437.999,- atau 99,97% dari Anggaran sebesar Rp 5.668.971.000,-
- c. Capaian Kinerja Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi sebesar Rp 919.336.945,- atau 98,22% dari Anggaran sebesar Rp 935.953.000,-

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal TA2023 dan 2024

NO	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2024	TA 2023	Rp	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	713.258.000	335.123.000	378.135.000	112,83
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.667.437.999	-	5.667.437.999	100
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	919.336.945	426.593.173	492.743.772	115,51
	Jumlah	7.300.032.944	761.716.173	6.538.316.771	858,37

Tabel 8 adalah Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024 ada **Kenaikan** sebesar 112,83% atau sebesar Rp 378.135.000,-
- b. Capaian Kinerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024 ada **Kenaikan** sebesar 100% atau sebesar Rp 5.667.437.999,-.
- c. Capaian Kinerja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024 ada **Kenaikan** sebesar 115,51% atau sebesar Rp 492.743.772,-.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja OPD dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1. Tahun 2024, ada pelaksanaan pembangunan gedung sehingga pengunjung lebih banyak meminjam secara online dan berimbas pada sewa kantin.
- 2. Fotocopy arsip sudah tidak banyak pengguna arsip yang memanfaatkan dan pemustaka sudah banyak yang memanfaatkan fasilitas ebook.
- 3. Tidak bisa memungut scan dikarenakan di Perda No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah tidak ada jasa scan, dan pada awal Desember di Pergub No 35 tahun 2024 Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah jasa scan sudah dimunculkan, karena di SIPENARI belum ada menu scan maka kami masukkan di pendapatan lain-lain.

Ikhtisar realisasi capaian target program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 50.633.003.000,- realisasi Rp 49.580.698.322,- atau 97,92 persen yang terdiri dari 8 program, 24 kegiatan dan 58 sub kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 9 :

TABEL 9
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Fungsi : Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Fungsi : Urusan Wajib
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah		Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤96%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH	50.633.003.000	49.580.698.322	100	97.92	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.782.796.000	31.806.111.225	100	97.02	
	Sekretariat – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.782.796.000	31.806.111.225	100	97.02	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166.048.000	165.591.100	100	99.72	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.440.000	126.128.100	100	99.75	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.608.000	39.463.000	100	99.63	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.418.831.000	26.489.697.708	100	96.61	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.177.151.000	26.251.776.108	100	96.6	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241.680.000	237.921.600	100	98.44	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83.500.000	83.326.460	100	99.79	
3.1	Penamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.500.000	78.372.460	100	99.84	
3.2	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.954.000	100	99.08	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.420.000	97.144.000	100	95.78	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86.420.000	82.147.000	100	95.06	
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	4.997.000	100	99.94	
4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	10.000.000	100	100	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	897.137.000	895.917.580	100	99.86	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.605.000	100	98.68	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.957.000	34.646.500	100	99.11	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.925.000	100	98.5	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.000.000	155.000.000	100	100	
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	100	100	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	8.968.000	100	99.64	
5.7	Penyediaan Bahan/Material	78.000.000	77.913.050	100	99.89	
5.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	175.000.000	174.965.050	100	99.98	
5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.180.000	354.944.980	100	99.93	
5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100	100	
5.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	19.950.000	100	99.75	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	308.075.000	302.438.000	100	98.17	
6.1	Pengadaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100	100	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.075.000	292.438.000	100	98.11	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3.170.460.000	3.150.060.038	100	99.36	

	Daerah					
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.994.170	100	99.92	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.157.600.000	1.151.943.459	100	99.51	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	100	100	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.999.860.000	1.985.131.409	100	99.26	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.325.000	621.936.339	100	97.59	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	51.495.425	100	93.63	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.000.000	94.577.800	100	95.53	
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.245.000	85.375.000	100	98.99	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209.754.000	204.662.114	100	97.57	
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.326.000	185.826.000	100	99.2	
B	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	237.549.000	235.745.989	100	99.24	
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	237.549.000	235.745.989	100	99.24	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	127.468.000	125.665.519	100	98.59	
1.1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	127.468.000	125.665.519	100	98.59	
2	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	110.081.000	110.080.470	100	100	
2.1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	110.081.000	110.080.470	100	100	
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	290.693.000	290.121.750	100	99.8	
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	391.391.000	389.760.142	100	99.58	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	24.690.000	24.468.000	100	99.1	
1.1	Penyusutan Arsip Dinamis	24.690.000	24.468.000	100	99.1	
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	266.003.000	265.653.750	100	99.87	
2.1	Akuisisi Arsip Statis	266.003.000	265.653.750	100	98.87	
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	100.698.000	99.638.392	100	98.95	
1	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 tahun	49.496.000	49.038.000	100	99.07	
1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	49.496.000	49.038.000	100	99.07	
2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Berskala Provinsi	29.419.000	29.297.400	100	99.59	
2.1	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	29.419.000	29.297.400	100	99.59	
3	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	21.783.000	21.302.992	100	97.8	
3.1	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	21.783.000	21.302.992	100	97.8	
E	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	252.551.000	252.248.400	100	99.88	
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	252.551.000	252.248.400	100	99.88	
1	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	252.551.000	252.248.400	100	99.88	
1.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	56.924.000	56.688.000	100	99.59	
1.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Daerah Provinsi	195.627.000	195.560.400	100	99.95	
F	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	9.319.418.000	9.295.858.072	100	99.75	
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	9.319.418.000	9.295.858.072	100	99.75	

1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	9.190.036.000	9.166.666.932	100	99.75	
1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	9.055.088.000	9.031.739.913	100	99.74	
1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	29.726.000	29.720.500	100	99.98	
1.3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	70.356.000	70.344.019	100	99.98	
1.4	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	34.866.000	34.862.500	100	99.99	
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	129.382.000	129.191.140	100	99.85	
2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	62.221.000	62.115.140	100	99.83	
2.2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	27.593.000	27.553.000	100	99.86	
2.3	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	39.568.000	39.523.000	100	99.89	
G	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7.423.709.000	7.376.099.319	100	99.36	
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	7.649.298.000	7.600.974.494	100	99.37	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	922.146.000	900.233.620	100	97.62	
1.1	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	39.619.000	39.574.300	100	99.89	
1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	773.527.000	761.147.820	100	98.4	
1.3	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	109.000.000	99.511.500	100	91.29	
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	6.501.563.000	6.475.865.699	100	99.6	
2.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	6.472.203.000	6.446.505.699	100	99.6	
2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	29.360.000	29.360.000	100	100	
H	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	225.589.000	224.875.175	100	99.68	
1	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	98.467.000	98.457.000	100	99.99	
1.1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	22.817.000	22.807.000	100	99.96	
1.2	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	75.650.000	75.650.000	100	100	
2	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	50.114.000	49.461.000	100	98.7	
2.1	Penerbitan Katalog Induk Daerah	38.344.000	37.691.000	100	98.3	
2.2	Penerbitan Bibliografi Daerah	11.770.000	11.770.000	100	100	
3	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	41.533.000	41.505.600	100	99.93	
3.1	Pengembangan, Pengolahan dan Penalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	41.533.000	41.505.600	100	99.93	
4	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	35.475.000	34.451.575	100	99.93	
4.1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	23.473.000	23.461.675	100	99.95	
4.2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	12.002.000	11.989.900	100	99.9	
		50.633.003.000	49.580.698.322	100	97.92	



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD adalah laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), peraturan ini berlaku untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas.

4.1. ENTITAS AKUNTASI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, Catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 menggunakan basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas. Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi (OPD) terdiri dari: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. Pengertian Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara OPD,

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah,

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehan,

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh OPD terdiri dari :

- a. Kas di kas daerah
Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal
- b. Kas di bendahara pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas PK yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/ pemegang kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal.
- c. Kas di bendahara penerimaan
Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggungjawab dikelola oleh bendahara penerimaan, Kas di bendahara penerimaan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal. Kas di bendahara penerimaan berasal dari seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya baik penerimaan Kas, Transfer maupun Surat berharga

2. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat :

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah

3. Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4. Penyajian dan Pengungkapan.

Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK

Saldo Kas dari pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai kas dan setara kas lainnya dengan akun lawannya pendapatan ditangguhkan pada tahun anggaran berjalan (TAB). Dalam hal pengembalian belanja disetorkan pada tahun anggaran berikutnya maka OPD mencatat Pendapatan Lain-lain LRA atau Pendapatan Lain-lain LO.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang

1. Investasi Jangka Pendek

a. Pengertian Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerima hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang, dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

c. Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan, (Harga transaksi investasi di tambah biaya-biaya lain-lain yang berkaitan/timbul dalam rangka perolehan tersebut). Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut dan apabila dalam bentuk mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

d. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di Neraca, sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.

2. Investasi Jangka Panjang.

a. Pengertian Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :

1. Investasi Permanen.

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali tapi untuk mendapatkan dividen/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah dan badan lainnya.

2. Investasi Non Permanen.

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria mempunyai manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

c. Pengukuran

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah :

Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukun yang terkait.

Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Metode Nilai bersih yang dapat direalisasikan, metode ini diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir

d. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada Neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurangan investasi jangka panjang non permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui

sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada Neraca.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. Pengertian Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis-jenis piutang adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Pendapatan,
- b. Belanja dibayar dimuka,
- c. Bagian lancar piutang jangka panjang,
- d. Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), dan
- e. Piutang Lainnya.

2. Pengakuan

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintah dan kerugian daerah serta transaksi lainnya. Secara umum pengakuan piutang harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria ; telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan, dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

4. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan pada pos aset lancar di Neraca menurut jenis-jenis piutang, penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam Neraca dan sebagai pengurangan atas jumlah piutang.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Pengertian Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan sifat pemakaiannya barang persediaan dapat terdiri dari :

- a. Bahan habis pakai;
- b. Bahan/Material.

2. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim

dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik, inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya perolehan persediaan meliputi : Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : Potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa

- a. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- b. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya, persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian Aset Lancar.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP.

1. Pengertian Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

2. Jenis-jenis Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut :

- a. Tanah.
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- b. Peralatan dan Mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan(memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan,Irigasi dan Jaringan.

Mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

e. Aset Tetap Lainnya.

Mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam katagori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Pengakuan.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah.

4. Pengukuran

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Komponen biaya perolehan
- b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan
- c. Kontruksi dalam pengerjaan
- d. Perolehan secara gabungan
- e. Pertukaran
- f. Penyusutan
- g. Penghentian dan pelepasan
- h. Penilaian kembali
- i. Penyusunan Neraca awal

5. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

2. Pengakuan.

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari Kas ke Dana Cadangan.

3. Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambahan Dana Cadangan.

4. Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK . Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut hal ini perlu diungkapkan dalam CaLK.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain :

1. Aset tak berwujud,
2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
4. Kas yang dibatasi penggunaanya; dan
5. Aset lain-lain.

1. ASET TAK BERWUJUD..

a. Pengertian Aset tak berwujud

Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- Aset non moneter yang dapat diidentifikasi,
- Dikendalikan oleh entitas pemerintah dan,
- Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan,

b. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :

- 1) definisi dari aset tak berwujud; dan
- 2) kriteria pengakuan,

Sesuatu dapat diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang dimiliki masa manfaat tak terbatas. Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus, metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama (rumus Nilai yang dapat disusutkan dibagi Masa manfaat)

d. Penghentian dan Pelepasan

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya, beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum penghentian aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan Keuangan atas aset tak berwujud antara lain sebagai berikut :

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tak berwujud; dan
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud.

2. TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

a. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

b. Pengakuan,

Tagihan tuntutan ganti rugi diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

c. Pengukuran

Tagihan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

d. Pengungkapan

Tagihan tuntutan ganti rugi disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam CaLK.

3. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

a. Aset Kemitraan/Kerjasama

Aset kemitraan/kerjasama adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kemitraan/kerjasama. Masa kemitraan/kerjasama adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kemitraan/kerjasama.

b. Pengakuan

Aset kemitraan/kerjasama diakui pada saat terjadi perjanjian kemitraan/kerjasama, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan/kerjasama, setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kemitraan/kerjasama ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

c. Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan/kerjasama harus dicatat sebagai aset kemitraan/kerjasama sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset kemitraan/kerjasama disajikan dalam Neraca sebagai aset lainnya. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam Neraca dalam klasifikasi aset tetap.

4. ASET LAIN-LAIN

a. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

b. Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan didalam kelompok asset lainnya dan diungkapkan secara memadai didalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis asset tetap yang dihentikan penggunaanya, dan informasi lainnya yang relevan.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Pengertian Kewajiban Jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan jenis-jenis kewajiban jangka pendek terdiri dari :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran BPJS, Taspen dan Taperum.

2) Utang Bunga

Adalah kewajiban pemerintah atas beban bunga utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.

3) Bagian Lancar Utang Jangka panjang

Adalah bagian dari utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

4) Pendapatan Diterima di Muka

Adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/Jasa kepada pihak ketiga.

5) Utang Beban

Adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Adalah utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.

b. Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam Neraca dan CaLK.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Utang jangka panjang pemerintah harus diungkapkan dalam Neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam Neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi :

- Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberian pinjaman;
- Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan perubahan Ekuitas, dan CaLK.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN.

1. PENDAPATAN – LO

a. Pendapat LO dan Pengakuan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

b. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompilasikan dengan pengeluaran).

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
- 2) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila Realisasi pendapatan-LO dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
- 3) Disamping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk darai pendapatan.

2. PENDAPATAN-LRA

a. Pengertian Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima direkening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapat BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada LRA dan LAK.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah, apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

K. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA DAN TRANSFER

1. BEBAN.

a. Pengertian Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan dan Pengukuran

1) Beban Operasional

a) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b) Beban Barang dan Jasa

(1). Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurangan beban persediaan.

(2). Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3). Beban Bunga Hutang

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah daerah untuk membayar bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah. Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(4). Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(5). Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban hibah tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

(6). Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan social dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan social berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban bantuan social tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

(7). Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

(8). Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan

(9). Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu :

a. Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b. Metode Penghapusan Langsung

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan :

a. Metode Penyisihan Piutang

Beban piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b. Metode Penghapusan Langsung

Beban piutang tak tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali

2) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

c. Penyajian dan Pengukuran

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

2. BELANJA

a. Pengertian Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Pengakuan dan Pengukuran Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan bendahara umum daerah.

Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) oleh BUD. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan asas bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah;
- 2) LAK masuk katagori aktivitas operasional;
- 3) LAK masuk katagori aktivitas investasi; dan
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

3. TRANSFER.

a. Pengertian Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain bagi Hasil Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

b. Pengakuan dan Pengukuran Transfer

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Transfer

Transfer keluar disajikan sebagai berikut :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah,
- 2) LAK yang dimasukan dalam katagori Arus Kas Keluar dari aktivitas operasional; dan
- 3) CaLK

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN (PENERIMAAN/PENGELUARAN)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Jenis-jenis Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dan cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3. Pengakuan

Penerimaan pembayaran diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

4. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA, LAK serta diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain :

- a. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- b. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan; dan
- c. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah :

1. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LO atau akun beban.

4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.
5. Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun asset bersangkutan.
6. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas,, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
8. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
11. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
12. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA OPD

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provisi Jawa Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Kebijakan akuntansi didasarkan pada :

1. Kerangka Konseptual akuntansi pemerintah, Pernyataan Standarisasi Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP),
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan,

Penerapan Kebijakan Akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk entitas akuntansi terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO),
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024. Anggaran dan realisasi APBD TA 2024 adalah sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp 62.388.500,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 62.388.500,-atau 69,32%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 73.523.500,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 11.135.000 atau 15,14 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Asli daerah	90.000.000	62.388.500	69,32	73.523.500	11.135.000
2 Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-	-
Jumlah	90.000.000	62.388.500	69,32	73.523.500	11.135.500

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp 62.388.500,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp 62.388.500,- atau 69,32%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp73.523.500,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 11.135.000 atau 15,14 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2 Pendapatan Retribusi Daerah	90.000.000	38.738.500	43,04	70.773.500	(32.035.000)
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	23.650.000	100	2.750.000	20.900.000
Jumlah	90.000.000	62.388.500	69,32	73.523.500	(11.135.500)

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi DaerahRp 38.738.500,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 38.738.500,- atau 43,04 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 70.773.500,-mengalami **penurunan** sebesar Rp 32.035.000,- atau 45,29%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
2 Retribusi Jasa Usaha	90.000.000	38.738.500	43,04	70.773.500	32.035.000
3 Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
Jumlah	90.000.000	38.738.500	43,04	70.773.500	32.035.000

5.1.1.1.1.1Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp 38.738.500,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 38.738.500,- atau 43,04 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 70.773.500,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 32.035.000,- atau 45,29% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000	38.738.500	43,04	70.773.500	(32.035.000)
2 Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-
3 Retribusi Terminal	-	-	-	-	-
4 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	-	-	-	-	-
5 Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-
6 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	-	-	-	-
7 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	-	-
8 Retribusi Penyeberangan di Air	-	-	-	-	-
9 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-
Jumlah	90.000.000	38.738.500	43,04	70.773.500	(32.035.000)

5.1.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 38.738.500,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 38.738.500,- atau 43,04 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 70.773.500,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 32.035.000,- atau 45,29 % dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	46.620.000	30.702.000	65,86	-	30.702.000
2 Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-	24.000.000	(24.000.000)
3 Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-	-
4 Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	-	-	-
5 Retribusi Pemakaian Ruangan	-	-	-	22.620.000	(22.620.000)
5 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
6 Retribusi Pemakaian Alat	43.380.000	8.036.500	18,53	24.153.500	(16.117.000)
Jumlah	90.000.000	38.738.500	43,04	70.773.500	(32.035.000)

5.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 23.650.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar *Nihil* dengan realisasi sebesar Rp 23.650.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 2.750.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 20.900.000,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	-	21.000.000	100	-	21.000.000
2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
4 Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-
5 Jasa Giro	-	-	-	-	-
6 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
7 Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-
8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-	-
9 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	2.650.000	100	2.750.000	(100.000)
10 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-	-
13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-	-
15 Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-
16 Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-
17 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-
19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-	-
21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	-
22 Pendapatan Zakat	-	-	-	-	-
23 Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa	-	-	-	-	-
24 Pendapatan Lain-Lain SKPKD	-	-	-	-	-
Jumlah	-	23.035.000	100	2.750.000	20.900.000

5.1.1.2.1 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp 21.000.000,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar *Nihil* dengan realisasi sebesar Rp 21.000.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar *Nihil* mengalami **kenaikan** sebesar Rp 21.000.000,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	21.000.000	100	-	21.000.000
Jumlah	-	21.000.000	100	-	21.000.000

5.1.1.2.2 **Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp 2.650.000,00**

Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ditargetkan sebesar *Nihil* dengan realisasi sebesar Rp 2.650.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 2.750.000,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 100.000,- atau 3,64% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	2.650.000	100	2.750.000	(100.000)
Jumlah	-	2.750.000	100	2.750.000	(100.000)

5.1.2 **BELANJA DAERAH Rp 49.580.698.322,00**

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 50.633.003.000,- dengan realisasi sebesar Rp 49.580.698.322,- atau 97,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 33.728.903.970,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 15.851.794.352 atau 47% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Operasional	43.305.904.000	42.280.665.378	97,63	32.967.187.797	9.313.477.581
2 Belanja Modal	7.327.099.000	7.300.032.944	99,63	761.716.173	6.538.316.771
3 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
4 Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Jumlah	50.633.003.000	49.580.698.322	97,92	33.728.903.97	15.851.794.352

5.1.2.1 **BELANJA OPERASIONAL Rp 42.280.665.378,00**

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp 43.305.904.000,- denganrealisasi sebesar Rp 42.280.665.378,- atau 97,92 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 32.967.187.797,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 9.313.477.581,- atau 28,25% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Pegawai	27.403.581.000	26.474.456.108	96,61	26.314.408.703	160.047.405
2 Belanja Barang dan Jasa	15.902.323.000	15.806.209.270	99,40	6.652.779.094	9.153.430.176
3 Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5 Belanja Hibah	-	-	-	-	-
6 Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
Jumlah	43.305.904.000	42.280.665.378	97,92	32.967.187.797	9.313.477.581

5.1.2.1.1 **Belanja Pegawai Rp 26.474.456.108,00**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar 27.403.581.000,- dengan realisasi sebesar Rp 26.474.456.108,-atau 96,61 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.314.408.703,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp160.047.405,- atau 0,61% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.927.078.000	12.260.435.558	94,84	12.289.742.954	(29.307.396)
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14.250.073.000	13.991.340.550	98,18	13.818.115.749	173.224.801
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	226.430.000	222.680.000	98,34	206.550.000	(16.130.000)
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
7 Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-
8 Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-
Jumlah	27.403.581.000	26.474.456.108	96,61	26.314.408.703	160.047.405

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 12.260.435.558,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp 12.927.078.000,- dengan realisasi sebesar Rp 12.260.435.558,- atau 94,84%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 12.289.742.954,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 29.307.396,- atau 0,24% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Gaji Pokok ASN	8.994.804.000	8.794.891.770	97,78	8.738.135.200	56.756.570
2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	887.292.000	816.289.820	92	799.662.322	16.627.498
3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.380.000	140.000.000	89,53	128.260.000	11.740.000
4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.112.972.000	1.037.112.000	93,18	1.150.132.000	(113.020.000)
5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	140.840.000	136.685.000	97,05	149.360.000	(12.675.000)
6 Belanja Tunjangan Beras ASN	436.540.000	409.752.360	93,86	440.965.380	(31.213.020)
7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	203.200.000	108.583.924	53,44	91.149.354	17.434.570
8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	130.000	103.655	79,73	110.720	(7.065)
9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	856.034.000	744.988.584	87,03	720.773.064	24.215.520
10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.826.000	18.007.007	56,58	17.798.715	208.292
11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	62.086.000	54.021.438	87,01	53.396.199	625.239
12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	44.974.000	-	-	-	-
Jumlah	12.927.078.000	12.260.435.558	94,84	12.289.742.954	(29.307.396)

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp 13.991.340.550,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp 14.250.073.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.991.340.550,- atau 98,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 13.818.115.749,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 173.224.801,- atau 1,25% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.250.073.000	13.991.340.550	98,18	13.818.115.749	173.224.801
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-
5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-
Jumlah	14.250.073.000	13.991.340.550	98,18	13.818.115.749	173.224.801

5.1.2.1.1.3 **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**
Rp 222.680.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp 226.430.000,-dengan realisasi sebesar Rp 222.680.000,- atau 98,34%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 206.550.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 16.130.000,- atau 7,81% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-
4 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-
5 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-
6 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-
7 Belanja Honorarium	226.430.000	206.550.000	98,34	206.550.000	16.130.000
8 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-
Jumlah	226.430.000	206.550.000	98,34	206.550.000	16.130.000

5.1.2.1.2 **Belanja Barang dan Jasa Rp 15.806.209.270,00**

Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp 15.902.323.000,- dengan realisasi sebesar Rp 15.806.209.270,- atau 99,40%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 6.652.779.094,-mengalami **kenaikan** sebesar Rp 9.153.430.176,- atau 137,59% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Barang	9.854.329.000	9.828.914.829	99,74	1.203.514.909	8.625.399.920
2 Belanja Jasa	3.650.303.000	3.619.541.120	99,16	3.626.534.265	(6.993.145)
3 Belanja Pemeliharaan	709.825.000	692.599.339	97,57	607.710.150	84.889.189
4 Belanja Perjalanan Dinas	1.628.016.000	1.605.303.982	98,60	1.155.019.770	450.284.212
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	59.850.000	59.850.000	100	60.000.000	(150.000)
Jumlah	15.902.323.000	15.806.209.270	99,40	6.652.779.094	9.153.430.176

5.1.2.1.2.1 **Belanja Barang Rp 9.828.914.829,00**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp 9.854.329.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.828.914.829,-atau 99,74%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 1.203.514.909,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 8.625.399.920,- atau 716,68% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Bahan Pakai Habis	9.854.329.000	9.828.914.829	99,74	1.203.514.909	8.625.399.920
2 Belanja Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-
3 Belanja Bahan/Material	-	-	-	-	-
4 Belanja Cetak/Penggandaan	-	-	-	-	-
5 Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-
6 Belanja Barang Bekas dipakai	-	-	-	-	-
Jumlah	9.854.329.000	9.828.914.829	99,74	1.203.514.909	8.625.399.920

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp 3.619.541.120,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.650.303.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.619.541.120,-atau 99,16%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 3.626.534.265,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6.993.145,- atau 0,19% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Jasa Kantor	3.395.019.000	3.376.727.830	99,46	3.374.162.428	2.565.402
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	124.284.000	112.452.990	90,48	102.355.837	10.097.153
3 Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	-
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000	6.000.000	100	11.000.000	(5.000.000)
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
6 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-
7 Belanja Sewa Alat Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
8 Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	125.000.000	124.360.300	99,49	139.016.000	(14.655.700)
9 Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	-	-	-	-	-
10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	-	-	-	-	-
11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
12 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-	-
Jumlah	3.650.303.000	3.619.541.120	99,16	3.626.534.265	(6.993.145)

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp 692.599.339,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 709.825.000,-dengan realisasi sebesar Rp 692.599.339,- atau 97,57%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 607.710.150,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 84.889.189,-atau 13,97% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	473.071.000	460.937.225	97,44	285.679.150	175.258.075
3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	209.754.000	204.662.114	97,57	292.031.000	(87.368.886)
4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.000.000	27.000.000	100	30.000.000	(3.000.000)
5 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Jumlah	709.825.000	692.599.339	97,57	607.710.150	388.294.150

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp 1.605.303.982,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp 1.628.016.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.605.303.982,- atau 99,06 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 1.155.019.770,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 450.284.212,- atau 38,98% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.566.130.000	1.543.417.982	98,55	967.708.430	575.709.552
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	61.886.000	61.886.000	100	187.311.340	(125.425.340)
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.628.016.000	1.605.303.982	99,06	1.155.019.770	450.284.212

5.1.2.1.2.5 **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 59.850.000,00**

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp 59.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp 59.850.000,-atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 60.000.000,-mengalami **penurunan** sebesar Rp 150.000,- atau 0,25% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	59.850.000	59.850.000	100	60.000.000	(150.000)
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketigas/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-
	Jumlah	59.850.000	59.850.000	100	60.000.000	(150.000)

5.1.3 **BELANJA MODAL Rp 7.300.032.944,00**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 7.327.099.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.300.032.944,- atau 99,63%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 761.716.173,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6.538.316.771,- atau 858,37% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	722.175.000	713.258.000	98,77	335.123.000	378.135.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.668.971.000	5.667.437.999	99,97	-	5.667.437.999,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	935.953.000	919.336.945	98,22	426.593.173	492.743.772,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
7	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-	-
8	Belanja Modal Komputer	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.327.099.000	7.300.032.944	99,63	761.716.173	6.538.316.771

5.1.3.1 **Belanja Modal Peralatan dan MesinRp 713.258.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 722.175.000,- dengan realisasi sebesar Rp 713.258.000,- atau 98,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 335.123.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 378.135.000,- atau 112,83% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat	-	-	-	-	-

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Ukur					
5	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-
6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	424.100.000	420.820.000	99,23	179.562.000	241.258.000
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.000.000	34.398.000	98,28	4.660.000	29.738.000
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-
10	Belanja Modal Komputer	263.075.000	258.040.000	98,09	150.411.000	107.629.000
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	490.000	(490.000,00)
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-
16	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-
18	Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-
	Jumlah	722.175.000	713.258.000	98,77	335.123.000	378.135.000

5.1.3.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 420.820.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp 424.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp 420.820.000,- atau 99,23 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 179.562.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 241.258.000,- atau 134,36% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	14.100.000	14.100.000	100	-	14.100.000
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	410.000.000	406.720.000	99,20	4.562.000-	402.158.000
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-		175.000.000	(175.000.000)
	Jumlah	424.100.000	420.820.000	99,23	179.562.000	241.258.000

5.1.3.1.2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 34.398.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 34.398.000,- atau 98,28 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 4.660.000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 29.738.000,- atau 638,15% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	35.000.000	34.398.000	98,28	4.660.000	29.738.000
	Jumlah	35.000.000	34.398.000	98,28	4.660.000	29.738.000

5.1.3.1.3 Belanja Modal Komputer Rp 258.040.000,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp 263.075.000,- dengan realisasi sebesar Rp 258.040.000,- atau 98,09%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 150.411.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 107.629.000,- atau 71,56% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Komputer Unit	102.900.000	102.300.000	99,42	146.461.000	(44.161.000)
2 Belanja Modal Peralatan Komputer	160.175.000	155.740.000	97,23	3.950.000	151.790.000
Jumlah	263.075.000	258.040.000	98,09	150.411.000	107.629.000

5.1.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 5.667.437.999,00,-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp 5.668.971.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.667.437.999,- atau 99,97 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar **nihil** mengalami **kenaikan** sebesar Rp 5.667.437.999,- atau 99,97% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung	5.668.971.000	5.667.437.999	99,97	-	5.667.437.999
Jumlah	5.668.971.000	5.667.437.999	99,97	-	5.667.437.999

5.1.3.2.1 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp 5.667.437.999,00,-

Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp 5.668.971.000,-dengan realisasi sebesar Rp5.667.437.999,- atau 99,97 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar **nihil** mengalami **kenaikan** sebesar Rp 5.667.437.999,- atau 99,97% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.668.971.000	5.667.437.999	99,97	-	5.667.437.999
2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-	-
Jumlah	5.668.971.000	5.667.437.999	99,97	-	5.667.437.999

5.1.3.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 426.593.173,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 935.953.000,- dengan realisasi sebesar Rp 919.336.945,- atau 98,22 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 36.052.726,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 492.743.772,- atau 115,51% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	935.953.000	919.336.945	99,22	426.593.173	492.743.772
Jumlah	935.953.000	919.336.945	99,22	426.593.173	492.743.772

5.1.3.2.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp 919.336.945,00

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp 935.953.000,-dengan realisasi sebesar Rp 919.336.945,- atau 98,22 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 426.593.173,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 492.743.772,- atau 115,51% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	537.434.000,00	527.273.420,00	98,11	302.368.040	224.905.380,00
2 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	393.869.000,00	387.424.350,00	98,36	124.225.133	263.199.217,00
3 Belanja Modal Kartografi,Naskah, Dan Lukisan Lainnya	4.650.000,00	4.639.175,00	99,77	-	4.639.175,00
4 Belanja Modal Musik	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Material) Lainnya"	-	-	-	-	-
6 Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-	-	-	-
7 Belanja Modal Tarscalt	-	-	-	-	-
Jumlah	935.953.000,00	919.336.945,00	98,22	426.593.173	492.743.772,00

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp Rp 37.595.754.461,30

Total Aset sebesar Rp 37.595.754.461,30 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 31.465.541.676,11 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6.130.212.785,19 atau 19,48 %. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Aset Lancar	23.786.299,03	56.613.001,62
2 Investasi Jangka Panjang	-	-
3 Aset Tetap	37.571.968.162,27	31.408.928.674,49
4 Dana Cadangan	-	-
5 Aset Lainnya	-	-
Jumlah	37.595.754.461,30	31.465.541.676,11

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp 23.786.299,03

Aset Lancar sebesar Rp 23.786.299,03 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 56.613.001,62 mengalami **penurunan** sebesar Rp 32.826.702,59 atau -57,98% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Kas dan Setara Kas	-	-
2 Investasi Jangka Pendek	-	-
3 Piutang Pajak Daerah	-	-
4 Piutang Retribusi Daerah	-	-
5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-
7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8 Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9 Piutang Lainnya	-	-
10 Penyisihan Piutang	-	-
11 Beban Dibayar Dimuka	15.326.924,03	10.693.501,62
12 Persediaan	8.459.375,00	45.919.500,00
Jumlah	23.786.299,03	56.613.001,62

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp 15.326.924,03

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 15.326.924,03 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 10.693.501,62 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 4.633.422,41 atau 43,33% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	-	10.693.501,62
2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
3 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	15.326.924,03	-
Jumlah	15.326.924,03	10.693.501,62

5.2.1.1.2 **Persediaan Rp 8.459.375,00**

Persediaan sebesar Rp 8.459.375,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 45.919.500 mengalami **penurunan** sebesar Rp 37.460.125,00 atau - 81,58% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Barang Pakai Habis	8.459.375,00	45.919.500
2 Barang Tak Habis Pakai	-	-
3 Barang Bekas Dipakai	-	-
Jumlah	8.459.375,00	45.919.500

5.2.1.1.2.1 **Barang Pakai Habis Rp 8.459.375,00**

Barang Pakai Habis sebesar Rp 8.459.375,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 45.919.500 mengalami **penurunan** sebesar Rp 37.460.125,00 atau 81,58% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bahan	-	-
2 Suku Cadang	-	-
3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	8.459.375,00	45.919.500,00
4 Obat-Obatan	-	-
5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7 Natura dan Pakan	-	-
Jumlah	8.459.375,00	45.919.500,00

5.2.1.1.2.1.1 **Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp947.750**

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp 45.919.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 947.750 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 44.971.750 atau 4745,11% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Tulis Kantor	7.745.300,00	35.472.500
2 Kertas dan Cover	714.075,00	5.699.000
3 Bahan Cetak	-	2.628.000
4 Benda Pos	-	-
5 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
6 Bahan Komputer	-	2.120.000
7 Perabot Kantor	-	-
8 Alat Listrik	-	-
9 Perlengkapan Dinas	-	-
10 Kaporalap dan Perlengkapan Satwa	-	-
11 Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-
12 Suvenir/Cendera Mata	-	-
13 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
Jumlah	8.459.375,00	45.919.500

5.2.1.2 **Aset Tetap Rp 37.571.968.162,27**

Aset Tetap sebesar Rp 37.571.968.162,27 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 31.408.928.674,49 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6.163.039.487,78 atau 19,62% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanah	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
2 Peralatan dan Mesin	36.674.712.578,00	36.307.825.761,00
3 Gedung dan Bangunan	28.683.561.668,00	23.062.733.817,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	206.975.000,00	206.975.000,00
5 Aset Tetap Lainnya	14.994.727.353,00	14.075.390.408,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.276.000,00	133.276.000,00
7 Akumulasi Penyusutan	(47.667.784.436,73)	(46.923.772.311,51)
Jumlah	37.571.968.162,27	31.408.928.674,49

5.2.1.2.1 Tanah Rp 4.546.500.000,00

Tanah sebesar Rp 4.546.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4.546.500.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanah Persil	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
2 Tanah Non Persil	-	-
3 Lapangan	-	-
Jumlah	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil Rp 4.546.500.000,00

Tanah Persil sebesar Rp 4.546.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4.546.500.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-
2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
3 Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7 Tanah Persil Lainnya	-	-
Jumlah	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp 36.674.712.578

Peralatan dan Mesin sebesar Rp 36.674.712.578 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 36.307.825.761 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 366.886.817 atau 1,01% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Alat Besar	4.793.220.260,00	4.065.823.260,00
2 Alat Angkutan	5.723.636.345,00	5.890.636.345,00
3 Alat Bengkel dan Ukur	2.053.754.956,00	2.056.129.956,00
4 Alat Pertanian	-	-
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.836.690.408,00	13.734.463.498,00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.524.881.090,00	4.691.826.256,00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8 Alat Laboratorium	78.430.000,00	90.230.000,00
9 Alat Persenjataan	-	-
10 Komputer	5.664.099.519,00	5.778.716.446,00
11 Alat Eksplorasi	-	-
12 Alat Pengeboran	-	-
13 Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurniaan	-	-
14 Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15 Alat Keselamatan Kerja	-	-
16 Alat Peraga	-	-
17 Peralatan Proses/Produksi	-	-
18 Rambu-Rambu	-	-
19 Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah	36.674.712.578,00	36.307.825.761,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp 28.683.561.668

Gedung dan Bangunan sebesar Rp 28.683.561.668 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 23.062.733.817 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 5.620.827.851 atau 24,37% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bangunan Gedung	28.340.680.998,00	22.719.853.147,00
2 Monumen	-	-
3 Bangunan Menara	-	-
4 Tugu Titik Kontrol/Pasti	342.880.670,00	342.880.670,00
Jumlah	28.683.561.668,00	23.062.733.817,00

5.2.1.2.4 **Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 206.975.000,00**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 206.975.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 206.975.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Jalan dan Jembatan	-	-
2 Bangunan Air	190.275.000,00	190.275.000,00
3 Instalasi	-	-
4 Jaringan	16.700.000,00	16.700.000,00
Jumlah	206.975.000,00	206.975.000,00

5.2.1.2.5 **Aset Tetap Lainnya Rp 14.994.727.353**

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 14.994.727.353 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 14.075.390.408,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 919.336.945,00 atau 6,53% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	14.984.688.782,00	14.065.351.837,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	10.038.571,00	10.038.571,00
3 Hewan	-	-
4 Biota Perairan	-	-
5 Tanaman	-	-
6 Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7 Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Jumlah	14.994.727.353,00	14.075.390.408,00

5.2.1.2.6 **Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 133.276.000**

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 133.276.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 133.276.000 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
2 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	-	-
3 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-	-
4 Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	133.276.000,00	133.276.000,00
5 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	133.276.000,00	133.276.000,00

5.2.1.2.7 **Akumulasi Penyusutan Rp 47.667.784.436,73**

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 47.667.784.436,73 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 46.923.772.311,51 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 744.012.125,22 atau 1,59% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(34.806.950.326,91)	(34.596.464.416,63)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.746.326.045,30)	(12.219.048.781,98)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(114.508.064,52)	(108.259.112,90)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	(47.667.784.436,73)	(46.923.772.311,51)

5.2.1.5.1 **Aset Tidak Berwujud Rp 193.550.000**

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 193.550.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 193.550.000 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Goodwill	-	-
2 Lisensi dan Franchise	-	-
3 Hak Cipta	-	-
4 Hak Paten	-	-
5 Software	193.550.000,00	193.550.000,00
6 Kajian	-	-
7 Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8 Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9 Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
Jumlah	193.550.000,00	193.550.000,00

5.2.1.5.2 Aset Lain-Lain Rp 2.867.757.155,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp 2.867.757.155,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.498.028.824,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.369.728.331 atau 91,44% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Aset Rusak Berat/Usang	2.867.757.155,00	1.498.028.824,00
2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-
3 Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
Jumlah	2.867.757.155,00	1.498.028.824,00

5.2.1.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp 193.550.000

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 193.550.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp193.550.000 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	-	-
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(193.550.000,00)	(193.550.000,00)
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-
Jumlah	(193.550.000,00)	(193.550.000,00)

5.2.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp 2.867.757.155

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp2.867.757.155 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.498.028.824,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.369.728.331,00 atau 91,44% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Sewa	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerja Sama Pemanfaatan	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	(2.867.757.155,00)	(1.498.028.824,00)
Jumlah	(2.867.757.155,00)	(1.498.028.824,00)

5.2.2 KEWAJIBAN Rp,00

Kewajiban sebesar **Nihil**, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Nihil** mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar **Nihil** atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah	Nihil	Nihil

5.2.3 EKUITAS Rp 37.595.754.461,30

Ekuitas sebesar Rp 37.595.754.461,30 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 31.465.541.676,16 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6.130.212.785,19 atau 19,48% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Ekuitas	(11.922.555.360,70)	31.465.541.676,16
2 Ekuitas SAL	-	-
3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	49.518.309.822,00	-
Jumlah	37.595.754.461,30	31.465.541.676,16

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2			5
1	Pendapatan	62.388.500,00	613.734.200,00	(551.345.700,00)
2	Beban	43.450.485.536,81	34.031.399.479,76	9.419.086.057,05
	Surplus/(Defisit) Operasional	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)	(9.970.431.757,05)
3	Kegiatan Non Operasional	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)	(9.970.431.757,05)
4	Pos Luar Biasa	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)	(9.970.431.757,05)

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO Rp 62.388.500,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp 62.388.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 613.734.200 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 551.345.700 atau 89,83% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	62.388.500	-	-	62.388.500	73.523.500	(11.135.000)	(15,14)
2 Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	-	-	-	-	540.210.700	(540.210.700)	(100,00)
Jumlah	62.388.500	-	-	62.388.500	613.734.200	(551.345.700)	(89,83)

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Rp62.388.500

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terealisasi sebesar Rp 62.388.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 73.523.500 mengalami **penurunan** sebesar Rp 11.135.000 atau 15,14% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	38.738.500	-	-	38.738.500	70.773.500	(32.035.000)	(45,26)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	23.650.000	-	-	23.650.000	2.750.000	20.900.000	760,00
	Jumlah	62.388.500	-	-	62.388.500	73.523.500	(11.135.000)	(15,14)

5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp 38.738.500

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp38.738.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp70.773.500 mengalami **penurunan** sebesar Rp 32.035.000 atau 45,26% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO					-		
2	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO	38.738.500	-	-	38.738.500	70.773.500	(32.035.000)	(45,26)
3	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO					-		
	Jumlah	38.738.500	-	-	38.738.500	70.773.500	(32.035.000)	(45,26)

5.3.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Rp 23.650.000

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp 23.650.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.750.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp 20.900.000 atau 89,74 % dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	21.000.000	-	-	21.000.000	-	21.000.000	100
2	Jasa Giro-LO					-		
3	Pendapatan Bunga-LO					-		
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO					-		
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	2.650.000	-	-	2.650.000	2.750.000	(100.000)	(3,64)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO					-		

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH(Rp)	MUTASI KURANG(Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO					-		
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO					-		
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO					-		
10	Pendapatan BLUD-LO							
	Jumlah	23.650.000	-	-	23.650.000	2.750.000	20.900.000	760,00

5.3.2 BEBAN DAERAH Rp 43.450.485.536,81

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp **43.450.485.536,81** apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 34.031.399.479,76 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 9.419.086.057,05 atau 27,68% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasional	42.280.665.378	9.704.606.457,84	8.534.786.299,03	43.450.485.536,81	34.031.399.479,76	9.419.086.057,05	27,68
2	Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	42.280.665.378	9.704.606.457,84	8.534.786.299,03	43.450.485.536,81	34.031.399.479,76	9.419.086.057,05	27,68

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp 43.450.485.536,81

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp 43.450.485.536,81 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 34.031.399.479,76 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 9.419.086.057,05 atau 27,68% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	26.474.456.108	-	-	26.474.456.108,00	26.314.408.703,00	160.047.405,00	0,61
2	Beban Barang dan Jasa	15.806.209.270	56.613.001,62	8.534.786.299,03	7.328.035.972,59	6.597.603.842,38	730.432.130,21	11,07
3	Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Hibah	-	8.511.000.000,00	-	8.511.000.000,00	-	8.511.000.000,00	-
6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.136.993.456,22	-	1.136.993.456,22	1.119.386.934,38	17.606.521,84	1,57
	Jumlah	42.280.665.378	9.704.606.457,84	8.534.786.299,03	43.450.485.536,81	34.031.399.479,76	9.419.086.057,05	27,68

5.3.2.1.1 Beban Pegawai Rp 26.474.456.108

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp 26.474.456.108 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 26.314.408.703 mengalami kenaikan sebesar Rp 160.047.405 atau 0,61% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	12.260.435.558	-	-	12.260.435.558	12.289.742.954	(29.307.396)	(0,24)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	13.991.340.550	-	-	13.991.340.550	13.818.115.749	173.224.801	1,25
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	222.680.000	-	-	222.680.000	206.550.000	16.130.000	7,81
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Gaji dan Tunjangan MRP	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	26.474.456.108	-	-	26.474.456.108	26.314.408.703	160.047.405	0,61

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp 7.328.035.972,59

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 7.328.035.972,59 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6.597.603.842,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 730.432.130,21 atau 11,07% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	9.828.914.829,00	45.919.500,00	8.519.459.375,00	1.355.374.954,00	1.159.033.159,00	196.341.795,00	16,94
2	Beban Jasa	3.619.541.120,00	10.693.501,62	15.326.924,03	3.614.907.697,59	3.615.840.763,38	(933.065,79)	(0,03)
3	Beban Pemeliharaan	692.599.339,00	-	-	692.599.339,00	607.710.150,00	84.889.189,00	13,97
4	Beban Perjalanan Dinas	1.605.303.982,00	-	-	1.605.303.982,00	1.155.019.770,00	450.284.212,00	38,98
5	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	59.850.000,00	-	-	59.850.000,00	60.000.000,00	(150.000,00)	(0,25)
6	Beban Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	15.806.209.270,00	56.613.001,62	8.534.786.299,03	7.328.035.972,59	6.597.603.842,38	730.432.130,21	11,07

5.3.2.1.2.1 Beban Barang Rp 1.355.374.954

Beban Barang terealisasi sebesar Rp 1.355.374.954 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.159.033.159 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 196.341.795 atau 16,94% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penur nan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang Pakai Habis	9.828.914.829	45.919.500,00	8.519.459.375	1.355.374.954,00	1.158.543.159,00	196.831.795,00	16,99
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	-	-	490.000,00	(490.000,00)	(100)
Jumlah		9.828.914.829	45.919.500,00	8.519.459.375	1.355.374.954,00	1.159.033.159,00	196.341.795,00	16,94

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa Rp 3.614.907.697,59

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp 3.614.907.697,59 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.615.840.763,38 mengalami **penurunan** sebesar Rp933.065,79 atau 0,03% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	3.376.727.830	-	-	3.376.727.830,00	3.374.162.428,00	2.565.402	0,08
2	Beban Jasa Asuransi	112.452.990	10.693.501,62	15.326.924,03	107.819.567,59	91.662.335,38	16.157.232,21	17,63
3	Beban Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000	-	-	6.000.000,00	11.000.000,00	(5.000.000)	(45,45)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	124.360.300	-	-	124.360.300,00	139.016.000,00	(14.655.700)	(10,54)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-	-
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-	-
13	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	-	-	-	-	-	-	-
14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-	-	-	-	-	-	-
15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3.619.541.120	10.693.501,62	15.326.924,03	3.614.907.697,59	3.615.840.763,38	(933.065,79)	(0,03)

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp 692.599.339

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp 692.599.339apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp607.710.150 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 84.889.189 atau 13,97 % dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	460.937.225	-	-	460.937.225	285.679.150	175.258.075	61,35
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	204.662.114	-	-	204.662.114	292.031.000	(87.368.886)	(29,92)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.000.000	-	-	27.000.000	30.000.000	(3.000.000)	(10,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	692.599.339	-	-	692.599.339	607.710.150	84.889.189	13,97

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp 1.605.303.982

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp 1.605.303.982apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.155.019.770mengalami **kenaikan** sebesar Rp 450.284.212 atau 38,98% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024(Rp)	2023(Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.543.417.982	-	-	1.543.417.982	967.708.430	575.709.552	59,49
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	61.886.000	-	-	61.886.000	187.311.340	(125.425.340)	(66,96)
	Jumlah	1.605.303.982	-	-	1.605.303.982	1.155.019.770	450.284.212	38,98

5.3.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 59.850.000

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp 59.850.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 60.000.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp 150.000 atau 0,25% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 Rp)	2023 Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	59.850.000	-	-	59.850.000	60.000.000	(150.000)	(0,25)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	59.850.000	-	-	59.850.000	60.000.000	(150.000)	(0,25)

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp 1.136.993.456,22

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp 1.136.993.456,22 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.119.386.934,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 17.606.521,84 atau 1,57% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	603.467.241,28	632.700.951,53	(29.233.710,25)	(4,62)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	527.277.263,32	480.437.031,24	46.840.232,08	9,75
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.248.951,62	6.248.951,61	0,01	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-		
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-		
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-		
	Jumlah	1.136.993.456,22	1.119.386.934,38	17.606.521,84	1,57

5.3.2.2.1 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN Rp 603.467.241,28

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 603.467.241,28 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 632.700.951,53 mengalami **penurunan** sebesar Rp 29.233.710,25 atau 4,62% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	-	-	-	-
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	135.573.687,50	148.033.437,50	(12.459.750,00)	(8,42)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	134.730.755,70	141.544.255,70	(6.813.500,00)	(4,81)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.057.172,26	231.004.748,33	(30.947.576,07)	(13,40)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.225.200,01	29.232.980,00	(26.007.779,99)	(88,97)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	13.333,33	-	13.333,33	-
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	-
10	Beban Penyusutan Komputer	129.867.092,48	82.885.530,00	46.981.562,48	56,68
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	-
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	-	-	-	-
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
	Jumlah	603.467.241,28	632.700.951,53	(29.233.710,25)	(4,62)

5.3.2.2.2 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN Rp 527.277.263,32

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 527.277.263,32 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 480.437.031,24 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 46.840.232,08 atau 9,75 % dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	520.145.527,66	473.305.295,58	46.840.232,08	9,90
2	Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	-
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.131.735,66	7.131.735,66	-	-
	Jumlah	527.277.263,32	480.437.031,24	46.840.232,08	9,75

5.3.2.2.3 BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI Rp 6.248.951,62

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi terealisasi sebesar Rp 6.248.951,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6.248.951,61 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 0,01 dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
2 Beban Penyusutan Bangunan Air	5.831.451,62	5.831.451,61	0,01	0,00
3 Beban Penyusutan Instalasi	-	-	-	-
4 Beban Penyusutan Jaringan	417.500,00	417.500,00	-	-
Jumlah	6.248.951,62	6.248.951,61	0,01	0,00

5.3.3 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL

Surplus Defisit Non Operasional terealisasi sebesar **Nihil** , apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Nihil** mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Surplus Non Operasional	-	-	-	-
2 Defisit Non Operasional	-	-	-	-
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5.3.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar **Nihil**, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Nihil** mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar **Nihil** atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO	-	-	-	-
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5.3.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5.3.4 BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa terealisasi sebesar **Nihil**, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Nihil** mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar **Nihil** atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Tidak Terduga	-	-	-	-
2 Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	31.465.541.676,11	31.227.826.485,87	237.715.190,24	0,76
2	Surplus/Defisit-LO	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)	(9.970.431.757,05)	29,84
3	RK-PPKD	49.518.309.822,00	33.655.380.470,00	-	-
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	-	-	-	-
Ekuitas Akhir		37.595.754.461,30	31.465.541.676,11	(9.732.716.566,81)	-

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp 31.465.541.676,11 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar Rp 43.388.097.036,81 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2024.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar- , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	-	-	-	-
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	-	-	-	-
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-	-	-
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	-
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-	-	-
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-	-	-
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	976.747.000	-	976.747.000	-
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	(976.747.000)	-	(976.747.000)	-
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-	-	-
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	-	-	-	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	-	-	-	-
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp 976.747.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	976.747.000	-	976.747.000	-
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-
9	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
10	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	-	-	-
11	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
Jumlah		976.747.000	-	976.747.000	-

5.4.3.2 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp 976.747.000,00dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(976.747.000)	-	(976.747.000)	-
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	-	-	-
Jumlah		(976.747.000)	-	(976.747.000)	-

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesarRp 29.084.754.461,30 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	37.595.754.461,30	31.465.541.676,11		
Jumlah		37.595.754.461,30	31.465.541.676,11		



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5° 4" dan 8° 30" lintang selatan dan 108° 30" dan 111° 30" bujur timur. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3.25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Sedangkan secara administrative Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota serta 567 kecamatan yang meliputi 7.807 desa dan 763 kelurahan.

Pembangunan di Jawa Tengah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang menyangkut aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pembangunan Ideologi dan Politik dilakukan melalui pendalaman Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pendidikan politik masyarakat dalam berdemokrasi guna menumbuhkan semangat kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah dilakukan berbagai langkah antara lain :

1. Regulasi untuk mendorong peningkatan investasi dan stabilisasi sektor keuangan;
2. Pengembangan pertanian dalam arti luas;
3. Mendorong pertumbuhan UMKM; dan
- Menciptakan iklim kondusif.

6.2. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

2. Fungsi

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, akuisisi dan pengolahan, pelestarian dan preservasi, layanan dan pemasyarakatan serta pengembangan dan hubungan antar lembaga lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan.
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menyusun Rencana Strategik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan dapat merupakan acuan dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditetapkan antara lain yaitu :

6.3. VISI DAN MISI

a. **Visi** Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah :

**“ARSIP DAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI, DAN ILMU
PENGETAHUAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”**

b. Misi

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan.
- 2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan.
- 3. Mengembangkan Sistem Kearsipan dan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi.
- 4. Meningkatkan Manajemen Kelembagaan Arsip dan Perpustakaan.

c. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah

d. Fungsi

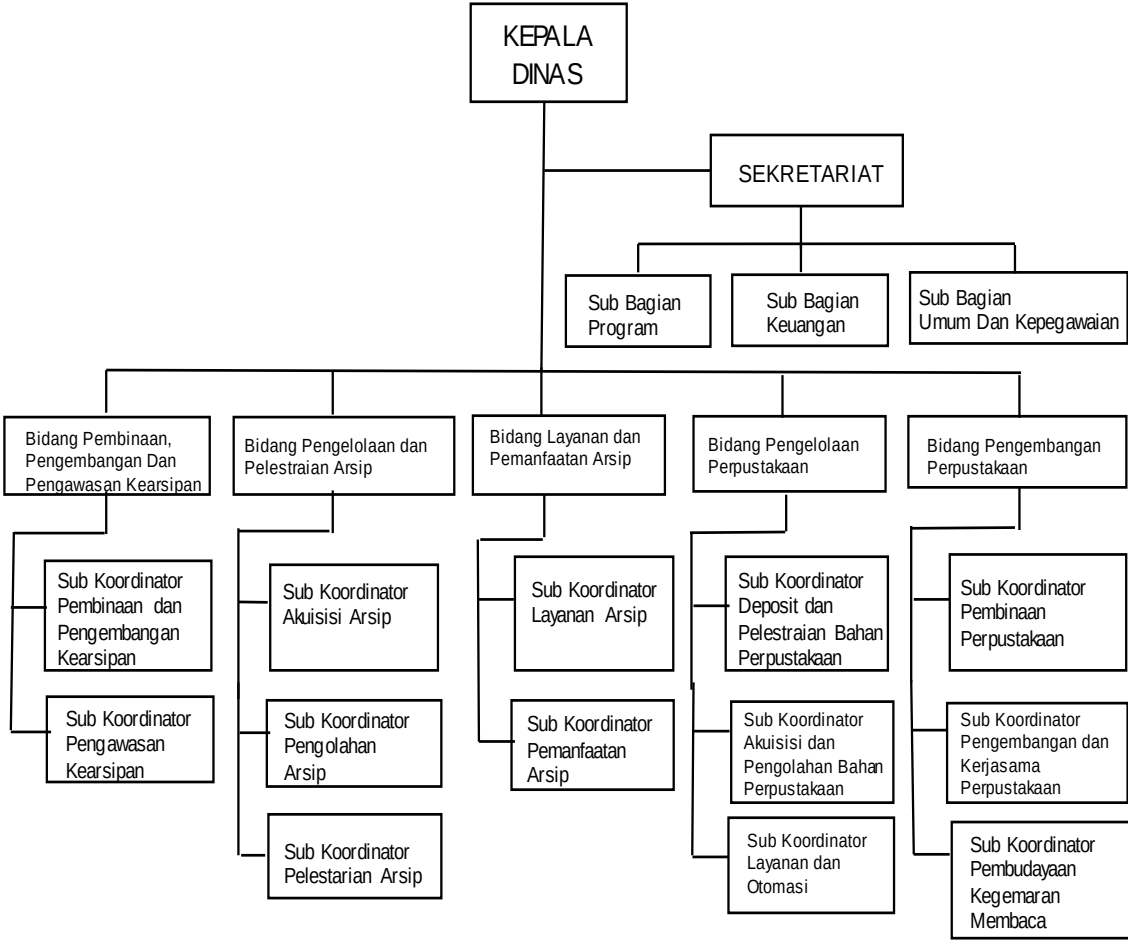
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam poin 6.3., Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan.;
- 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan;
- 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.4. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 84 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI



DATA KEPEGAWAIAN

a. Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah	%
Aparatur Sipil Negara (ASN)		
- Jabatan Struktural	8	4,23
- Jabatan Fungsional Pustakawan	41	21,69
- Jabatan Fungsional Arsiparis	53	28,04
- Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian	2	1,06
- Pelaksana	42	22,22
Non Aparatur Sipil Negara (ASN)		
- NON ASN	23	12,17
- Outsourcing	20	10,58
Jumlah	189	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2024

b. Komposisi Personil Berdasarkan Golongan/Pendidikan

No	Struktural	Jumlah
1	Eselon II a	1 orang
2	Eselon III a	4 orang
3	Eselon IV a	3 orang
Fungsional		
1	Arsiparis	53 orang
2	Pustakawan	41 orang
3	Analisis Kepegawaian	2 orang
4	Fungsional Umum	42 orang
Golongan		
1	Golongan IV	41 orang
2	Golongan III	76 orang
3	Golongan II	22 orang
4	Golongan I	1 orang
5	Golongan IX (Pustakawan)	3 orang
6	Golongan IX (Analisis Kepegawaian)	1 orang
7	Golongan IX (Arsiparis)	1 orang
8	Golongan VII (Arsiparis)	1 orang
Pendidikan		
1	S2	23 orang
2	S1	64 orang
3	D4	5 orang
4	D3	27 orang
5	SMA	26 orang
6	SMP	0 orang
7	SD	1 orang
Non ASN		
1	NON ASN	20 orang
2	Outsourcing	23 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2024



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 7

PENUTUP

BAB 7

P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2024. Catatan atas laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semarang, 31 Desember 2024

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19720502 199903 1 008



LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614. Telepon 8311174
Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.bpkad.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 26/BA-REKON/SKPD/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **SRI SULASTRI, SE., M.M.**
NIP : 19700519 199503 2 002
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI**
NIP : 19720502 199903 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut .

NO	URAIAN	REALISASI KASDA (Rp)	REALISASI SKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KET.
	Penerimaan				
1	Pendapatan	62.388.500	62.388.500		
2	Pengembalian Sisa TU	151.032.631	151.032.631		
3	Contrapost LS & Pegawai	3.479.500	3.479.500		
	Total	216.900.631	216.900.631		
	Pengeluaran (SP2D)				
1	UP	350.000.000	350.000.000		
2	GU	5.021.449.683	5.021.449.683		
3	TU	2783.435.249	2.783.435.249		
4	LS Pegawai	26.253.356.108	26.253.356.108		
5	LS Barang & Jasa	15.326.969.413	15.326.969.413		
	Total	4.9735.210.453	49.735.210.453		

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi
Jawa Tengah

DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI
NIP. 19720502 199903 1 008

Dibuat di Pati, 23 Januari 2025
Pihak Pertama
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

SRI SULASTRI, SE., M.M.
NIP. 19700519 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 – 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 27/BA-RKN/JAN-SKPD/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.**
NIP : **19851204 200902 2 012**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DANANG ARI PRABOWO, SH**
NIP : **19691014 199203 1 003**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BAPENDA Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : **DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI**
NIP : **19720502 199903 1 008**
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data realisasi APBD, rekonsiliasi dengan SIPENARI, realisasi P3DN serta Ceklist Kebutuhan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Empat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di Pati, 23 Januari 2025



DANANG ARI PRABOWO, SH
NIP. 19691014 199203 1 003



DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012



DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI
NIP. 19720502 199903 1 008

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	Realisasi SKPD	Selisih	Keterangan
Pendapatan	62.388.500	62.388.500	-	
Pendapatan Asli Daerah	62.388.500	62.388.500	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	38.738.500	38.738.500	-	
Lain-lain PAD yang Sah	23.650.000	23.650.000	-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	
Belanja	49.580.698.322	49.580.698.322	-	
Belanja Pegawai	26.474.456.108	26.474.456.108	-	
Belanja Barang dan Jasa	15.806.209.270	15.806.209.270	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	-	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	7.300.032.944	7.300.032.944	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Transfer	-	-	-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terlampir.


Pihak Ketiga
DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI
NIP. 19720502 199903 1 008


Pihak Pertama
DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

REKONSILIASI E-PENATAUSAHAAN DENGAN SIPENARI

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	SIPENARI	Selisih	Keterangan
Pendapatan	62.388.500	62.388.500	-	
Pendapatan Asli Daerah	62.388.500	62.388.500	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	38.738.500	38.738.500	-	
Lain-lain PAD yang Sah	23.650.000	23.650.000	-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terlampir.

Pihak Kedua



DANANG ARI PRABOWO, SH
NIP. 19691014-199203 1 003

Pihak Pertama



DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

Pihak Ketiga



DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI
NIP. 19720502 199903 1 008

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI**
NIP : **19720502 199903 1 008**
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

menyatakan bahwa realisasi belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi		15.806.209.270
1. Belanja Barang dan jasa	:	15.806.209.270
2. Belanja hibah barang/jasa	:	-
3. Belanja bantuan sosial barang/jasa	:	-
Belanja Modal		7.300.032.944
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	713.258.000
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	5.667.437.999
6. Belanja Modal jalan, jaringan & irigasi	:	-
7. Belanja Modal Aset tetap lainnya	:	919.336.945
Jumlah Total Realisasi		23.106.242.214

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Pati, 23 Januari 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah



DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI

NIP 19720502 199903 1 008

Ceklist Kebutuhan Penyusunan Laporan Keuangan

No	Uraian	Lengkap	Tidak	NILAI	Keterangan
1	SPJ Fungsional Pendapatan per 31 Desember 2024	V			
2	SPJ Fungsional Belanja per 31 Desember 2024	V			
3	Alasan Realisasi Pendapatan dan Belanja kurang dari 95% serta Pendapatan kurang dari 95% dan lebih dari 100% per 31 Desember 2024	V			
4	Laporan realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri per 31 Desember 2024	V			
5	Laporan realisasi belanja barang dan Jasa yang menjadi persediaan per 31 Desember 2024	V			
6	Laporan realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting Per 31 Desember 2024		V		
7	Laporan realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Per 31 Desember 2024		V		
8	Laporan realisasi belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui e-purchasing Per 31 Desember 2024	V			
9	Rekap Piutang Per 31 Desember 2024		V		
10	Laporan Rincian Piutang dan Pembayaran di Tahun 2025		V		
11	Rekap Utang dan Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 (Utang Non Jasa Pelayanan)		V		
12	Rekap Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024	V		21.108.664,97	selisih Rp1,-
13	Rekap Kas per 31 Desember 2024 dan Bukti Penyetoran STS di Tahun 2025		V		
14	Daftar Belanja yang dikapitalisasi ke Aset Tetap		V		
15	Kertas Kerja Aset Tetap, Aset Lainnya (cetak sim asset)	V			
16	Kertas Kerja Persediaan (cetak sim asset)	V			
17	Draft Kertas Kerja Penyusunan Laporan Keuangan	V			
18	Cetak Realisasi Pendapatan Sipenari	V			

BLUD					
1	SP3B BLUD per 31 Desember 2024				
2	Rekap Klaim Tagihan BLUD 2024 yang Diverifikasi di Tahun 2025				
3	Rekap Utang Jasa Pelayanan per 31 Desember 2024				
4	Daftar Persediaan Obat Kadaluarasa				

NB: semua kekurangan dan perbedaan akan diselesaikan paling lambat 31 Januari 2025


 Pihak Ketiga
DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI
 NIP. 19720502 199903 1 008


 Pihak Pertama
DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
 NIP. 19851204 200902 2 012

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASURANSI DAN SEWA DIBAYAR DIMUKA 2024

SKPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR KENDARAAN	NILAI KONTRAK PER BARANG YANG DISPKAN	JANGKA WAKTU ASURANSI		AKHIR TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARI	JUMLAH HARI YG JADI BEBAN	JUMLAH HARI YG JADI BELANJA DIBAYAR DIMUKA	BEBAN	BELANJA DIBAYAR DIMUKA
					TANGGAL AWAL ASURANSI	TANGGAL AKHIR ASURANSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13=5-12
	ASURANSI											
1	Kendaraan Roda 4 atau lebih			49.104.505,00							41.054.586,17	8.049.918,83
	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V AT DIESEL	2018	H 53	4.609.900,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	3.854.178,69	755.721,31
	NISSAN X-TRAIL 2.0 A/T	2016	H 1839 XG	4.588.835,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	3.836.566,97	752.268,03
	TOYOTA KIJANG INNOVA G	2013	H 9519 CZ	5.198.360,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	4.346.169,84	852.190,16
	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T	2015	H 1507 XG	3.613.880,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	3.021.440,66	592.439,34
	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T	2015	H 1508 XG	3.613.880,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	3.021.440,66	592.439,34
	TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.5 M/T	2014	H 9512 KZ	3.421.750,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	2.860.807,38	560.942,62
	TOYOTA KIJANG INNOVA E	2009	H 1804 XG	4.120.000,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	3.444.590,16	675.409,84
	TOYOTA KIJANG INNOVA E	2013	H 9513 DZ	4.467.500,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	3.735.122,95	732.377,05
	HONDA CIVIC ALL NEW 1.8 MT FD1	2007	H 9501 MR	4.581.650,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	3.830.559,84	751.090,16
	TOYOTA HILUX D-CABIN	2023	B-9631 PQW	10.888.750,00	01-Mar-24	01-Mar-25	31-Dec-24	366	306,00	60,00	9.103.709,02	1.785.040,98
												-
2	Kendaraan Roda 2 dan 3			-							-	-
							31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)	-	-
3	Gedung dan Bangunan			29.267.955,00							21.990.949,80	7.277.005,20
	A. SRONDOL			23.254.037,00							17.472.295,56	5.781.741,44
	Bangunan Gedung Sekretariat			5.158.565,00	01-Apr-24	01-Apr-25	31-Dec-24	366	275,00	91,00	3.875.970,97	1.282.594,03
	Bangunan Gedung Depo Barat			4.960.503,00	01-Apr-24	01-Apr-25	31-Dec-24	366	275,00	91,00	3.727.153,89	1.233.349,11
	Bangunan Gedung Depo Selatan			2.082.218,00	01-Apr-24	01-Apr-25	31-Dec-24	366	275,00	91,00	1.564.508,06	517.709,94
	Bangunan Gedung Eks KAD			1.104.073,00	01-Apr-24	01-Apr-25	31-Dec-24	366	275,00	91,00	829.563,05	274.509,95
	Inventaris Kantor Dinas			9.948.678,00	01-Apr-24	01-Apr-25	31-Dec-24	366	275,00	91,00	7.475.099,59	2.473.578,41
	B. SRIWIJAYA			6.013.918,00							4.518.654,24	1.495.263,76
	Bangunan Gedung A Perpustakaan			2.593.863,00	01-Apr-24	01-Apr-25	31-Dec-24	366	275,00	91,00	1.948.940,78	644.922,22
	Bangunan Gedung B Perpustakaan			3.420.055,00	01-Apr-24	01-Apr-25	31-Dec-24	366	275,00	91,00	2.569.713,46	850.341,54
4	Barang Milik Daerah Lainnya			-							-	-
							31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)	-	-
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS			-							-	-
							31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)	-	-
							31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)	-	-
							31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)	-	-
6	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS			-							-	-
							31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)	-	-
7	Belanja Premi Asuransi Pensiun Non PNS			-							-	-
							31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)	-	-
8	Belanja Premi Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter			-							-	-
							31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)	-	-
	JUMLAH ASURANSI			78.372.460,00							63.045.535,97	15.326.924,03

	SEWA											
1	Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung			-							-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			-							-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
3	Belanja Sewa Alat Berat			-							-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
4	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor			-							-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
						31-Dec-23	1	45.292,00	(45.291,00)		-	-
	JUMLAH SEWA			-							-	-
	JUMLAH ASURANSI DAN SEWA			78.372.460,00							63.045.535,97	15.326.924,03

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ARPUS
DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. M.Si
NIP. 19720502 199303 1 008



MUTASI PERSEDIAAN
Tahun 2024
Periode s/d Bulan DESEMBER 2024
Kode Lokasi : 02Z401
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.	Uraian	SALDO AWAL		PENAMBAHAN														PELEPASAN										SALDO AKHIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Tahun 2024		Jml.	Belanja Barang	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Barang Hasil Produksi	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Penggunaan	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Kadaluwarsa	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Jml.	Harga																																	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.	Jml.

Mengetahui
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ARPUS
DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. M.Si
NIP. 19700502 199903 1 008

Semarang, 31 Desember 2024

Pengurus Barang

SUNGADI

NIP. 19670918 198902 1 001



MUTASI PERSEDIAAN

Tahun 2024

Periode s/d Bulan DESEMBER 2024

Kode Lokasi : 022401

Bidang :

Sub Bidang :

Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.	Uraian	SALDO AWAL		PENAMBAHAN										PELEPASAN										SALDO AKHIR											
		Tahun 2024		Jml.	Belanja Barang	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Barang Hasil Produksi	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Penggunaan	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Kadaluwarsa	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
		Jml.	Harga																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																
1	1.1.7.01.01.01 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1.1.7.01.01.02 BAHAN KIMIA	-	-	20	6.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1.1.7.01.01.03 BAHAN PELEDAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1.1.7.01.01.04 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1.1.7.01.01.05 BAHAN BAKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	1.1.7.01.01.06 BAHAN KIMIA NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1.1.7.01.01.07 BARANG DALAM PROSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	1.1.7.01.01.08 BAHAN/BIBIT TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1.1.7.01.01.09 ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	-	24	3.829.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	1.1.7.01.01.10 ISI TABUNG GAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	1.1.7.01.01.11 BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	1.1.7.01.01.12 BAHAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	1.1.7.01.02.01 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	1.1.7.01.02.02 SUKU CADANG ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	1.1.7.01.02.03 SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	1.1.7.01.02.04 SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	1.1.7.01.02.05 SUKU CADANG ALAT PEMANCAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	1.1.7.01.02.06 SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	1.1.7.01.02.07 SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	1.1.7.01.02.08 SUKU CADANG ALAT BENGKEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	1.1.7.01.02.09 SUKU CADANG ALAT PERSENIATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	1.1.7.01.02.10 PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	1.1.7.01.02.11 SUKU CADANG LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	1.1.7.01.03.01 ALAT TULIS KANTOR	1.265	35.472.500,00	26.951	315.368.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.951	315.368.740,00	28.065	343.095.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.065	343.095.940,00	151	7.745.300,00		
25	1.1.7.01.03.02 KERTAS DAN COVER	523	5.699.000,00	6.500	102.060.919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500	102.060.919,00	7.008	107.045.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.008	107.045.844,00	15	714.075,00		
26	1.1.7.01.03.03 BAHAN CETAK	4	2.628.000,00	150	19.572.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150	19.572.820,00	154	22.200.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	22.200.820,00	-	-		
27	1.1.7.01.03.04 BENDA POS	-	-	360	3.601.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	360	3.601.000,00	360	3.601.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	3.601.000,00	-	-		
28	1.1.7.01.03.05 PERSEDIAAN DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	1.1.7.01.03.06 BAHAN KOMPUTER	11	2.120.000,00	222	41.531.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	222	41.531.230,00	233	43.651.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	43.651.230,00	-	-		
30	1.1.7.01.03.07 PERABOT KANTOR	-	-	327	19.652.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	327	19.652.400,00	327	19.652.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	19.652.400,00	-	-		
31	1.1.7.01.03.08 ALAT LISTRIK	-	-	633	30.761.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	633	30.761.000,00	633	30.761.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633	30.761.000,00	-	-		
32	1.1.7.01.03.09 PERLENGKAPAN DINAS	-	-	197	85.862.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	197	85.862.500,00	197	85.862.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	85.862.500,00	-	-		
33	1.1.7.01.03.10 KAPORLAP DAN PERLENGKAPAN SATWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	1.1.7.01.03.11 PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	-	-	62	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62	2.000.000,00	62	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	2.000.000,00	-	-		
35	1.1.7.01.03.12 SUVENIR/CENDERA MATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	1.1.7.01.03.13 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	-	-	91	13.095.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	91	13.095.000,00	91	13.095.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	13.095.000,00	-	-		
37	1.1.7.01.04.01 OBAT	-	-	1	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000,00	1	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000,00	-	-		
38	1.1.7.01.04.02 OBAT-OBATAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	1.1.7.01.05.01 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	-	-	120	366.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120	366.000.000,00	-	120	366.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	366.000.000,00	-	-		
40	1.1.7.01.05.02 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	-	-	90.000	8.145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	8.145.000.000,00	-	90.000	8.145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	8.145.000.000,00	-	-		
41	1.1.7.01.06.01 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	1.1.7.01.06.02 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	1.1.7.01.07.01 NATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	1.1.7.01.07.02 PAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	1.1.7.01.07.03 NATURA DAN PAKAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	1.1.7.01.08.01 PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		



MUTASI PERSEDIAAN

Tahun 2024
Periode s/d Bulan DESEMBER 2024

Kode Lokasi : 022401
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

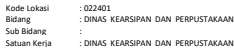
No.	Uraian	SALDO AWAL		PENAMBAHAN														PELEPASAN											SALDO AKHIR						
		Tahun 2024		Jml.	Belanja Barang	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Barang Hasil Produk	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Koreksi I	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Penggunaan	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Kadaluarsa	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
		Jml.	Harga																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
1	1.1.7.01.01.02.001 - 0100000021661	-	-	4	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	180.000,00	4	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	180.000,00	-	-
2	1.1.7.01.01.02.001 - 0100000079140	-	-	9	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4.500.000,00	9	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4.500.000,00	-	-
3	1.1.7.01.01.02.001 - 0100000085491	-	-	6	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.800.000,00	6	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.800.000,00	-	-
4	1.1.7.01.01.02.002 - 0100000022082	-	-	1	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000,00	1	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000,00	-	-
5	1.1.7.01.01.09.001 - 010000002358	-	-	12	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.650.000,00	12	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.650.000,00	-	-
6	1.1.7.01.01.09.001 - 010000008437	-	-	11	1.952.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.952.500,00	11	1.952.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.952.500,00	-	-
7	1.1.7.01.01.09.001 - 0100000084647	-	-	1	227.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	227.000,00	1	227.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	227.000,00	-	-
8	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000005	-	-	20	520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	520.000,00	20	520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	520.000,00	-	-
9	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000012	5	125.000,00	5	89.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	89.000,00	10	214.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	214.000,00	-	-
10	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000016	10	50.000,00	150	3.659.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	3.659.000,00	160	3.709.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	3.709.000,00	-	-
11	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000019	-	-	4	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.000,00	4	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.000,00	-	-
12	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000035	-	-	1	196.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	196.000,00	1	196.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	196.000,00	-	-
13	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000000110	-	-	54	929.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	929.000,00	54	929.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	929.000,00	-	-
14	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000000111	-	-	2	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.000,00	2	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.000,00	-	-
15	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000000112	-	-	47	1.356.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	1.356.000,00	39	1.092.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	1.092.000,00	8	264.000,00
16	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000000113	-	-	7	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	350.000,00	-	-
17	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000035	-	-	69	387.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	387.500,00	62	275.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	275.500,00	7	112.000,00
18	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000854	3	69.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	69.000,00	3	69.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	69.000,00	-	-
19	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000858	5	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	75.000,00	5	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	75.000,00	-	-
20	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000904	3	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45.000,00	3	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45.000,00	-	-
21	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000905	1	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000,00	1	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000,00	-	-
22	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000908	2	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30.000,00	2	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30.000,00	-	-
23	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000914	-	-	100	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	260.000,00	100	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	260.000,00	-	-
24	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000130	-	-	3	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24.000,00	3	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24.000,00	-	-
25	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000001373	-	-	69	1.216.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	1.216.500,00	69	1.216.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	1.216.500,00	-	-
26	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000001768	13	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	65.000,00	13	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	65.000,00	-	-
27	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000181	-	-	1	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	219.000,00	1	219.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	219.000,00	-	-
28	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000000202	-	-	122	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	2.400.000,00	122	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	2.400.000,00	-	-
29	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000002095	-	-	170	1.224.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	1.224.000,00	170	1.224.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	1.224.000,00	-	-
30	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000002178	-	-	132	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	800.000,00	132	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	800.000,00	-	-
31	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000002469	-	-	21	105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	105.000,00	10	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	50.000,00	11	55.000,00
32	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000002518	8	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	240.000,00	8	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	240.000,00	-	-
33	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000002621	19	1.083.000,00	9	513.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	513.000,00	28	1.596.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1.596.000,00	-	-
34	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000002623	6	780.000,00	80	8.967.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	8.967.250,00	86	9.747.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	9.747.250,00	-	-
35	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000002627	-	-	10	416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	416.000,00	10	416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	416.000,00	-	-
36	1.1.7.01.03.01.001 - 01000000002628	-	-	65	2.525.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
91	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003202	ALAT TULIS - PENGGARIS MIKA 50 CM	-	-	3	42.000,00	-	-	-	3	42.000,00	3	42.000,00	-	-	-	3	42.000,00	-	-	
92	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003309	ALAT TULIS - ISI BOLPOINT	10	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	
93	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003328	ALAT TULIS - SPIDOL WHITE BOARD WARNA	4	46.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4	46.000,00	-	-	-	4	46.000,00	-	-	
94	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003372	ALAT TULIS - KERTAS DOORSLAG FOLIO	-	-	9	360.000,00	-	-	-	9	360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9	360.000,00	
95	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003792	ALAT TULIS - ODMER	-	-	20	500.000,00	-	-	-	20	500.000,00	20	500.000,00	-	-	-	20	500.000,00	-	-	
96	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003796	ALAT TULIS - AMPLOP PANJANG	-	-	2	32.000,00	-	-	-	2	32.000,00	2	32.000,00	-	-	-	2	32.000,00	-	-	
97	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003901	ALAT TULIS - KERTAS BUFFALO	-	-	20	24.000,00	-	-	-	20	24.000,00	20	24.000,00	-	-	-	20	24.000,00	-	-	
98	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003944	ALAT TULIS - KERTAS PEMBATAS	-	-	1	350.000,00	-	-	-	1	350.000,00	1	350.000,00	-	-	-	1	350.000,00	-	-	
99	1.1.7.01.03.01.001 - 010000003976	ALAT TULIS - STOP MAP FOLIO KERTAS	-	-	180	540.000,00	-	-	-	180	540.000,00	180	540.000,00	-	-	-	180	540.000,00	-	-	
100	1.1.7.01.03.01.001 - 010000004068	ALAT TULIS - STICK NOTES	-	-	10	214.500,00	-	-	-	10	214.500,00	10	214.500,00	-	-	-	10	214.500,00	-	-	
101	1.1.7.01.03.01.001 - 010000004176	ALAT TULIS - SPIDOL PERMANEN	-	-	3	331.000,00	-	-	-	3	331.000,00	3	331.000,00	-	-	-	3	331.000,00	-	-	
102	1.1.7.01.03.01.001 - 010000004501	ALAT TULIS - KERTAS SERPIKAT PUTHI	-	-	1	120.000,00	-	-	-	1	120.000,00	1	120.000,00	-	-	-	1	120.000,00	-	-	
103	1.1.7.01.03.01.001 - 010000004524	ALAT TULIS - BOLPOINT MEJA	3	597.000,00	-	-	-	-	-	3	597.000,00	3	597.000,00	-	-	-	3	597.000,00	-	-	
104	1.1.7.01.03.01.001 - 010000004751	ALAT TULIS - BOLPOINT JOYKO	-	-	50	400.000,00	-	-	-	50	400.000,00	50	400.000,00	-	-	-	50	400.000,00	-	-	
105	1.1.7.01.03.01.001 - 010000005215	ALAT TULIS - LAKBAN	2	30.000,00	-	-	-	-	-	2	30.000,00	2	30.000,00	-	-	-	2	30.000,00	-	-	
106	1.1.7.01.03.01.001 - 010000005407	ALAT TULIS - KERTAS BURAM	-	-	15	450.000,00	-	-	-	15	450.000,00	10	300.000,00	-	-	-	10	300.000,00	5	150.000,00	
107	1.1.7.01.03.01.001 - 010000005433	ALAT TULIS - KERTAS HVS F4 70 GRAM MERK PAPER ONE	-	-	102	5.100.000,00	-	-	-	102	5.100.000,00	102	5.100.000,00	-	-	-	102	5.100.000,00	-	-	
108	1.1.7.01.03.01.001 - 010000005665	ALAT TULIS - BOX PENYIMPANAN BESAR	-	-	3	600.000,00	-	-	-	3	600.000,00	3	600.000,00	-	-	-	3	600.000,00	-	-	
109	1.1.7.01.03.01.001 - 010000005756	ALAT TULIS - KERTAS HVS F4 70 GRAM PAPER ONE	-	-	6	300.000,00	-	-	-	6	300.000,00	6	300.000,00	-	-	-	6	300.000,00	-	-	
110	1.1.7.01.03.01.001 - 010000006272	ALAT TULIS - SPIDOL KECIL	-	-	103	103.000,00	-	-	-	103	103.000,00	103	103.000,00	-	-	-	103	103.000,00	-	-	
111	1.1.7.01.03.01.001 - 010000006308	ALAT TULIS - BOLPOINT HITAM	-	-	80	720.000,00	-	-	-	80	720.000,00	80	720.000,00	-	-	-	80	720.000,00	-	-	
112	1.1.7.01.03.01.001 - 010000006652	ALAT TULIS - FLASHDISK SANDISK ORIGINAL 16 GB	-	-	2	200.000,00	-	-	-	2	200.000,00	2	200.000,00	-	-	-	2	200.000,00	-	-	
113	1.1.7.01.03.01.001 - 010000006702	ALAT TULIS - BALLPOINT STANDAR AE7	-	-	89	222.500,00	-	-	-	89	222.500,00	89	222.500,00	-	-	-	89	222.500,00	-	-	
114	1.1.7.01.03.01.001 - 010000006798	ALAT TULIS - KARET PENGHAPUS / STIP	-	-	4	10.400,00	-	-	-	4	10.400,00	4	10.400,00	-	-	-	4	10.400,00	-	-	
115	1.1.7.01.03.01.001 - 010000006918	ALAT TULIS - PENGHAPUS PENSLI	30	150.000,00	24	240.000,00	-	-	-	24	240.000,00	54	390.000,00	-	-	-	54	390.000,00	-	-	
116	1.1.7.01.03.01.001 - 010000007026	ALAT TULIS - BALLPOINT BALLNER	-	-	5	100.000,00	-	-	-	5	100.000,00	5	100.000,00	-	-	-	5	100.000,00	-	-	
117	1.1.7.01.03.01.001 - 0100000073662	ALAT TULIS - PORTEPEL	3	54.000,00	-	-	-	-	-	3	54.000,00	3	54.000,00	-	-	-	3	54.000,00	-	-	
118	1.1.7.01.03.01.001 - 010000007804	ALAT TULIS - PAPER CLIP NO. 1	-	-	11	110.000,00	-	-	-	11	110.000,00	11	110.000,00	-	-	-	11	110.000,00	-	-	
119	1.1.7.01.03.01.001 - 010000008818	ALAT TULIS - PULPEN STANDARD AE7 HITAM	-	-	16	32.000,00	-	-	-	16	32.000,00	16	32.000,00	-	-	-	16	32.000,00	-	-	
120	1.1.7.01.03.01.001 - 010000008823	ALAT TULIS - KERTAS HVS F4 70 GRM SIDI	-	-	37	2.035.000,00	-	-	-	37	2.035.000,00	37	2.035.000,00	-	-	-	37	2.035.000,00	-	-	
121	1.1.7.01.03.01.001 - 010000009332	ALAT TULIS - FIGURA	-	-	12	1.500.000,00	-	-	-	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	-	-	-	12	1.500.000,00	-	-	
122	1.1.7.01.03.01.001 - 010000009859	ALAT TULIS - BOLPOINT SNOWMAN	-	-	32	194.000,00	-	-	-	32	194.000,00	32	194.000,00	-	-	-	32	194.000,00	-	-	
123	1.1.7.01.03.01.001 - 2032796901009	ALAT TULIS - FILE BOX	-	-	2	72.000,00	-	-	-	2	72.000,00	2	72.000,00	-	-	-	2	72.000,00	-	-	
124	1.1.7.01.03.01.001 - 4970129704027	ALAT TULIS - BALLPOINT PEN SNOWMAN	-	-	20	70.000,00	-	-	-	20	70.000,00	20	70.000,00	-	-	-	20	70.000,00	-	-	
125	1.1.7.01.03.01.001 - 4970129727538	ALAT TULIS - SPIDOL WHITE BOARD	-	-	2	220.000,00	-	-	-	2	220.000,00	2	220.000,00	-	-	-	2	220.000,00	-	-	
126	1.1.7.01.03.01.001 - 6932124725009	ALAT TULIS - PAPER CLIPS NO.5	-	-	20	1.100.000,00	-	-	-	20	1.100.000,00	20	1.100.000,00	-	-	-	20	1.100.000,00	-	-	
127	1.1.7.01.03.01.001 - 6959878800880	ALAT TULIS - STABLO	-	-	1	96.000,00	-	-	-	1	96.000,00	1	96.000,00	-	-	-	1	96.000,00	-	-	
128	1.1.7.01.03.01.001 - 8993201890162	ALAT TULIS - GUNTING BESAR	2	50.000,00	-	-	-	-	-	2	50.000,00	2	50.000,00	-	-	-	2	50.000,00	-	-	
129	1.1.7.01.03.01.001 - 8993988247555	ALAT TULIS - MEMO STICK JOYCO MMS-1	-	-	25	875.000,00	-	-	-	25	875.000,00	25	875.000,00	-	-	-	25	875.000,00	-	-	
130	1.1.7.01.03.01.002 - 010000007800	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL - CARTRIDGE DESKJET HITAM	2	640.000,00	3	750.000,00	-	-	-	3	750.000,00	5	1.390.000,00	-	-	-	5	1.390.000,00	-	-	
131	1.1.7.01.03.01.003 - 010000000040	PENIEPT KERTAS - PAPER CLIPS	-	-	50	750.000,00	-	-	-	50	750.000,00	50	750.000,00	-	-	-	50	750.000,00	-	-	
132	1.1.7.01.03.01.003 - 010000000198	PENIEPT KERTAS - BINDER CLIPS	4	32.000,00	21	1.000.300,00	-	-	-	21	1.000.300,00	25	1.032.300,00	-	-	-	25	1.032.300,00	-	-	
133	1.1.7.01.03.01.003 - 010000000795	PENIEPT KERTAS - PAPER CLIP NO. 03	-	-	2	60.000,00	-	-	-	2	60.000,00	2	60.000,00	-	-	-	2	60.000,00	-	-	
134	1.1.7.01.03.01.003 - 010000001435	PENIEPT KERTAS - BINDER CLIPS 260/51 MM	-	-	2	98.000,00	-	-	-	2	98.000,00	2	98.000,00	-	-	-	2	98.000,00	-	-	
135	1.1.7.01.03.01.003 - 010000001572	PENIEPT KERTAS - ATOM KLIP NO.3	-	-	13	23.140,00	-	-	-	13	23.140,00	13	23.140,00	-	-	-	13	23.140,00	-	-	
136	1.1.7.01.03.01.003 - 010000001604	PENIEPT KERTAS - PAPER KLIP ATOM NO.3	7	14.000,00	60	1.436.000,00	-	-	-	60	1.436.000,00	67	1.450.000,00	-	-	-	67	1.450.000,00	-	-	
137	1.1.7.01.03.01.003 - 0100000062739	PENIEPT KERTAS - BINDER CLIPS NO. 280	-	-	1	48.000,00	-	-	-	1	48.000,00	1	48.000,00	-	-	-	1	48.000,00	-	-	
138	1.1.7.01.03.01.003 - 010000006716	PENIEPT KERTAS - PAPER KLIP NO.5	-	-	40	2.200.000,00	-	-	-	40	2.200.000,00	40	2.200.000,00	-	-	-	40	2.200.000,00	-	-	
139	1.1.7.01.03.01.003 - 0100000073363	PENIEPT KERTAS - KLIP ATOM	15	30.000,00	30	60.000,00	-	-	-	30	60.000,00	45	90.000,00	-	-	-	45	90.000,00	-	-	
140	1.1.7.01.03.01.004 - 00751362	PENGHAPUS/KOREKTOR - PENGHAPUS LIMAR	1	3.000,00	-	-	-	-	-	1	3.000,00	-	-	-	-	-	1	3.000,00	-	-	
141	1.1.7.01.03.01.004 - 0100000000876	PENGHAPUS/KOREKTOR - PENGHAPUS CAIR (BOS)	-	-	4	60.000,00	-	-	-	4	60.000,00	4	60.000,00	-	-	-	4	60.000,00	-	-	
142	1.1.7.01.03.01.004 - 0100000002442	PENGHAPUS/KOREKTOR -	-	-	5	27.000,00	-	-	-	5	27.000,00	5	27.000,00	-	-	-	5	27.000,00	-	-	
143	1.1.7.01.03.01.004 - 010000001171	PENGHAPUS/KOREKTOR - TIPEX	-	-	5	75.000,00	-	-	-	5	75.000,00	-	-	-	-	-	-	5	75.000,00	-	-
144	1.1.7.01.03.01.004 - 010000001323	PENGHAPUS/KOREKTOR - STIP STAEDLER	-	-	48	48.000,00	-	-	-	48	48.000,00	48	48.000,00	-	-	-	48	48.000,00	-	-	
145	1.1.7.01.03.01.004 - 010000003129	PENGHAPUS/KOREKTOR - CORRECTION TAPE	-	-	4	32.000,00	-	-	-	4	32.000,00	4	32.000,00	-	-	-	4	32.000,00	-	-	
146	1.1.7.01.03.01.004 - 0100000065123	PENGHAPUS/KOREKTOR - PENGHAPUS	-	-	5	27.000,00	-	-	-	5	27.000,00	5	27.000,00	-	-	-	5	27.000,00	-	-	
147	1.1.7.01.03.01.004 - 010000007879	PENGHAPUS/KOREKTOR - SETIP	-	-	22	103.000,00	-	-	-	22	103.000,00	22	103.000,00	-	-	-	22	103.000,00	-	-	
148	1.1.7.01.03.01.004 - 010000009973	PENGHAPUS/KOREKTOR - PENGHAPUS CAIR STABLO	-	-	2	30.000,00	-	-	-	2	30.000,00	2	30.000,00	-	-	-	2	30.000,00	-	-	
149	1.1.7.01.03.01.004 - 8994311101056	PENGHAPUS/KOREKTOR - KENKO TIP-X FN 301	-	-	10	67.500,00	-	-	-	10	67.500,00	10	67.500,00	-	-	-	10	67.500,00	-	-	
150	1.1.7.01.03.01.005 - 010000000026	BUKU TULIS - BUKU EKSPEDISI	3	31.500,00	14	560.000,00	-	-	-	14	560.000,00	17	591.500,00	-	-	-	17	591.500,00	-	-	
151	1.1.7.01.03.01.005 - 010000000																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
190	1.1.7.01.03.01.010 - 010000000757	ALAT PEREKAT - LEM AIBON	-	-	2	350.000,00	-	-	-	2	350.000,00	2	350.000,00	-	-	-	2	350.000,00	-	-
191	1.1.7.01.03.01.010 - 0100000001469	ALAT PEREKAT - ISOLASI DOUBLE TAPE 1"	-	-	5	75.000,00	-	-	-	5	75.000,00	5	75.000,00	-	-	-	5	75.000,00	-	-
192	1.1.7.01.03.01.010 - 0100000001821	ALAT PEREKAT - LAKBAN BENING 2"	-	-	11	143.000,00	-	-	-	11	143.000,00	11	143.000,00	-	-	-	11	143.000,00	-	-
193	1.1.7.01.03.01.010 - 0100000002586	ALAT PEREKAT - LEM KERTAS	-	-	70	280.000,00	-	-	-	70	280.000,00	54	216.000,00	-	-	-	54	216.000,00	16	64.000,00
194	1.1.7.01.03.01.010 - 0100000002591	ALAT PEREKAT - LEM FOX PUTIH	-	-	4	1.000.000,00	-	-	-	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	-	-	-	4	1.000.000,00	-	-
195	1.1.7.01.03.01.010 - 0100000002607	ALAT PEREKAT - LEM TEMBAK	-	-	24	78.000,00	-	-	-	24	78.000,00	24	78.000,00	-	-	-	24	78.000,00	-	-
196	1.1.7.01.03.01.010 - 0100000007634	ALAT PEREKAT - LEM KERTAS CAIR	-	-	5	32.500,00	-	-	-	5	32.500,00	5	32.500,00	-	-	-	5	32.500,00	-	-
197	1.1.7.01.03.01.010 - 0100000007876	ALAT PEREKAT - LEM KERTAS	-	-	20	80.000,00	-	-	-	20	80.000,00	20	80.000,00	-	-	-	20	80.000,00	-	-
198	1.1.7.01.03.01.010 - 8994397000021	ALAT PEREKAT - LEM FOX PUTIH	-	-	8	182.000,00	-	-	-	8	182.000,00	8	182.000,00	-	-	-	8	182.000,00	-	-
199	1.1.7.01.03.01.010 - 8999998020218	ALAT PEREKAT - ISOLASI HITAM KECIL	-	-	3	18.000,00	-	-	-	3	18.000,00	3	18.000,00	-	-	-	3	18.000,00	-	-
200	1.1.7.01.03.01.011 - 0100000000349	STADLER HD - STAPLER HD 10 (STAPLES KECIL)	-	-	5	80.000,00	-	-	-	5	80.000,00	5	80.000,00	-	-	-	5	80.000,00	-	-
201	1.1.7.01.03.01.011 - 0100000002962	STADLER HD - STAPLER HD 50 (STAPLES BESAR)	-	-	4	140.000,00	-	-	-	4	140.000,00	4	140.000,00	-	-	-	4	140.000,00	-	-
202	1.1.7.01.03.01.012 - 0100000000071	STAPLES - STAPLES KECIL	-	-	2	70.000,00	-	-	-	2	70.000,00	2	70.000,00	-	-	-	2	70.000,00	-	-
203	1.1.7.01.03.01.012 - 0100000000083	STAPLES - STAPLER HD 10 (BOS)	-	-	3	48.000,00	-	-	-	3	48.000,00	3	48.000,00	-	-	-	3	48.000,00	-	-
204	1.1.7.01.03.01.012 - 0100000000552	STAPLES - STAPLER NO.369	-	-	10	650.000,00	-	-	-	10	650.000,00	3	195.000,00	-	-	-	3	195.000,00	7	455.000,00
205	1.1.7.01.03.01.012 - 0100000000625	STAPLES - STAPLER NO.10	-	-	5	125.000,00	-	-	-	5	125.000,00	5	125.000,00	-	-	-	5	125.000,00	-	-
206	1.1.7.01.03.01.012 - 0100000001295	STAPLES - STAPLES KECIL HD. 10	-	-	14	247.200,00	-	-	-	14	247.200,00	14	247.200,00	-	-	-	14	247.200,00	-	-
207	1.1.7.01.03.01.012 - 01000000016946	STAPLES - STAPLER MAX HD-100	1	19.000,00	-	-	-	-	-	1	19.000,00	1	19.000,00	-	-	-	1	19.000,00	-	-
208	1.1.7.01.03.01.012 - 01000000007540	STAPLES - STAPLES JIUD TANGGUNG	-	-	2	70.000,00	-	-	-	2	70.000,00	2	70.000,00	-	-	-	2	70.000,00	-	-
209	1.1.7.01.03.01.012 - 0100000008832	STAPLES - STAPLER KECIL	-	-	2	42.000,00	-	-	-	2	42.000,00	2	42.000,00	-	-	-	2	42.000,00	-	-
210	1.1.7.01.03.01.012 - 4902870775711	STAPLES - STAPLER MAX HD 10	-	-	11	192.500,00	-	-	-	11	192.500,00	11	192.500,00	-	-	-	11	192.500,00	-	-
211	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000000072	ISI STAPLES - ISI STAPLES BESAR	-	-	10	223.000,00	-	-	-	10	223.000,00	10	223.000,00	-	-	-	10	223.000,00	-	-
212	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000000073	ISI STAPLES - ISI STAPLES KECIL	9	192.000,00	22	370.000,00	-	-	-	22	370.000,00	28	502.000,00	-	-	-	28	502.000,00	3	60.000,00
213	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000000985	ISI STAPLES - ISI STAPLES NO.10 (BOP)	-	-	3	30.000,00	-	-	-	3	30.000,00	3	30.000,00	-	-	-	3	30.000,00	-	-
214	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000002175	ISI STAPLES - ISI STAPLER NO. 369	-	-	4	120.000,00	-	-	-	4	120.000,00	4	120.000,00	-	-	-	4	120.000,00	-	-
215	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000002176	ISI STAPLES - ISI STAPLES NO. 10	10	55.500,00	16	380.000,00	-	-	-	16	380.000,00	26	435.500,00	-	-	-	26	435.500,00	-	-
216	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000000550	ISI STAPLES - ISI STAPLES BESAR NO. 369	-	-	8	240.000,00	-	-	-	8	240.000,00	3	90.000,00	-	-	-	3	90.000,00	5	150.000,00
217	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000001293	ISI STAPLES - ISI STAPLES KECIL NO. 10	-	-	24	600.000,00	-	-	-	24	600.000,00	22	550.000,00	-	-	-	22	550.000,00	2	50.000,00
218	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000003039	ISI STAPLES - ISI STAPLER NO 10	-	-	10	30.000,00	-	-	-	10	30.000,00	10	30.000,00	-	-	-	10	30.000,00	-	-
219	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000004434	ISI STAPLES - ISI STAPLES BESAR	-	-	10	102.000,00	-	-	-	10	102.000,00	10	102.000,00	-	-	-	10	102.000,00	-	-
220	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000004692	ISI STAPLES - ISI STAPLES MAX HD 10	-	-	2	50.000,00	-	-	-	2	50.000,00	2	50.000,00	-	-	-	2	50.000,00	-	-
221	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000007072	ISI STAPLES - ISI STAPLER BESAR 12/10	-	-	2	44.000,00	-	-	-	2	44.000,00	2	44.000,00	-	-	-	2	44.000,00	-	-
222	1.1.7.01.03.01.013 - 0100000009606	ISI STAPLES - ISI STAPLER HD NO 10 (KECIL)	-	-	4	64.000,00	-	-	-	4	64.000,00	4	64.000,00	-	-	-	4	64.000,00	-	-
223	1.1.7.01.03.01.013 - 49028707729141	ISI STAPLES - STAPLER MAX HD 10	-	-	18	358.200,00	-	-	-	18	358.200,00	18	358.200,00	-	-	-	18	358.200,00	-	-
224	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000000030	BARANG CETAKAN - PENGKANDAAAN	-	-	1	500.000,00	-	-	-	1	500.000,00	1	500.000,00	-	-	-	1	500.000,00	-	-
225	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000000060	BARANG CETAKAN - CETAK LEMBAR DISPOSISI	-	-	2	400.000,00	-	-	-	2	400.000,00	2	400.000,00	-	-	-	2	400.000,00	-	-
226	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000002357	BARANG CETAKAN - CETAK BROSUR	-	-	1.301	10.250.000,00	-	-	-	1.301	10.250.000,00	1.301	10.250.000,00	-	-	-	1.301	10.250.000,00	-	-
227	1.1.7.01.03.01.014 - 0100000000568	BARANG CETAKAN - PIKAT	-	-	17	5.100.000,00	-	-	-	17	5.100.000,00	17	5.100.000,00	-	-	-	17	5.100.000,00	12	3.600.000,00
228	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000013180	BARANG CETAKAN - SEKAT ARSIP	520	5.600.000,00	372	4.154.000,00	-	-	-	372	4.154.000,00	892	9.754.000,00	-	-	-	892	9.754.000,00	-	-
229	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000013206	BARANG CETAKAN - LABEL KARTU	-	-	400	400.000,00	-	-	-	400	400.000,00	400	400.000,00	-	-	-	400	400.000,00	-	-
230	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000013328	BARANG CETAKAN - CETAK SERTIFIKAT	-	-	80	800.000,00	-	-	-	80	800.000,00	80	800.000,00	-	-	-	80	800.000,00	-	-
231	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000013350	BARANG CETAKAN - SPANDUK	-	-	2	700.000,00	-	-	-	2	700.000,00	2	700.000,00	-	-	-	2	700.000,00	-	-
232	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000013431	BARANG CETAKAN - BUKU LAPORAN	-	-	362	18.940.000,00	-	-	-	362	18.940.000,00	356	18.640.000,00	-	-	-	356	18.640.000,00	6	300.000,00
233	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000016793	BARANG CETAKAN - LEMAR ET	-	-	4	1.800.000,00	-	-	-	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	-	-	-	4	1.800.000,00	-	-
234	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000017144	BARANG CETAKAN - CETAK BANNER	-	-	4	910.000,00	-	-	-	4	910.000,00	4	910.000,00	-	-	-	4	910.000,00	-	-
235	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000017191	BARANG CETAKAN - CETAK FOTO	-	-	203	3.500.000,00	-	-	-	203	3.500.000,00	203	3.500.000,00	-	-	-	203	3.500.000,00	-	-
236	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000017192	BARANG CETAKAN - ID CARD	-	-	240	1.920.000,00	-	-	-	240	1.920.000,00	240	1.920.000,00	-	-	-	240	1.920.000,00	-	-
237	1.1.7.01.03.01.014 - 0100000001882	BARANG CETAKAN - BUKU PEDOMAN MODULIMS	-	-	240	12.000.000,00	-	-	-	240	12.000.000,00	240	12.000.000,00	-	-	-	240	12.000.000,00	-	-
238	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000020336	BARANG CETAKAN - CETAK KATALOG	-	-	2	25.000.000,00	-	-	-	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	-	-	-	2	25.000.000,00	-	-
239	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000021251	BARANG CETAKAN - MODUL PERMAINAN (ULAR TANGGA)	2	2.243.000,00	-	-	-	-	-	2	2.243.000,00	2	2.243.000,00	-	-	-	2	2.243.000,00	-	-
240	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000021588	BARANG CETAKAN - BULETIN TOSS TBC	-	-	200	15.000.000,00	-	-	-	200	15.000.000,00	200	15.000.000,00	-	-	-	200	15.000.000,00	-	-
241	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000022184	BARANG CETAKAN - CETAK MMT	-	-	23	10.900.000,00	-	-	-	23	10.900.000,00	23	10.900.000,00	-	-	-	23	10.900.000,00	-	-
242	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000022187	BARANG CETAKAN - BUKU PANDUAN/ IUKLAK	-	-	100	5.000.000,00	-	-	-	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	-	-	-	100	5.000.000,00	-	-
243	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000022188	BARANG CETAKAN - CETAK SERTIFIKAT	-	-	123	615.000,00	-	-	-	123	615.000,00	123	615.000,00	-	-	-	123	615.000,00	-	-
244	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000023058	BARANG CETAKAN - TROPHY PIALA JUARA UMUM	15	13.740.000,00	30	15.000.000,00	-	-	-	30	15.000.000,00	45	28.740.000,00	-	-	-	45	28.740.000,00	-	-
245	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000027056	BARANG CETAKAN - MAP KERTAS LOGO	-	-	40	600.000,00	-	-	-	40	600.000,00	40	600.000,00	-	-	-	40	600.000,00	-	-
246	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000027065	BARANG CETAKAN - BUKU PROFILE	-	-	4	1.000.000,00	-	-	-	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	-	-	-	4	1.000.000,00	-	-
247	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000039130	BARANG CETAKAN - CETAK DOKUMEN	-	-	1	400.000,00	-	-	-	1	400.000,00	1	400.000,00	-	-	-	1	400.000,00	-	-
248	1.1.7.01.03.01.014 - 01000000041851	BARANG CETAKAN - STOPMAP KAIN MOTIF BATIK	36	180.000,00	-	-	-	-	-	36	180.000,00	36	180.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
292	1.1.7.01.03.02.002 - 010000002846	BERBAGAI KERTAS - KERTAS BURAM	-	-	14	412.950,00	-	-	-	14	412.950,00	9	266.475,00	-	-	-	9	266.475,00	5	146.475,00
293	1.1.7.01.03.02.002 - 0100000004132	BERBAGAI KERTAS - KERTAS FOTO	-	-	1	200.000,00	-	-	-	1	200.000,00	1	200.000,00	-	-	-	1	200.000,00	-	-
294	1.1.7.01.03.02.002 - 0100000006185	BERBAGAI KERTAS - KERTAS CASING	-	-	580	2.900.000,00	-	-	-	580	2.900.000,00	580	2.900.000,00	-	-	-	580	2.900.000,00	-	-
295	1.1.7.01.03.02.002 - 01000000064056	BERBAGAI KERTAS - KERTAS CASING	-	-	50	250.000,00	-	-	-	50	250.000,00	50	250.000,00	-	-	-	50	250.000,00	-	-
296	1.1.7.01.03.02.002 - 01000000728179	BERBAGAI KERTAS - MEMO BESAR	-	-	10	18.850,00	-	-	-	1	18.850,00	1	18.850,00	-	-	-	1	18.850,00	-	-
297	1.1.7.01.03.02.002 - 01000000072680	BERBAGAI KERTAS - MEMO KECIL	-	-	50	2.000.000,00	-	-	-	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	-	-	-	50	2.000.000,00	-	-
298	1.1.7.01.03.02.002 - 0100000007915	BERBAGAI KERTAS - KARBON FOLIO	-	-	24	1.773.600,00	-	-	-	24	1.773.600,00	24	1.773.600,00	-	-	-	24	1.773.600,00	-	-
299	1.1.7.01.03.02.002 - 01000000085489	BERBAGAI KERTAS - KERTAS STIKER BARCODE BIBLIOTHECA RFID	-	-	5	468.000,00	-	-	-	5	468.000,00	5	468.000,00	-	-	-	5	468.000,00	-	-
300	1.1.7.01.03.02.002 - 01000000085490	BERBAGAI KERTAS - TISSU JEPANG PEPER	-	-	6	47.700.000,00	-	-	-	6	47.700.000,00	6	47.700.000,00	-	-	-	6	47.700.000,00	-	-
301	1.1.7.01.03.02.002 - 0100000008900	BERBAGAI KERTAS - KERTAS SERTIFIKAT	-	-	2	240.000,00	-	-	-	2	240.000,00	2	240.000,00	-	-	-	2	240.000,00	-	-
302	1.1.7.01.03.02.002 - 899494101866	BERBAGAI KERTAS - KERTAS LABEL STIKER	-	-	10	360.000,00	-	-	-	10	360.000,00	10	360.000,00	-	-	-	10	360.000,00	-	-
303	1.1.7.01.03.02.003 - 01000000008263	KERTAS COVER - KERTAS COVER BUKALO WARNA	-	-	1	100.000,00	-	-	-	1	100.000,00	1	100.000,00	-	-	-	1	100.000,00	-	-
304	1.1.7.01.03.02.003 - 0100000004492	KERTAS COVER - KERTAS FOTO	-	-	401	600.000,00	-	-	-	401	600.000,00	401	600.000,00	-	-	-	401	600.000,00	-	-
305	1.1.7.01.03.02.004 - 01000000000447	AMPLOP - STOPMAP DINAS	-	-	592	3.420.000,00	-	-	-	592	3.420.000,00	592	3.420.000,00	-	-	-	592	3.420.000,00	-	-
306	1.1.7.01.03.02.004 - 01000000001173	AMPLOP - AMPLOP PANJANG	14	280.000,00	37	740.000,00	-	-	-	37	740.000,00	51	1.020.000,00	-	-	-	51	1.020.000,00	-	-
307	1.1.7.01.03.02.004 - 01000000002187	AMPLOP - AMPLOP	-	-	4.000	8.000.000,00	-	-	-	4.000	8.000.000,00	4.000	8.000.000,00	-	-	-	4.000	8.000.000,00	-	-
308	1.1.7.01.03.02.004 - 01000000007097	AMPLOP - AMPLOP DINAS BESAR	-	-	50	350.000,00	-	-	-	200	1.400.000,00	250	1.750.000,00	-	-	-	250	1.750.000,00	-	-
309	1.1.7.01.03.02.004 - 01000000010563	AMPLOP - AMPLOP DINAS KECIL	400	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400	1.600.000,00	-	-	-	400	1.600.000,00	-	-
310	1.1.7.01.03.02.004 - 0100000001576	AMPLOP - AMPLOP KABINET	-	-	4	90.000,00	-	-	-	4	90.000,00	4	90.000,00	-	-	-	4	90.000,00	-	-
311	1.1.7.01.03.02.004 - 0100000002128	AMPLOP - AMPLOP PANJANG	-	-	20	320.000,00	-	-	-	20	320.000,00	20	320.000,00	-	-	-	20	320.000,00	-	-
312	1.1.7.01.03.02.004 - 0100000003984	AMPLOP - AMPLOP FOLIO BERTALI	-	-	1	20.000,00	-	-	-	1	20.000,00	1	20.000,00	-	-	-	1	20.000,00	-	-
313	1.1.7.01.03.02.004 - 01000000009165	AMPLOP - AMPLOP PANJANG KABINET	-	-	8	192.000,00	-	-	-	8	192.000,00	8	192.000,00	-	-	-	8	192.000,00	-	-
314	1.1.7.01.03.03.002 - 01000000002096	TINTA CETAK - REFILL TONER LASER	-	-	3	2.030.000,00	-	-	-	3	2.030.000,00	3	2.030.000,00	-	-	-	3	2.030.000,00	-	-
315	1.1.7.01.03.03.002 - 01000000002158	TINTA CETAK - CATRIDGE PRINTER HITAM	-	-	39	4.950.000,00	-	-	-	39	4.950.000,00	39	4.950.000,00	-	-	-	39	4.950.000,00	-	-
316	1.1.7.01.03.03.002 - 0100000001388	TINTA CETAK - INK JET CARTRIDGE BLACK	4	2.628.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4	2.628.000,00	-	-	-	4	2.628.000,00	-	-
317	1.1.7.01.03.03.002 - 0100000001389	TINTA CETAK - REFILL TINTA	-	-	23	3.913.000,00	-	-	-	23	3.913.000,00	23	3.913.000,00	-	-	-	23	3.913.000,00	-	-
318	1.1.7.01.03.03.002 - 0100000001529	TINTA CETAK - CATRIDGE	-	-	14	4.774.820,00	-	-	-	14	4.774.820,00	14	4.774.820,00	-	-	-	14	4.774.820,00	-	-
319	1.1.7.01.03.03.002 - 01000000017787	TINTA CETAK - INK TANK PRINTER	-	-	21	525.000,00	-	-	-	21	525.000,00	21	525.000,00	-	-	-	21	525.000,00	-	-
320	1.1.7.01.03.03.002 - 01000000064041	TINTA CETAK - REFILL INK BULK BLACK	-	-	45	1.650.000,00	-	-	-	45	1.650.000,00	45	1.650.000,00	-	-	-	45	1.650.000,00	-	-
321	1.1.7.01.03.03.002 - 01000000065148	TINTA CETAK - TINTA EPSON BLACK 003	-	-	4	480.000,00	-	-	-	4	480.000,00	4	480.000,00	-	-	-	4	480.000,00	-	-
322	1.1.7.01.03.03.003 - 01000000000049	PLAT CETAK - AKRILIT	-	-	1	1.250.000,00	-	-	-	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	-	-	-	1	1.250.000,00	-	-
323	1.1.7.01.03.04.001 - 01000000016472	MATERAI - MATERAI 10.000	-	-	252	2.521.000,00	-	-	-	252	2.521.000,00	252	2.521.000,00	-	-	-	252	2.521.000,00	-	-
324	1.1.7.01.03.04.001 - 01000000017141	MATERAI - MATERAI 10000	-	-	108	1.080.000,00	-	-	-	108	1.080.000,00	108	1.080.000,00	-	-	-	108	1.080.000,00	-	-
325	1.1.7.01.03.06.003 - 01000000006060	PITA PRINTER - PITA DOTMETRIK	-	-	10	1.287.230,00	-	-	-	10	1.287.230,00	10	1.287.230,00	-	-	-	10	1.287.230,00	-	-
326	1.1.7.01.03.06.003 - 01000000024952	PITA PRINTER - RIBBON PRINTER	-	-	24	3.352.000,00	-	-	-	24	3.352.000,00	24	3.352.000,00	-	-	-	24	3.352.000,00	-	-
327	1.1.7.01.03.06.004 - 01000000000025	TINTA/TONER PRINTER - REFILL TINTA WARNA	-	-	35	5.100.000,00	-	-	-	35	5.100.000,00	35	5.100.000,00	-	-	-	35	5.100.000,00	-	-
328	1.1.7.01.03.06.004 - 01000000000094	TINTA/TONER PRINTER - TINTA EPSON L300	-	-	14	1.330.000,00	-	-	-	14	1.330.000,00	14	1.330.000,00	-	-	-	14	1.330.000,00	-	-
329	1.1.7.01.03.06.004 - 01000000000099	TINTA/TONER PRINTER - TONER PRINTER LASER JET	-	-	2	1.400.000,00	-	-	-	2	1.400.000,00	2	1.400.000,00	-	-	-	2	1.400.000,00	-	-
330	1.1.7.01.03.06.004 - 01000000000089	TINTA/TONER PRINTER - TINTA EPSON HITAM	-	-	2	300.000,00	-	-	-	2	300.000,00	2	300.000,00	-	-	-	2	300.000,00	-	-
331	1.1.7.01.03.06.004 - 01000000000144	TINTA/TONER PRINTER - REFILL TONER	-	-	2	780.000,00	-	-	-	2	780.000,00	2	780.000,00	-	-	-	2	780.000,00	-	-
332	1.1.7.01.03.06.004 - 01000000000165	TINTA/TONER PRINTER - CATRIDGE TONER LASER HITAM	-	-	2	1.400.000,00	-	-	-	2	1.400.000,00	2	1.400.000,00	-	-	-	2	1.400.000,00	-	-
333	1.1.7.01.03.06.004 - 010000000002166	TINTA/TONER PRINTER - TINTA REFILL	-	-	10	270.000,00	-	-	-	10	270.000,00	10	270.000,00	-	-	-	10	270.000,00	-	-
334	1.1.7.01.03.06.004 - 010000000002255	TINTA/TONER PRINTER - CATRIDGE PRINTER HITAM	-	-	10	3.050.000,00	-	-	-	10	3.050.000,00	10	3.050.000,00	-	-	-	10	3.050.000,00	-	-
335	1.1.7.01.03.06.004 - 010000000002428	TINTA/TONER PRINTER - REFILL TINTA HITAM EPSON 664 BLACK	1	150.000,00	2	250.000,00	-	-	-	2	250.000,00	3	400.000,00	-	-	-	3	400.000,00	-	-
336	1.1.7.01.03.06.004 - 01000000000364	TINTA/TONER PRINTER - REFILL TINTA EPSON HITAM	-	-	16	2.445.000,00	-	-	-	16	2.445.000,00	16	2.445.000,00	-	-	-	16	2.445.000,00	-	-
337	1.1.7.01.03.06.004 - 01000000000365	TINTA/TONER PRINTER - REFILL TINTA EPSON WARNA	3	1.050.000,00	15	2.025.000,00	-	-	-	15	2.025.000,00	18	3.075.000,00	-	-	-	18	3.075.000,00	-	-
338	1.1.7.01.03.06.004 - 0100000001539	TINTA/TONER PRINTER - TINTA PRINTER EPSON	-	-	3	996.000,00	-	-	-	3	996.000,00	3	996.000,00	-	-	-	3	996.000,00	-	-
339	1.1.7.01.03.06.004 - 0100000002562	TINTA/TONER PRINTER - CATRIDGE HP	-	-	3	1.500.000,00	-	-	-	3	1.500.000,00	3	1.500.000,00	-	-	-	3	1.500.000,00	-	-
340	1.1.7.01.03.06.004 - 0100000004467	TINTA/TONER PRINTER - REFILL PRINTER LASER 85.A	-	-	5	500.000,00	-	-	-	5	500.000,00	5	500.000,00	-	-	-	5	500.000,00	-	-
341	1.1.7.01.03.06.004 - 0100000006299	TINTA/TONER PRINTER - TINTA PRINTER HP GT52 WARNA	-	-	1	350.000,00	-	-	-	1	350.000,00	1	350.000,00	-	-	-	1	350.000,00	-	-
342	1.1.7.01.03.06.004 - 0100000006790	TINTA/TONER PRINTER - REFILL TONER LASERJET	-	-	1	65.000,00	-	-	-	1	65.000,00	1	65.000,00	-	-	-	1	65.000,00	-	-
343	1.1.7.01.03.06.004 - 0100000007801	TINTA/TONER PRINTER - CHATRIDGE DESKIET HITAM	1	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	320.000,00	-	-	-	1	320.000,00	-	-
344	1.1.7.01.03.06.004 - 0100000007802	TINTA/TONER PRINTER - CHATRIDGE DESKIET WARNA	2	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2	200.000,00	-	-	-	2	200.000,00	-	-
345	1.1.7.01.03.06.004 - 0100000009382	TINTA/TONER PRINTER - TONER LASERJET 85A SAP	-	-	4	800.000,00	-	-	-	4	800.000,00	4	800.000,00	-	-	-	4	800.000,00	-	-
346	1.1.7.01.03.06.004 - 885007024080	TINTA/TONER PRINTER - REFILL TINTA PRINTER	-	-	10	1.200.000,00	-	-	-	10	1.200.000,00	10	1.200.000,00	-	-	-	10	1.200.000,00	-	-
347	1.1.7.01.03.06.006 - 0100000001108	USB/FLASH DISK - FLASDISK	1	120.000,00	7	660.000,00	-	-	-	7	660.000,00	8	780.000,00	-	-	-	8	780.000,00	-	-
348	1.1.7.01.03.06.006 - 0100000001109	USB/FLASH DISK - FLASDISK 16 GB	1	120.000,00	10	1.000.000,00	-	-	-	10	1.000.000,00	11	1.120.000,00	-	-	-	11	1.120.000,00	-	-
349	1.1.7.01.03.06.006 - 0100000001447	USB/FLASH DISK - FLASDISK	2	160.000,00	6	498.000,00	-	-	-	6	498.000,00	8	658.000,00	-	-	-	8	658.000,00	-	-
350	1.1.7.01.03.06.006 - 010000000622																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
387	1.1.7.01.03.07.016 - 010000002662	BAHAN KEBERSIHAN - WIPER KACA	-	-	15	300.000,00	-	-	-	-	15	300.000,00	15	300.000,00	-	-	15	300.000,00
388	1.1.7.01.03.07.016 - 010000002740	BAHAN KEBERSIHAN - KANTONG SAMPAH	-	-	6	120.000,00	-	-	-	-	6	120.000,00	6	120.000,00	-	-	6	120.000,00
389	1.1.7.01.03.07.016 - 010000002823	BAHAN KEBERSIHAN - SEKOP	-	-	10	2.500.000,00	-	-	-	-	10	2.500.000,00	10	2.500.000,00	-	-	10	2.500.000,00
390	1.1.7.01.03.07.016 - 010000004318	BAHAN KEBERSIHAN - GUNTING RUMPUT	-	-	11	1.760.000,00	-	-	-	-	11	1.760.000,00	11	1.760.000,00	-	-	11	1.760.000,00
391	1.1.7.01.03.07.016 - 010000004385	BAHAN KEBERSIHAN - PENGRO CIBRAK	-	-	6	180.000,00	-	-	-	-	6	180.000,00	6	180.000,00	-	-	6	180.000,00
392	1.1.7.01.03.07.016 - 010000004813	BAHAN KEBERSIHAN - SABUT SPONS	-	-	20	150.000,00	-	-	-	-	20	150.000,00	20	150.000,00	-	-	20	150.000,00
393	1.1.7.01.03.07.016 - 0100000081673	BAHAN KEBERSIHAN - ALAT SEMPROT	-	-	2	56.000,00	-	-	-	-	2	56.000,00	2	56.000,00	-	-	2	56.000,00
394	1.1.7.01.03.07.016 - 010000008269	BAHAN KEBERSIHAN - LOBBY DUSTER	-	-	6	906.000,00	-	-	-	-	6	906.000,00	6	906.000,00	-	-	6	906.000,00
395	1.1.7.01.03.07.016 - DKHB000000168	BAHAN KEBERSIHAN - ANTIS ANTISEPTIC	-	-	1	65.000,00	-	-	-	-	1	65.000,00	1	65.000,00	-	-	1	65.000,00
396	1.1.7.01.03.07.017 - 0100000056044	PERABOT KANTOR LAINNYA - SPRAYER	-	-	9	135.000,00	-	-	-	-	9	135.000,00	9	135.000,00	-	-	9	135.000,00
397	1.1.7.01.03.07.017 - 01000000592626	PERABOT KANTOR LAINNYA - PAYUNG	-	-	2	350.000,00	-	-	-	-	2	350.000,00	2	350.000,00	-	-	2	350.000,00
398	1.1.7.01.03.08.001 - 0100000021204	KABEL LISTRIK - KABEL NYM 3 X 2,5	-	-	3	2.415.000,00	-	-	-	-	3	2.415.000,00	3	2.415.000,00	-	-	3	2.415.000,00
399	1.1.7.01.03.08.001 - 0100000001179	KABEL LISTRIK - KABEL	-	-	3	2.950.000,00	-	-	-	-	3	2.950.000,00	3	2.950.000,00	-	-	3	2.950.000,00
400	1.1.7.01.03.08.001 - 0100000001141	KABEL LISTRIK - KABEL LISTRIK	-	-	2	940.000,00	-	-	-	-	2	940.000,00	2	940.000,00	-	-	2	940.000,00
401	1.1.7.01.03.08.001 - BCNM000000178	KABEL LISTRIK - KABEL ROLL	-	-	1	102.000,00	-	-	-	-	1	102.000,00	1	102.000,00	-	-	1	102.000,00
402	1.1.7.01.03.08.002 - 0100000000054	LAMPU LISTRIK - LAMPU LED	-	-	80	7.000.000,00	-	-	-	-	80	7.000.000,00	80	7.000.000,00	-	-	80	7.000.000,00
403	1.1.7.01.03.08.002 - 0100000000145	LAMPU LISTRIK - LAMPU EMERGENCY	-	-	1	600.000,00	-	-	-	-	1	600.000,00	1	600.000,00	-	-	1	600.000,00
404	1.1.7.01.03.08.002 - 0100000013116	LAMPU LISTRIK - LAMPU TL LED 16 W PHILIPS	-	-	285	8.550.000,00	-	-	-	-	285	8.550.000,00	285	8.550.000,00	-	-	285	8.550.000,00
405	1.1.7.01.03.08.002 - 0100000016923	LAMPU LISTRIK - SENTER LED	-	-	1	150.000,00	-	-	-	-	1	150.000,00	1	150.000,00	-	-	1	150.000,00
406	1.1.7.01.03.08.002 - 0100000017156	LAMPU LISTRIK - LAMPU TL BULAT 20 WATT	-	-	20	400.000,00	-	-	-	-	20	400.000,00	20	400.000,00	-	-	20	400.000,00
407	1.1.7.01.03.08.002 - 0100000040000	LAMPU LISTRIK - LAMPU LED 20 WATT	-	-	28	1.960.000,00	-	-	-	-	28	1.960.000,00	28	1.960.000,00	-	-	28	1.960.000,00
408	1.1.7.01.03.08.002 - 0100000040433	LAMPU LISTRIK - BREAKER NF 60 A	-	-	2	1.800.000,00	-	-	-	-	2	1.800.000,00	2	1.800.000,00	-	-	2	1.800.000,00
409	1.1.7.01.03.08.003 - 0100000000177	STOP KONTAK - STOP KONTAK	-	-	8	184.000,00	-	-	-	-	8	184.000,00	8	184.000,00	-	-	8	184.000,00
410	1.1.7.01.03.08.004 - 0100000000465	SAKLAR - MCB 3 FASA	-	-	2	720.000,00	-	-	-	-	2	720.000,00	2	720.000,00	-	-	2	720.000,00
411	1.1.7.01.03.08.004 - 0100000001598	SAKLAR - SAKLAR ENGKEL IN ROW	-	-	2	76.000,00	-	-	-	-	2	76.000,00	2	76.000,00	-	-	2	76.000,00
412	1.1.7.01.03.08.004 - 0100000022544	SAKLAR - SAKLAR DOUBLE INBOW BROCO	-	-	10	290.000,00	-	-	-	-	10	290.000,00	10	290.000,00	-	-	10	290.000,00
413	1.1.7.01.03.08.004 - 010000004008	SAKLAR - SAKLAR ENGKEL	-	-	10	380.000,00	-	-	-	-	10	380.000,00	10	380.000,00	-	-	10	380.000,00
414	1.1.7.01.03.08.004 - 0100000068055	SAKLAR - SAKELAR DOUBLE INBOW BROCCO	-	-	3	87.000,00	-	-	-	-	3	87.000,00	3	87.000,00	-	-	3	87.000,00
415	1.1.7.01.03.08.004 - 0100000093611	SAKLAR - MCB 20 AMPERE 3 PASS SCHNEIDER	-	-	2	720.000,00	-	-	-	-	2	720.000,00	2	720.000,00	-	-	2	720.000,00
416	1.1.7.01.03.08.005 - 0100000039146	STACKER - STEKER	-	-	4	136.000,00	-	-	-	-	4	136.000,00	4	136.000,00	-	-	4	136.000,00
417	1.1.7.01.03.08.007 - 0100000001590	STARTER - STARTER TL	-	-	150	1.125.000,00	-	-	-	-	150	1.125.000,00	150	1.125.000,00	-	-	150	1.125.000,00
418	1.1.7.01.03.08.010 - 0100000004049	BATU BATERAI - BATU BATERAI KECIL ISI 4	-	-	11	121.000,00	-	-	-	-	11	121.000,00	11	121.000,00	-	-	11	121.000,00
419	1.1.7.01.03.08.010 - 010000005451	BATU BATERAI - BATU BATERAI ABC AA	-	-	5	55.000,00	-	-	-	-	5	55.000,00	5	55.000,00	-	-	5	55.000,00
420	1.1.7.01.03.09.001 - 010000007045	BAHAN BAKU PAKAIAN - BAHAN SERAGAM PDH KHEKI	-	-	142	82.147.000,00	-	-	-	-	142	82.147.000,00	142	82.147.000,00	-	-	142	82.147.000,00
421	1.1.7.01.03.09.001 - 010000007480	BAHAN BAKU PAKAIAN - JARUM TANGAN	-	-	4	32.000,00	-	-	-	-	4	32.000,00	4	32.000,00	-	-	4	32.000,00
422	1.1.7.01.03.09.004 - 0100000000186	PENUTUP TANGAN - SARUNG TANGAN LATEX	-	-	16	729.000,00	-	-	-	-	16	729.000,00	16	729.000,00	-	-	16	729.000,00
423	1.1.7.01.03.09.004 - 010000004225	PENUTUP TANGAN - SARUNG TANGAN KARET	-	-	1	120.000,00	-	-	-	-	1	120.000,00	1	120.000,00	-	-	1	120.000,00
424	1.1.7.01.03.09.007 - 0100000001088	PERLENGKAPAN LAPANGAN - MASKER	-	-	1	24.000,00	-	-	-	-	1	24.000,00	1	24.000,00	-	-	1	24.000,00
425	1.1.7.01.03.09.007 - 0100000000247	PERLENGKAPAN LAPANGAN - STOP KONTAK 3 LUBANG OUTBOW	-	-	6	120.000,00	-	-	-	-	6	120.000,00	6	120.000,00	-	-	6	120.000,00
426	1.1.7.01.03.09.007 - 0100000001342	PERLENGKAPAN LAPANGAN - TANG POTONG	-	-	2	120.000,00	-	-	-	-	2	120.000,00	2	120.000,00	-	-	2	120.000,00
427	1.1.7.01.03.09.007 - 0100000017671	PERLENGKAPAN LAPANGAN - PINSET	-	-	8	231.000,00	-	-	-	-	8	231.000,00	8	231.000,00	-	-	8	231.000,00
428	1.1.7.01.03.09.007 - 0100000021175	PERLENGKAPAN LAPANGAN - MASKER BEDAH 3 PLY	-	-	3	136.500,00	-	-	-	-	3	136.500,00	3	136.500,00	-	-	3	136.500,00
429	1.1.7.01.03.09.007 - 0100000023795	PERLENGKAPAN LAPANGAN - LAMPU HALOGEN	-	-	2	600.000,00	-	-	-	-	2	600.000,00	2	600.000,00	-	-	2	600.000,00
430	1.1.7.01.03.09.007 - 0100000025901	PERLENGKAPAN LAPANGAN - BOTOL SEMPROT	-	-	1	28.000,00	-	-	-	-	1	28.000,00	1	28.000,00	-	-	1	28.000,00
431	1.1.7.01.03.09.007 - 010000002726	PERLENGKAPAN LAPANGAN - JAS HUJAN	-	-	2	500.000,00	-	-	-	-	2	500.000,00	2	500.000,00	-	-	2	500.000,00
432	1.1.7.01.03.09.007 - 010000002747	PERLENGKAPAN LAPANGAN - SABIT	-	-	2	200.000,00	-	-	-	-	2	200.000,00	2	200.000,00	-	-	2	200.000,00
433	1.1.7.01.03.09.007 - 010000003520	PERLENGKAPAN LAPANGAN - SEKRING	-	-	2	200.000,00	-	-	-	-	2	200.000,00	2	200.000,00	-	-	2	200.000,00
434	1.1.7.01.03.09.007 - 010000007418	PERLENGKAPAN LAPANGAN - SENAR POTONG RUMPUT (GENDONG)	-	-	5	675.000,00	-	-	-	-	5	675.000,00	5	675.000,00	-	-	5	675.000,00
435	1.1.7.01.03.11.001 - 010000005947	BENDERA START - BENDERA MERAH PUTIH 180X270 CM	-	-	2	800.000,00	-	-	-	-	2	800.000,00	2	800.000,00	-	-	2	800.000,00
436	1.1.7.01.03.11.001 - 010000005949	BENDERA START - TALI TIANG BENDERA	-	-	60	1.200.000,00	-	-	-	-	60	1.200.000,00	60	1.200.000,00	-	-	60	1.200.000,00
437	1.1.7.01.03.13.001 - 0100000062772	ALAT KESEHATAN, ALAT KEBIDANAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI - KAIN KASA	-	-	5	200.000,00	-	-	-	-	5	200.000,00	5	200.000,00	-	-	5	200.000,00
438	1.1.7.01.03.13.002 - 0100000017129	ALAT/BAHAN LABORATORIUM - ALKOHOL 70% 1L	-	-	9	405.000,00	-	-	-	-	9	405.000,00	9	405.000,00	-	-	9	405.000,00
439	1.1.7.01.03.13.002 - 0100000043891	ALAT/BAHAN LABORATORIUM - ALKOHOL 96 % 1 L	-	-	2	200.000,00	-	-	-	-	2	200.000,00	2	200.000,00	-	-	2	200.000,00
440	1.1.7.01.03.13.002 - RSJ010207000003	ALAT/BAHAN LABORATORIUM - AQUA DM 20 LITER / AQUADEST	-	-	4	800.000,00	-	-	-	-	4	800.000,00	4	800.000,00	-	-	4	800.000,00
441	1.1.7.01.03.13.002 - RSJ010207000151	ALAT/BAHAN LABORATORIUM - APRON	-	-	1	140.000,00	-	-	-	-	1	140.000,00	1	140.000,00	-	-	1	140.000,00
442	1.1.7.01.03.13.003 - 0100000039985	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA - TALI BENDERA	-	-	45	900.000,00	-	-	-	-	45	900.000,00	45	900.000,00	-	-	45	900.000,00
443	1.1.7.01.03.13.003 - 0100000064650	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA - DEKORASI	-	-	4	3.300.000,00	-	-	-	-	4	3.300.000,00	4	3.300.000,00	-	-	4	3.300.000,00
444	1.1.7.01.03.13.003 - 0100000080758	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA - TIRAI BAMBU	-	-	5	5.000.000,00	-	-	-	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	-	-	5	5.000.000,00
445	1.1.7.01.03.13.003 - BM000056118	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA - GEROBAG DORONG	-	-	1	2.000.000,00	-	-	-	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	-	-	1	2.000.000,00
446	1.1.7.01.03.13.003 - CAB3000000031	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA - LAKBAN DAIMARU TAPE	-	-	5	90.000,00	-	-	-	-	5	90.000,00	5	90.000,00	-	-	5	90.000,00
447	1.1.7.01.03.13.003 - CAB3000000038	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA - STOPMAP KERTAS BIOLA	-	-	9	45.000,00	-	-	-	-	9	45.000,00	9	45.000,00	-	-	9	45.000,00
448	1.1.7.01.03.13.003 - TBJT000000034	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA - PISAU CUTTER BESAR	-	-	1	15.000,00	-	-	-	-	1	15.000,00	1	15.000,00	-	-	1	15.000,00
449	1.1.7.01.04.01.002 - 0100000001691	OBAT PADAT	-	-	1	200.000,00	-	-	-	-								



PROVINSI JAWA TENGAH

Periode s/d Bulan DESEMBER 2024

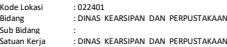
Mengetahui
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, M.Si
NIP. 19700502 199903 1 008



Pengurus Barang


SUNGADI
NIP. 19670918 198902 1 001



MUTASI ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2024
Periode s/d Bulan DESEMBER 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501	1.3.2.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	1.3.2.15.04.01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	1.3.2.15.04.02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	1.3.2.15.04.03	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	1.3.2.15.04.04	DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	1.3.2.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	1.3.2.15.04.06	ALAT UKUR PERALATAN FASILEKTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	1.3.2.15.04.07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	1.3.2.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	1.3.2.16.01.02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	1.3.2.16.01.03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	1.3.2.17.01.01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	1.3.2.17.01.02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	1.3.2.17.01.03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	1.3.2.17.01.04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	1.3.2.17.01.05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	1.3.2.17.01.06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	1.3.2.17.01.07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	1.3.2.17.01.08	LEACHING EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	1.3.2.17.01.09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	1.3.2.17.01.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	1.3.2.17.01.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	1.3.2.17.01.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR) EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	1.3.2.17.01.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	1.3.2.17.01.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	1.3.2.17.01.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	1.3.2.17.01.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	1.3.2.17.01.17	GAS - LIQUID SEPARATION EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	1.3.2.17.01.18	ISOTOPIC SEPARATION EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	1.3.2.17.01.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	1.3.2.17.01.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	1.3.2.17.01.21	SIZE REDUCTION SIZE BALANCEMENT EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	1.3.2.17.01.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	1.3.2.17.01.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	1.3.2.17.01.24	MECHANICAL PROCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	1.3.2.17.01.25	CHEMICAL REACTION EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	1.3.2.17.01.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	1.3.2.18.01.01	RAMBU BERSUAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	1.3.2.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	1.3.2.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	1.3.2.18.02.01	RUNWAY /THRESHOLD LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	1.3.2.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	1.3.2.18.02.03	APPROACH LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	1.3.2.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	1.3.2.18.02.05	SIGNAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	1.3.2.18.02.06	FLOOD LIGHTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	1.3.2.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	1.3.2.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	1.3.2.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	1.3.2.19.01.01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	1.3.2.19.01.02	PERALATAN PEMAINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	1.3.2.19.01.03	PERALATAN SENAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	1.3.2.19.01.04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	1.3.2.19.01.05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	1.3.2.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	1.3.2.19.01.07	PERALATAN ORAH RAGA MENEMBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	16	21.919.513.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUIDING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	1.3.3.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	1.3.3.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	1.3.3.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	1.3.3.01.01.06	BANGUNAN KESIHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	1.3.3.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	1.3.3.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	1.3.3.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	1.3.3.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	1.3.3.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	1.3.3.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	1.3.3.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	5	72.411.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	1.3.3.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	1	326.291.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	1.3.3.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	1.3.3.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	-	-	-	1	5.620.827.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	1.3.3.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSEUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	1.3.3.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	1.3.3.01.01.19	BANGUNAN PENGUNJAN KELAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	1.3.3.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	1.3.3.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAMAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	1.3.3.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	1.3.3.01.01.23	BANGUNAN PEMBARKARAN BANGKAI HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	1.3.3.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSEDIAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	1.3.3.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	1	26.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	1.3.3.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	1.3.3.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	1.3.3.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI																				

[illegible]



AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2024
Periode s/d Bulan DESEMBER 2024

Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang :
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumuaasi Awal	TAMBAH					KOREKSI	KURANG				Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU	
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas				Reklas			KOREKSI				
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptabel		Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.3.7.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	11	4.793.220.260,00	4.065.823.260,00	-	727.397.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.793.220.260,00	-
2	1.3.7.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN	35	5.723.636.345,00	5.289.457.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	167.000.000,00	-	-	135.573.687,50	5.258.031.407,50	465.604.937,50
3	1.3.7.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	104	2.053.754.956,00	1.625.251.933,20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.375.000,00	-	-	134.730.755,70	1.757.607.688,90	296.147.267,10
4	1.3.7.01.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.7.01.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1.741	13.836.690.408,00	13.325.157.869,69	-	249.350.000,00	-	-	-	-	-	-	631.853.238,00	-	-	200.057.172,26	13.142.711.803,95	693.978.604,05
6	1.3.7.01.06	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	203	4.524.881.090,00	4.687.865.256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	201.343.166,00	-	-	3.225.200,01	4.489.747.290,01	35.133.799,99
7	1.3.7.01.07	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.3.7.01.08	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	7	78.430.000,00	90.230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00	-	-	13.333,33	77.243.333,33	1.186.666,67
9	1.3.7.01.09	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.7.01.10	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER	481	5.664.099.519,00	5.512.678.377,74	-	-	-	-	-	-	-	-	354.156.927,00	-	-	129.867.092,48	5.288.388.543,22	375.710.975,78
11	1.3.7.01.11	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.3.7.01.12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.7.01.13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.7.01.14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.7.01.15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.7.01.16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.7.01.17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.7.01.18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.7.01.19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.3.7.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	28	28.340.680.998,00	12.119.751.742,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.145.527,66	12.639.897.270,48	15.700.783.727,52
21	1.3.7.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.3.7.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.7.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	342.880.670,00	99.297.039,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.131.735,66	106.428.774,82	236.451.895,18
24	1.3.7.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.3.7.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	2	190.275.000,00	96.151.612,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.831.451,62	101.983.064,52	88.291.935,48
26	1.3.7.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.7.03.04	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	1	16.700.000,00	12.107.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.500,00	12.525.000,00	4.175.000,00
28	1.3.7.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.617	65.565.249.246,00	46.923.772.311,51	-	976.747.000,00	-	-	-	-	-	-	1.369.728.331,00	-	-	1.136.993.456,22	47.667.784.436,73	17.897.464.809,27

Mengetahui
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, M.Si
NIP. 19700502 199903 1 008

Semarang, 31 Desember 2024

Pengurus Barang

SUNGADI
NIP. 19670918 198902 1 001



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Objek	Keterangan	Perolehan		Akumulasi Awal	TAMBAH							KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
		Jml	Harga		Ribab	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas			KOREKSI				
							Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomtabel			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomtabel					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.7.01.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR APUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU	11	4.793.220.260,00	4.065.823.260,00	-	727.397.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.793.220.260,00	-	
1.3.7.01.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	35	5.723.636.345,00	5.289.457.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	167.000.000,00	-	-	135.573.587,50	5.258.031.407,50	465.064.937,50	
1.3.7.01.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT APUNG BERMOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.02.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGOEL BERMESIN	46	1.428.960.557,00	998.757.534,20	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000,00	-	-	134.730.755,70	1.132.813.289,90	296.147.267,10	
1.3.7.01.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGOEL TAK BERMESIN	57	623.064.399,00	623.064.399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.064.399,00	-	
1.3.7.01.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT UKUR	1	1.730.000,00	3.430.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	-	-	-	1.730.000,00	-	
1.3.7.01.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGOLAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.05.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR	740	8.629.397.747,00	8.441.318.347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	63.930.100,00	-	-	82.292.133,33	8.459.660.380,33	169.717.366,67	
1.3.7.01.05.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT RUMAH TANGGA	991	5.074.705.446,00	4.751.252.307,69	-	249.350.000,00	-	-	-	-	-	-	567.923.138,00	-	-	117.765.038,93	4.590.444.206,62	524.261.237,38	
1.3.7.01.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	50	132.587.215,00	132.587.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.587.215,00	-	
1.3.7.01.06.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO	158	4.374.317.990,00	4.529.494.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	193.470.166,00	-	-	3.225.200,01	4.329.239.190,01	35.133.799,99	
1.3.7.01.06.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KOMUNIKASI	46	150.508.100,00	158.381.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.873.000,00	-	-	-	150.508.100,00	-	
1.3.7.01.06.03	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN PEMANCAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.06.04	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.07.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.07.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESIHATAN LAINNY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.08.01	AKUMULASI PENYUSUTAN UNIT ALAT LABORATORIUM	6	77.230.000,00	90.230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00	-	-	-	77.230.000,00	-	
1.3.7.01.08.02	AKUMULASI PENYUSUTAN UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.08.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.08.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.08.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT UKUR/UKURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.333,33	13.333,33	1.186.666,67	
1.3.7.01.08.06	AKUMULASI PENYUSUTAN RADIASI TESTING LABORATORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.08.07	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.08.08	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN LABORATORIUM HYDRODYNAMIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.08.09	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.09.01	AKUMULASI PENYUSUTAN SENIATA API	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.09.02	AKUMULASI PENYUSUTAN PERSENJATAN NON SENIATA API	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.09.03	AKUMULASI PENYUSUTAN SENIATA SINAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.09.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.10.01	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER UNIT	207	2.262.138.893,00	2.163.817.803,06	-	-	-	-	-	-	-	-	148.465.270,00	-	-	82.579.279,99	2.097.931.813,05	164.207.079,95	
1.3.7.01.10.02	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KOMPUTER	274	3.401.960.626,00	3.348.860.514,68	-	-	-	-	-	-	-	-	255.091.657,00	-	-	47.287.812,49	3.190.456.730,17	211.503.895,63	
1.3.7.01.11.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.11.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI GEOFIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.12.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.12.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN NON MESIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.13.01	AKUMULASI PENYUSUTAN SUMBUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.13.02	AKUMULASI PENYUSUTAN PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.13.03	AKUMULASI PENYUSUTAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.14.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.14.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.15.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT DETEKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.15.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PELINDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.15.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT SAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.15.04	AKUMULASI PENYUSUTAN KERJA PENYERBAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.16.01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERENCANAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.17.01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.18.01	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU- RAMBU LALU LINTAS DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.18.02	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU- RAMBU LALU LINTAS UDARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.18.03	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU- RAMBU LALU LINTAS LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.01.19.01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN UKUR RANGKAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.02.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28	28.340.680.998,00	12.119.751.742,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.145.527,66	12.639.897.270,48	15.700.783.727,52	
1.3.7.02.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.02.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN SARANA PELENGKAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.02.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN CANDITUJU PERINGATAN/PRASASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.02.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA PERAMBUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.02.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGUT/TAJAN BATAS	4	342.880.670,00	99.297.039,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.131.735,66	106.428.774,82	236.451.895,18	
1.3.7.03.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN PENGARAI PASANG SURUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN PENANGKULANGAN BENCANA ALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.02.05	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN TANAH	1	120.000.000,00	68.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	72.000.000,00	
1.3.7.03.02.06	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	1	70.275.000,00	28.151.612,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.831.451,62	29.983.064,52	
1.3.7.03.02.07	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR KOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.291.935,48	
1.3.7.03.02.08	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI AIR BERSIH/BAKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI AIR KOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.04	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.05	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.06	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI GARDU LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.07	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI PERTAHANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.08	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI GAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.09	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI PENGAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.03.10	AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.04.01	AKUMULASI JARINGAN AIR MINUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.7.03.04.02	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN LISTRIK	1	1																



Mengetahui
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

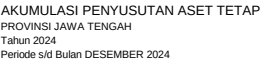


DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, M.Si
NIP. 19700502 199903 1 008

Semarang, 31 Desember 2024

Pengurus Barang

SUNGADI
9670918 198902 1 001



: 022401
: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
:
: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

[illegible]

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306	1.3.7.01.08.01.065	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM KEDOKTERAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	1.3.7.01.08.01.066	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LAB STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	1.3.7.01.08.02.001	Akumulasi Penyusutan Analytical Instrument	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	1.3.7.01.08.02.002	Akumulasi Penyusutan Instrument Probe/Sensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	1.3.7.01.08.02.003	Akumulasi Penyusutan General Laboratory Tool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	1.3.7.01.08.02.004	Akumulasi Penyusutan Glassware Plastic/Utensils	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	1.3.7.01.08.02.005	Akumulasi Penyusutan Laboratory Safety Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	1.3.7.01.08.02.006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	1.3.7.01.08.03.001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	1.3.7.01.08.03.002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Matematika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	1.3.7.01.08.03.003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	1.3.7.01.08.03.004	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	1.3.7.01.08.03.005	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	1.3.7.01.08.03.006	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	1.3.7.01.08.03.007	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	1.3.7.01.08.03.008	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	1.3.7.01.08.03.009	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Keterampilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	1.3.7.01.08.03.010	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	1.3.7.01.08.03.011	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	1.3.7.01.08.03.012	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : PKN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	1.3.7.01.08.03.013	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Luar Daksa, Tuna Rungu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	1.3.7.01.08.03.014	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Kejuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	1.3.7.01.08.03.015	Akumulasi Penyusutan PAUD/TK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	1.3.7.01.08.03.016	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	1.3.7.01.08.04.001	Akumulasi Penyusutan Radiation Detector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	1.3.7.01.08.04.002	Akumulasi Penyusutan Modular Counting and Scientific Electronic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	1.3.7.01.08.04.003	Akumulasi Penyusutan Assembly/Counting System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	1.3.7.01.08.04.004	Akumulasi Penyusutan Recorder Display	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	1.3.7.01.08.04.005	Akumulasi Penyusutan System/Power Supply	1	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.333,33	13.333,33	1.186.666,67
334	1.3.7.01.08.04.006	Akumulasi Penyusutan Measuring/Testing Device	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	1.3.7.01.08.04.007	Akumulasi Penyusutan Opto Electronics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	1.3.7.01.08.04.008	Akumulasi Penyusutan Accelerator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	1.3.7.01.08.04.009	Akumulasi Penyusutan Reactor Experimental System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	1.3.7.01.08.04.010	Akumulasi Penyusutan Alat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	1.3.7.01.08.05.001	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	1.3.7.01.08.05.002	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	1.3.7.01.08.05.003	Akumulasi Penyusutan Proteksi Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	1.3.7.01.08.05.004	Akumulasi Penyusutan Meteorological Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	1.3.7.01.08.05.005	Akumulasi Penyusutan Sumber Radiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	1.3.7.01.08.05.006	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	1.3.7.01.08.06.001	Akumulasi Penyusutan Radiation Application Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	1.3.7.01.08.06.002	Akumulasi Penyusutan Non Destructive Test (NDT) Device	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	1.3.7.01.08.06.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Hidrologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	1.3.7.01.08.06.004	Akumulasi Penyusutan Radktion Laboratory Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	1.3.7.01.08.06.005	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN UMUM KEDOKTERAN / KLINIK NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	1.3.7.01.08.07.001	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	1.3.7.01.08.07.002	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	1.3.7.01.08.07.003	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	1.3.7.01.08.07.004	Akumulasi Penyusutan Laboratorium Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	1.3.7.01.08.07.005	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	1.3.7.01.08.07.006	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	1.3.7.01.08.08.001	Akumulasi Penyusutan Towing Carriage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	1.3.7.01.08.08.002	Akumulasi Penyusutan Wave Generator and Absorber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	1.3.7.01.08.08.003	Akumulasi Penyusutan Data Acquisition and Analyzing System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	1.3.7.01.08.08.004	Akumulasi Penyusutan Cavitation Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	1.3.7.01.08.08.005	Akumulasi Penyusutan Overhead Cranes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	1.3.7.01.08.08.006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	1.3.7.01.08.08.007	Akumulasi Penyusutan Pemesian : Model Ship Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	1.3.7.01.08.08.008	Akumulasi Penyusutan Pemesian : Propeller Model Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	1.3.7.01.08.08.009	Akumulasi Penyusutan Pemesian : Mechanical Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	1.3.7.01.08.08.010	Akumulasi Penyusutan Pemesian : Precision Mechanical Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	1.3.7.01.08.08.011	Akumulasi Penyusutan Pemesian : Painting Shop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	1.3.7.01.08.08.012	Akumulasi Penyusutan Pemesian : Ship Model Preparation Shop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	1.3.7.01.08.08.013	Akumulasi Penyusutan Pemesian : Electrical Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	1.3.7.01.08.08.014	Akumulasi Penyusutan MCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	1.3.7.01.08.08.015	Akumulasi Penyusutan Photo and Film Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	1.3.7.01.08.08.016	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	1.3.7.01.08.09.001	Akumulasi Penyusutan Alat Biomedik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	1.3.7.01.08.09.002	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standard dan Kalibrator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	1.3.7.01.08.09.003	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	1.3.7.01.08.09.004	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	1.3.7.01.08.09.005	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	1.3.7.01.08.09.006	Akumulasi Penyusutan Alat Instrumentasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	1.3.7.01.08.09.007	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Nautis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	1.3.7.01.08.09.008	Akumulasi Penyusutan Alat Telekomunikasi Pelayaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	1.3.7.01.08.09.009	Akumulasi Penyusutan Alat Pelayaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	1.3.7.01.08.09.010	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Perangkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	1.3.7.01.08.09.011	Akumulasi Penyusutan Alat Instrumentasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	1.3.7.01.09.01.001	Akumulasi Penyusutan Senjata Genggam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	1.3.7.01.09.01.002	Akumulasi Penyusutan Senjata Pnggang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	1.3.7.01.09.01.003	Akumulasi Penyusutan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	1.3.7.01.09.01.004	Akumulasi Penyusutan Senagan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	1.3.7.01.09.01.005	Akumulasi Penyusutan Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	1.3.7.01.09.01.006	Akumulasi Penyusutan Anril Lapis Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	1.3.7.01.09.01.007	Akumulasi Penyusutan Antilei Medan (Armed)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	1.3.7.01.09.01.008	Akumulasi Penyusutan Antilei Pertahanan Udara (Athanud)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	1.3.7.01.09.01.009	Akumulasi Penyusutan Kawaleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	1.3.7.01.09.01.010	Akumulasi Penyusutan Senjata Lain- Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	1.3.7.01.09.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394																			

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
516	1.3.7.02.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	16	21.919.513.747,00	11.923.638.422,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.822.007,57	12.381.460.430,39	9.538.053.316,61
517	1.3.7.02.01.01.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	1.3.7.02.01.01.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	1.3.7.02.01.01.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	1.3.7.02.01.01.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	1.3.7.02.01.01.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	1.3.7.02.01.01.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Oceanarium/Observatorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	1.3.7.02.01.01.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Badah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	1.3.7.02.01.01.009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	1.3.7.02.01.01.010	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	1.3.7.02.01.01.011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	1.3.7.02.01.01.012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	1.3.7.02.01.01.013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	5	72.411.000,00	22.102.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.448.220,00	23.551.080,00	48.859.920,00
529	1.3.7.02.01.01.014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	1	326.291.000,00	58.732.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.525.620,00	65.258.200,00	261.032.800,00
530	1.3.7.02.01.01.015	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pemotong Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	1.3.7.02.01.01.016	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan	1	5.620.827.851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.840.232,09	46.840.232,09	5.573.987.618,91
532	1.3.7.02.01.01.017	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Muslim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	1.3.7.02.01.01.018	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	1.3.7.02.01.01.019	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengujian Kelakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	1.3.7.02.01.01.020	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	1.3.7.02.01.01.021	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	1.3.7.02.01.01.022	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kriematorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	1.3.7.02.01.01.023	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkal Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	1.3.7.02.01.01.024	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tempat Perisidangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	1.3.7.02.01.01.025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Terbuka	1	26.175.000,00	26.175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.175.000,00	-
541	1.3.7.02.01.01.026	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penampung Sekam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	1.3.7.02.01.01.027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	1.3.7.02.01.01.028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	1.3.7.02.01.01.029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	1.3.7.02.01.01.030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	1.3.7.02.01.01.031	Akumulasi Penyusutan Bangunan Peralatan Geofisika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	1.3.7.02.01.01.032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	3	344.462.400,00	74.843.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.889.248,00	81.732.328,00	262.730.072,00
548	1.3.7.02.01.01.033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Parkir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	1.3.7.02.01.01.034	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	1.3.7.02.01.01.035	Akumulasi Penyusutan Bangunan Stasiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	1.3.7.02.01.01.036	Akumulasi Penyusutan Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	1.3.7.02.01.01.037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	31.000.000,00	14.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.000,00	14.880.000,00	16.120.000,00
553	1.3.7.02.01.02.001	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	1.3.7.02.01.02.002	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	1.3.7.02.01.02.003	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	1.3.7.02.01.02.004	Akumulasi Penyusutan Peristirahatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	1.3.7.02.01.02.005	Akumulasi Penyusutan Asrama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	1.3.7.02.01.02.006	Akumulasi Penyusutan Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	1.3.7.02.01.02.007	Akumulasi Penyusutan Motel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	1.3.7.02.01.02.008	Akumulasi Penyusutan Flak/Rumah Susun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	1.3.7.02.01.02.009	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	1.3.7.02.01.02.010	Akumulasi Penyusutan Partii Asuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	1.3.7.02.01.02.011	Akumulasi Penyusutan Apartemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	1.3.7.02.01.02.012	Akumulasi Penyusutan Rumah Tidak Bersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	1.3.7.02.01.02.013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	1.3.7.02.01.03.001	AKUMULASI PENYUSUTAN KAMAR MANDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	1.3.7.02.01.03.002	AKUMULASI PENYUSUTAN SARANA PELENGKAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	1.3.7.02.01.03.003	AKUMULASI PENYUSUTAN KANTIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	1.3.7.02.02.01.001	Akumulasi Penyusutan Candi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	1.3.7.02.02.01.002	Akumulasi Penyusutan Tugu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	1.3.7.02.02.01.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Peninggalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	1.3.7.02.02.01.004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peningatan/Prasasti Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	1.3.7.02.02.01.009	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU-RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	1.3.7.02.03.01.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	1.3.7.02.03.01.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	1.3.7.02.03.01.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	1.3.7.02.03.01.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	1.3.7.02.03.01.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	1.3.7.02.03.01.006	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	1.3.7.02.04.01.001	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	4	342.880.670,00	99.297.039,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.131.735,66	106.428.774,82	236.451.895,18
581	1.3.7.02.04.01.002	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	1.3.7.02.04.01.003	Akumulasi Penyusutan Plar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	1.3.7.02.04.01.004	Akumulasi Penyusutan Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	1.3.7.02.04.01.005	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	1.3.7.03.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Jalan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	1.3.7.03.01.01.002	Akumulasi Penyusutan Jalan Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	1.3.7.03.01.01.003	Akumulasi Penyusutan Jalan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	1.3.7.03.01.01.004	Akumulasi Penyusutan Jalan Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	1.3.7.03.01.01.005	Akumulasi Penyusutan Jalan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
622	1.3.7.03.02.02.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	1.3.7.03.02.02.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	1.3.7.03.02.03.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	1.3.7.03.02.03.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	1.3.7.02.03.03.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	1.3.7.03.02.03.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	1.3.7.03.02.03.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	1.3.7.03.02.03.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelelang Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	1.3.7.03.02.03.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	1.3.7.03.02.03.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	1.3.7.03.02.04.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	1.3.7.03.02.04.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	1.3.7.03.02.04.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	1.3.7.03.02.04.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	1.3.7.03.02.04.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengaman Sungai/Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	1.3.7.03.02.04.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelelang Pengaman Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	1.3.7.03.02.04.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	1.3.7.03.02.05.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	1.3.7.03.02.05.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	1	120.000.000,00	68.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	72.000.000,00	48.000.000,00
641	1.3.7.03.02.05.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	1.3.7.03.02.05.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	1.3.7.03.02.05.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	1.3.7.03.02.05.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelelang Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	1.3.7.03.02.05.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	1.3.7.02.02.05.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tanah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	1.3.7.03.02.06.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1	70.275.000,00	28.151.612,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.831.451,62	29.983.064,52	40.291.935,48
648	1.3.7.03.02.06.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	1.3.7.03.02.06.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	1.3.7.03.02.06.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	1.3.7.03.02.06.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelelang Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	1.3.7.03.02.06.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	1.3.7.03.02.07.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	1.3.7.03.02.07.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	1.3.7.03.02.07.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	1.3.7.03.02.07.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	1.3.7.03.02.07.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelelang Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	1.3.7.03.02.07.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kotor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	1.3.7.03.02.08.001	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	1.3.7.03.02.08.002	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR TAWAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	1.3.7.03.03.01.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Permukaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	1.3.7.03.03.01.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air SumberMata Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	1.3.7.03.03.01.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	1.3.7.03.03.01.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	1.3.7.03.03.01.005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	1.3.7.03.03.02.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	1.3.7.03.03.02.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	1.3.7.03.03.02.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	1.3.7.03.03.02.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	1.3.7.03.03.03.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	1.3.7.03.03.03.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	1.3.7.03.03.03.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penampung Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	1.3.7.03.03.03.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	1.3.7.03.03.04.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Percontohan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	1.3.7.03.03.04.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	1.3.7.03.03.04.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	1.3.7.03.03.04.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678	1.3.7.03.03.05.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
679	1.3.7.03.03.05.002	Akumulasi Penyusutan (PLTD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	1.3.7.03.03.05.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi (PLTM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	1.3.7.03.03.05.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	1.3.7.03.03.05.005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	1.3.7.03.03.05.006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	1.3.7.03.03.05.007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga gas (PLTG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	1.3.7.03.03.05.008	Akumulasi Penyusutan Instalasi (PLTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	1.3.7.03.03.05.009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	1.3.7.03.03.05.010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	1.3.7.03.03.05.011	Akumulasi Penyusutan Instalasi Samudera/Celombang Samudera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689	1.3.7.03.03.05.012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690	1.3.7.03.03.06.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	1.3.7.03.03.06.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	1.3.7.03.03.06.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	1.3.7.03.03.06.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	1.3.7.03.03.07.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan Di Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	1.3.7.03.03.07.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	1.3.7.03.03.08.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	1.3.7.03.03.08.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	1.3.7.03.03.08.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
699	1.3.7.03.03.08.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	1.3.7.03.03.09.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	1.3.7.03.03.09.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Reaktor Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	1.3.7.03.03.09.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	1.3.7.03.03.09.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	1.3.7.03.03.10.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	1.3.7.03.04.01.001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	1.3.7.03.04.01.002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Induk Distribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	1.3.7.03.04.01.003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	1.3.7.03.04.01.004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Sambungan Ke Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	1.3.7.03.04.01.005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	-	-													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Semarang, 31 Desember 2024

Pengurus Barang

SUNGADI
NIP. 19670918 198902 1 001



: 022401
: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
:
: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

[illegible]